

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MALANG
MELALUI KOPERASI SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

BADRUDIN KURNIAWAN

NIM. 0510310022



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2010**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2010

Jam : 09.00 WIB

Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui
Koperasi Setia Budi Wanita**

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
Ketua

DR. Imam Hardjanto, MAP, Dip, Sp.
Anggota

Dr. Bambang Supriyono, MS
anggota

Drs. Siswidvanto, MS
Anggota

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui**

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita

Disusun oleh : Badrudin Kurniawan

NIM : 0510310022

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, Januari 2010

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

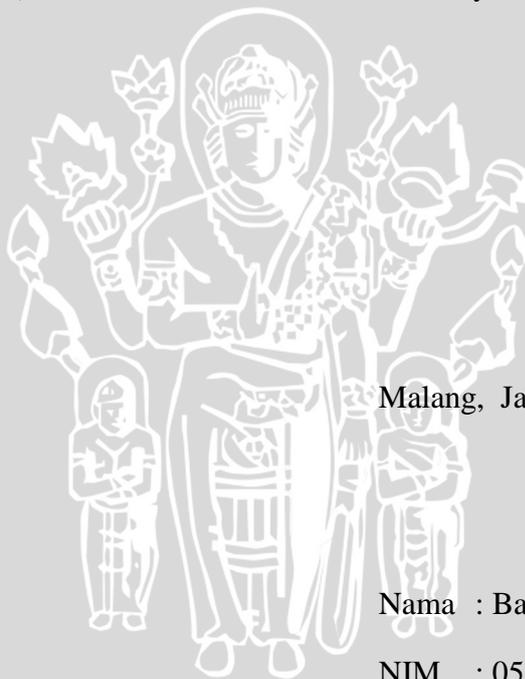
Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

DR. Imam Hardjanto, MAP, Dip, Sp.
NIP. 19460619 197412 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, Januari 2010

Nama : Badrudin Kurniawan

NIM : 0510310022

RINGKASAN

Badrudin Kurniawan, 2009, **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita**, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS dan Dr. Imam Hardjanto, MAP 131 Hal + xiii

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terkait masalah distribusi pendapatan masyarakat Indonesia mulai tahun 1999 sampai 2006 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat cenderung semakin mengalami ketimpangan. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, termasuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai hasil yang optimal dengan cakupan sasaran yang lebih banyak, pemberdayaan ekonomi masyarakat seharusnya menjadi upaya yang dilakukan dalam jangka panjang dan dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah saja. Koperasi sebagai pihak di luar pemerintah mampu menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat meskipun masih banyak kekurangan bagi koperasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kondisi dengan berbagai kekurangan tidak membuat salah satu koperasi di Kota Malang menyerah dan berhenti berusaha untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi tersebut yaitu Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW). Berbagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan oleh KSU SBW salah satunya yaitu pinjaman uang. Berdasarkan penelitian terdahulu disebutkan bahwa sejumlah 80 % pinjaman dari KSU SBW digunakan anggota untuk biaya pendidikan anak. Hal tersebut menjadi kurang optimal karena jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi, pinjaman tersebut seharusnya lebih cenderung digunakan untuk modal usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat dan kriteria yang digunakan yaitu dengan cara mengukur derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) atas obyek penelitian.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) beberapa upaya dilakukan, yaitu terdiri dari Simpanan dan Pinjaman, Pelatihan-pelatihan, Pemasaran Produk yang Dihasilkan Anggota, Konsultasi Usaha dan Akses Pekerjaan dengan Upah yang Layak. Upaya-upaya tersebut pada kenyataannya membutuhkan aktor, sasaran (*target groups*) dan instrumen lain berupa biaya serta aturan. Berbagai aktor baik dari pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat bekerjasama dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui KSU SBW. Dari pihak pemerintah meliputi Balai Latihan Koperasi (Balatkop) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Dari pihak swasta meliputi KSU SBW sendiri, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), PT Perusahaan Nasional Madani (PT. PNM) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Malang. Kemudian dari pihak masyarakat meliputi anggota KSU SBW, Dewan Koperasi

Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang, *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Damandiri. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat ini yaitu masyarakat baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang berdomisili di wilayah Malang Raya (Kota Malang dan Kabupaten Malang) dan Kota Batu. Meskipun pada kenyataannya cakupan wilayah sasaran pemberdayaan bisa lebih luas atas dasar kesepakatan kerja sama KSU SBW dengan pihak lain. Upaya pemberdayaan ini juga sangat memerlukan biaya dan aturan sebagai faktor penunjang. Biaya dialokasikan untuk pinjaman yaitu sejumlah Rp. 18.385.300.000,- (tahun 2008), biaya pelatihan sejumlah Rp. 33.000.000,- (tahun 2008), biaya pemasaran tidak dianggarkan untuk setiap bentuk pemasaran. Hanya saja dalam bentuk pemasaran Warung Serba Ada (Waserda), Waserda mengambil keuntungan sebesar 5%/item dari harga yang dipasang anggota. Biaya gaji diberikan dengan nominal di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang bagi setiap orang. Sedangkan biaya konsultasi usaha tidak dianggarkan sama sekali karena upaya pemberdayaan tersebut juga bukan termasuk program kerja dari KSU SBW.

Selama berjalannya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui KSU SBW tidak terlepas dari beberapa hambatan. Beberapa faktor penghambat tersebut berasal dari baik internal maupun eksternal KSU SBW. Faktor penghambat dari internal KSU SBW meliputi adanya Pembina Penyuluh Lapang (PPL) yang kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota, adanya anggota yang kurang disiplin, permasalahan pribadi anggota dan konsultasi usaha yang tidak diprogramkan. Sedangkan faktor penghambat dari eksternal KSU SBW yaitu biaya pelatihan ketrampilan dan mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota.

Beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui KSU SBW dapat diminimalisi melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut yaitu (1) Pengurus koperasi dapat mengambil tindakan yaitu melakukan pelatihan kembali atau mengenakan sanksi kepada PPL yang kurang proaktif, (2) Diskusi membahas permasalahan anggota pada saat pertemuan rutin yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kelompok, PPL dan Pengurus, (3) Pengurus atau juga PPL harus selalu memberikan pengertian kepada anggota bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi mereka, (4) KSU SBW dapat bermitra dengan lembaga yang mempunyai kemampuan untuk memberikan konsultasi tentang suatu usaha tertentu dan (5) KSU SBW menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dengan pelatih yang berasal dari anggota sendiri. Selain itu KSU SBW dapat bermitra dengan pihak luar yang hanya diminta untuk menyediakan pelatih saja dan untuk tempat dan alat bisa diatasi oleh KSU SBW sendiri.

SUMMARY

Badrudin Kurniawan, 2009, **Community Economic Empowerment of Malang City through Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita**, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS and Drs. Imam Hardjanto, MAP 131 pages + xiii

Based on data obtained from centre board of statistics or Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesian income distribution in 1999 and 2002 until 2006 showed that it tend to have a wider gap. Many efforts had been and were still done to overcome that problem including community economic empowerment effort. To achieve optimal output with wider target range, community economic empowerment should be a long term effort and was implemented by many parties, not only by government. Cooperative as non governmental institution was able to do community economic empowerment although there were many lacks to reach optimal output. This condition of lacks did not make one of cooperatives in Malang city give up and stop attempting to do community economic empowerment. It was Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW). Many forms of economic empowerment effort was done by KSU SBW, one of them was money loan. Based on previous study, it was known that 80 % loan provided by KSU SBW was used by members for their children education cost payment. It became less optimal because in relation to economic empowerment it should be used as capital. This research was purposed to know and describe community economic empowerment of Malang City through Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

It was descriptive research with qualitative approach. Data sources used were primary and secondary data. Data collection techniques were observation, interview and documentation while data was analyzed by interactive model. Data validity was measured by using a technique of investigation based on the nature and criteria used which were credibility, transferability, dependability, and conformability level upon the research's object.

Within community economic empowerment of Malang City through Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW), there were several efforts that consist of saving and loan, training, marketing of member's product, trading consultation, and job access wit adequate salary. These efforts factually required actor, target, cost and rules. Many actors cooperated to hold community economic empowerment of Malang city through KSU SBW. Governmental parties include Balai Latihan Koperasi (Balatkop) and Balai Latihan Kerja (BK). Private parties consist of KSU BW itself, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) of Malang City, *International Labour Organization* (ILO) and Yayasan Damandiri. target of this community empowerment was residents, both men and women, lived in Malang Raya (Malang city and regency) and Batu city. Although in the fact, this target area could be extended based on cooperative agreement of between KSU BW with other parties. This effort also need cost and rules as the supporting factors. Cost allocated for loan was about Rp. 18.385.300.000,- (2008), training cost was about Rp 33.000.000,- (2008), marketing cost was not allocated for several kinds of marketing forms. But in Warung Serba Ada (Waserda) form, Warung Serba Ada (Waserda) took 5% profit for each price determined by members. Wages was given with a nominal above minimum regional salary or

Upah Minimum Regional (UMR) of Malang city. Whereas consultation cost was not being budgeted because it did not include in working programs of KSU BW.

Nevertheless, it also faced several obstacles. These lowering factors came from both internal and external area of KSU BW. Internal factors included the presence of field supervisor or Pembina Penyuluh Lapang (PPL) that is less pro active in giving information to the members, less discipline members, private problems of members, and unprogrammed working activities. Whereas external factors were too expensive skill training and partnership cost.

Those lowering factors could be minimized through some methods. They were (1) cooperative officers could take actions such as giving reeducation or punishment toward less proactive field supervisors, (2) discussing about member's problem in routine meeting which was attended by group leader, field supervisor and cooperative officers, (3) Officers and field supervisor should always give understanding that economic empowerment was very important to optimize their potency (4) KSU BW could cooperate with institution which was able to give consultation about certain effort and (5) KSU BW held a skill training whose trainer was its own member. Besides, KSU BW could cooperate with external parties that only asked to provide trainer and for place and equipment it could be overcome by KSU BW itself.



Kata Pengantar

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya panjatkan segala puji syukur ke Hadirat-Nya, atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang saya beri judul **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang Melalui Koperasi Setia Budi Wanita**. Penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut karena penulis ingin memberikan gambaran lain mengenai upaya pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya sebuah upaya pemberdayaan masyarakat tidak selalu harus lahir dari bantuan pemerintah seperti halnya beberapa program pemberdayaan yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Masyarakat secara mandiri pun mampu bahu-membahu menyelenggarakan pemberdayaan. Masyarakat mampu menghimpun kekuatan dan mengoptimalkan potensinya dengan cara membentuk sebuah kelompok. Salah satu contoh dari upaya pemberdayaan yang lahir dari kemandirian masyarakat adalah Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW). Berbagai bentuk upaya pemberdayaan khususnya bidang ekonomi telah dilakukan oleh KSU SBW selama bertahun-tahun. Upaya tersebut pada kenyataannya tidak selalu berjalan lancar. Beberapa hal yang menjadi penghambat telah dan yang masih berlangsung dihadapi oleh KSU SBW. Sehingga tidak selalu upaya yang dilakukan oleh KSU SBW berjalan optimal. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, konsistensi untuk melayani masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi oleh KSU SBW patut untuk diberikan suatu penghargaan.

Di dalam penulisan ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan Laporan ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bpk. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si. selaku Ketua Jurusan Program S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bpk. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS dan Bpk. Drs. Imam Hardjanto, MAP selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis.
4. Seluruh pihak dari Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita yaitu Ibu Dra.

Sri Untari Bisowarno, Ketua I : Ibu Rieni S.Sofyan, Ketua II : Ibu Herni Yuli Lestari, Sekretaris I : Ibu Anan Maria Indung, Pengawas : Ibu Sri Wahyuni, Koordinator Usaha : Ibu Pudji Lestari, Koordinator Warung Serba Ada (Waserda) : Bapak Didik, Koordinator Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) dan Simpan Pinjam Non Tanggung Renteng (NTR) : Mas Indra dan Mbak Atiek, Sekretariat : Ibu Jujun Harjuni, Pembina Penyuluh Lapang (PPL) : Ibu Triworo, Ibu Sri Winarsih Santoso, Ibu Siti Nurhasanah, Ibu Yeni Setyowati, Ibu Titin, Ibu Erfat, Ibu Satrio, anggota KSU SBW serta pengelola dan anggota KSU SBW lain yang tidak disebutkan satu persatu dalam karya tulis ini atas segala bantuannya.

5. Seluruh pihak dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, seluruh pihak dari Badan Pusat Statistik Kota Malang dan seluruh pihak dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang yang bersedia untuk memberikan beberapa arsip data terkait dalam pengerjaan karya tulis ini
6. Kedua Orang Tua tersayang (Bapak Sudarto dan Ibu Umi Hanik) yang senantiasa memberikan motivasi dan doa di setiap saat
7. Kakakku (Nuning Fitriana) yang senantiasa mengingatkan aku untuk segera menyelesaikan skripsi secepatnya.
8. Keluarga Besar *Research Study Club* (RSC) yang telah mendukung dalam menyelesaikan karya tulis ini dan telah memberikan banyak ilmu yang berharga bagi saya.
9. Kekasihku (Mustika Palupi) yang tidak bosan mengingatkan aku untuk segera menyelesaikan skripsi secepatnya.
10. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendukung dalam menyelesaikan karya tulis ini dan telah memberikan banyak ilmu yang berharga bagi saya.
11. Serta semua pihak yang membantu menyelesaikan karya tulis ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi semuanya. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu dalam karya tulis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi baiknya laporan ini.

Akhirnya saya berharap dengan selesainya proposal ini, nantinya akan memberikan manfaat dan masukan bagi semua pihak.

Malang, 20 Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Tanda Pengesahan Skripsi | ii |
| Tanda Persetujuan Skripsi..... | iii |
| Pernyataan Orisinalitas Skripsi | iv |
| Ringkasan..... | v |
| Summary | vii |
| Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Tabel | xv |
| Daftar Gambar | xvi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Administrasi Publik | 12 |
| 1. Definisi Administrasi | 12 |
| 2. Definisi Publik..... | 12 |
| 3. Definisi Administrasi Publik..... | 13 |
| B. Konsep Administrasi Pembangunan | 14 |
| C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat..... | 15 |
| 1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat..... | 15 |
| 2. Tahap-tahap dan Proses Pemberdayaan Masyarakat | 16 |
| 3. Strategi Pemberdayaan..... | 18 |
| 4. Aktor-aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat..... | 20 |
| 5. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 21 |
| 6. Indikator Keberdayaan | 22 |
| 7. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 24 |
| D. Koperasi | 25 |
| 1. Pengertian Koperasi | 25 |
| 2. Prinsip Koperasi di Indonesia | 26 |
| 3. Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia..... | 26 |
| 4. Bentuk dan Jenis Koperasi | 27 |
| 5. Keanggotaan Koperasi | 28 |
| 6. Struktur Organisasi Koperasi | 30 |
| a. Dimensi Dalam (<i>Intern</i>) Organisasi Koperasi | 30 |
| b. Dimensi Luar (<i>Extern</i>) Organisasi Koperasi..... | 34 |
| 7. Jaringan Kerjasama Koperasi | 34 |
| a. Pengertian Jaringan Koperasi..... | 34 |
| b. Macam-macam Jaringan Koperasi..... | 34 |
| c. Manfaat Jaringan Koperasi | 34 |
| 8. Bentuk Pemberdayaan dalam Koperasi..... | 35 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Fokus Penelitian | 37 |
| C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian | 38 |
| D. Jenis Sumber Data..... | 39 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Desain Analisis Data..... | 41 |
| G. Keabsahan Data | 42 |

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA MALANG DAN KONDISI PERKOPERASIAN DI KOTA MALANG

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kota Malang..... | 45 |
| 1. Karakteristik Geografis Kota Malang | 45 |
| 2. Kondisi Iklim..... | 45 |
| 3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Malang..... | 46 |
| 4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan | 46 |
| 5. Kondisi Ketenagakerjaan | 48 |
| 6. Kondisi Ekonomi..... | 50 |
| B. Gambaran Umum Koperasi-koperasi di Kota Malang | 51 |
| C. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 52 |
| 1. Profil Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita..... | 52 |
| 2. Keanggotaan..... | 54 |
| 3. Sisa Hasil Usaha (SHU) | 55 |
| 4. Struktur Organisasi..... | 56 |
| 5. Nama, Jabatan dan Tugas dalam Organisasi | 56 |

BAB V : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MALANG MELALUI KOPERASI SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA (KSU SBW)

| | |
|--|----|
| A. Upaya-upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang Melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 62 |
| 1. Simpanan dan Pinjaman | 62 |
| 2. Pelatihan-pelatihan | 73 |
| 3. Pemasaran Produk yang Dihasilkan Anggota | 82 |
| 4. Konsultasi Usaha..... | 85 |
| 5. Akses Pekerjaan dengan Upah yang Layak | 85 |
| B. Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 86 |
| 1. Pemerintah..... | 86 |
| 2. Swasta..... | 87 |
| 3. Masyarakat | 89 |
| C. Instrumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 90 |
| 1. Biaya..... | 90 |



| | |
|---|----|
| 2. Aturan..... | 92 |
| D. Kelompok Sasaran (<i>Target Group</i>) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 93 |
| 1. Berdasarkan Gender | 93 |
| 2. Berdasarkan Cakupan Wilayah | 94 |
| E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita..... | 94 |
| 1. Internal | 94 |
| 2. Eksternal..... | 97 |

BAB VI : ANALISA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MALANG MELALUI KOPERASI SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA (KSU SBW)

| | |
|---|-----|
| A. Tahap-tahap Pemberdayaan Ekonomi Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita..... | 99 |
| 1. Tahap Penyadaran | 99 |
| 2. Tahap Pengkapasitasan | 100 |
| 3. Tahap Pendayaan..... | 103 |
| B. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang Melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita | 106 |
| C. Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita | 110 |
| 1. Pemerintah..... | 111 |
| 2. Swasta..... | 111 |
| 3. Masyarakat | 112 |
| D. Instrumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)..... | 113 |
| 1. Biaya..... | 113 |
| 2. Aturan..... | 114 |
| E. Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita..... | 115 |
| 1. Berdasarkan Gender | 115 |
| 2. Berdasarkan Cakupan Wilayah | 115 |
| F. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita..... | 116 |
| 1. Internal | 116 |
| 2. Eksternal..... | 121 |
| G. Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi melalui Mikro Kredit | 122 |



BAB VII : PENUTUP

| | |
|----------------------|------|
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran | 130 |
| Daftar Pustaka | xvii |

LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE PENULIS



Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel. 1 Distribusi Pendapatan | 2 |
| Tabel. 2 Indeks Gini Indonesia Menurut Daerah | 2 |
| Tabel. 3 Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat | 20 |
| Tabel. 4 Indikator Keberdayaan | 22 |
| Tabel. 5 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2007 | 47 |
| Tabel. 6 Presentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007 | 47 |
| Tabel. 7 Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2007 | 48 |
| Tabel. 8 Keadaan Bursa Tenaga Kerja Tahun 2007 | 49 |
| Tabel. 9 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Bursa Kerja) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2007 | 49 |
| Tabel.10 Presentase Jumlah Penduduk menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita/Bulan Tahun 2007 | 50 |
| Tabel.11 Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan Tahun 2006 (Desember)..... | 50 |
| Tabel.12 Data Koperasi di Kota Malang yang Dinaungi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (2004-2008)..... | 51 |
| Tabel.13 Data Koperasi di Kota Malang yang Dinaungi oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur Tahun 2008..... | 51 |
| Tabel.14 Pertumbuhan Jumlah Anggota Tahun 2005-2008 | 54 |
| Tabel.15 Pertumbuhan Jumlah Kelompok Tahun 2005-2008 | 54 |
| Tabel.16 Dana Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Mulai Tahun 2005-2008..... | 55 |
| Tabel.17 Nama, Jabatan dan Tugas Pengurus..... | 56 |
| Tabel.18 Nama, Jabatan dan Tugas Pengawas..... | 58 |
| Tabel.19 Nama, Jabatan dan Tugas Karyawan | 58 |
| Tabel.20 Jumlah Simpanan Wajib Mulai Tahun 2005-2006 | 64 |
| Tabel.21 Rencana dan Realisasi Pinjaman Anggota | 90 |
| Tabel.22 Anggaran untuk Beberapa Jenis Pelatihan..... | 91 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar. 1 Grafik Angka Kemiskinan di Indonesia..... | 1 |
| Gambar. 2 Struktur Organisasi Intern Koperasi..... | 31 |
| Gambar. 3 Analisis Data model Interaktif | 42 |
| Gambar. 4 Bagan Struktur Organisasi | 56 |



Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Djamhari, Choirul. 1985. *Kearah Pemahaman Bangun Perusahaan Koperasi* (Antologi Esei): Badan Litbang
- Edilius dan Sudarsono. 1993. *Koperasi dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Keban, Yaremis T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : Gavamedia
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California : Brooks/Cole
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta
- Siagian, P. Sondang, 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung; Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media
- Syafi'ie, Kencana Inu, dkk. 1999, *Etika Dasar*, Yogyakarta : Kanisius

Jurnal

- Hariadi, Pramono dkk. 2009. "Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang Hal. 61 – 70*
- Harsosumarto, Sri Lestari. 2007. "Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan". *Infokop Volume 15 Nomor 1 (Juli 2007)*
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2004. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi". *Naskah Nomor. 20, Juni-Juli 2000*
- McVay, Mary. *Measuring BDS Performance a summary framework. Small Enterprise Development Vol 10 No.2 : hal. 17 - 29. June 1999*
- Subandi, Slamet. 2007. "Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM". *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2007.*

Naskah Penelitian Akademis

- Asmarani, Dyah Lestari. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan (Kajian terhadap Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kota Batu)*. Malang : PPs Unibraw
- Hall, Nicola. 2004. *Koperasi Simpan Pinjam Di Kota dan Kabupaten Malang*. Program ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang
- Lestari, Dewi Citra. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Studi di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)*. Program Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang
- Noegroho, Yoenanto Sinung dan Soelistianingsih, Lana. 2007. *Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota Di Propinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok
- Nur'aini, Lailiyah. 2005. *Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan melalui Program P4K*. Malang
- Pranarka, A.M.W. dan Moeljarto, Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (empowerment) cit Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan implementasi*. CSIS: Jakarta.

Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W .1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS; Jakarta

Media Online

Kartasasmita, Ginandjar. 2007. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*. Diakses dari www.ginandjar.com pada tanggal 12 Mei 2009

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*. Diakses dari www.ginandjar.com pada tanggal 12 Mei 2009

Kartasasmita, Ginandjar. 2003. *Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan*. Diakses dari www.ginandjar.com pada tanggal 14 Januari 2010

Radyati, Maria R. Nindita. 2006. *Governance pada Koperasi Simpan-Pinjam: Suatu Tantangan*. Diakses dari www.cect-usakti.org pada tanggal 6 Mei 2009

Solihin, Dadang. 2009. *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Diakses dari www.docstoc.com pada tanggal 6 November 2009

Tim Kapanlagi. 2009. *42.267, Jumlah Koperasi di Indonesia Yang Berkualitas*. Diakses dari www.kapanlagi.com pada tanggal 2 Juli 2009

Tim Puskowanjati. 2009. Diakses dari www.puskowanjati.com pada tanggal 12 April 2009

Dokumen lainnya

Dokumen Bagian Sosial, Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, 2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus membaik setelah krisis moneter sempat memporak-porandakan perekonomian nasional. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke tingkat pertumbuhan positif 0,79 persen (tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mencapai -13,1 persen). Pada periode tahun 1999-2003 rataan pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 3,7 persen. Kemudian pada periode 2004-2006 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rataan mencapai 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik ternyata membawa dampak positif juga terhadap masalah kemiskinan. Angka kemiskinan pasca krisis moneter cenderung mengalami penurunan.

Gambar 1. Grafik Angka Kemiskinan di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Sebuah hal yang ironis bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tidak selalu membawa dampak positif. Hal tersebut sebenarnya sudah terungkap sejak dahulu berdasarkan studi Ahuja dalam Hariadi, dkk (2009: hal 4) mengenai negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama periode 1970-an dan 1980-an, pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi (*Asian*

miracle), pada awal dekade 1990-an ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali. Pada kenyataannya data dari BPS juga telah menunjukkan kondisi masyarakat Indonesia dengan perekonomian rendah, semakin lama tingkat ekonominya semakin menurun. Sedangkan pada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas, semakin lama tingkat ekonominya semakin meningkat. Kondisi tersebut ditunjukkan dari data BPS mulai tahun 1999 sampai tahun 2006 bahwa terjadi kecenderungan distribusi pendapatan yang semakin timpang.

Tabel 1. Distribusi Pendapatan

| Income Distribution | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40 % of population with lowest income | 21,66 | 20,92 | 20,57 | 20,80 | 18,81 | 19,75 |
| 40 % of population with moderate income | 37,77 | 36,89 | 37,10 | 37,13 | 36,4 | 38,1 |
| 20 % of population with highest income | 40,57 | 42,19 | 42,33 | 42,07 | 44,78 | 42,15 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Indikator yang berbeda yaitu menggunakan indeks gini ternyata dapat diidentifikasi ketimpangan yang tinggi justru bukan pada daerah pedesaan akan tetapi terjadi pada daerah perkotaan. Fenomena tersebut ditunjukkan dari data BPS mengenai Indeks Gini menurut Daerah berikut ini:

**Tabel 2
Indek Gini Indonesia Menurut Daerah**

| Tahun | Gini Ratio | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 1996 | 0,362 | 0,274 | 0,356 |
| 1999 | 0,326 | 0,244 | 0,311 |
| 2002 | 0,330 | 0,290 | 0,329 |
| 2005 | 0,338 | 0,264 | 0,343 |
| 2006 | 0,350 | 0,276 | 0,357 |
| 2007 | 0,374 | 0,302 | 0,376 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Ketimpangan pendapatan yang cenderung tinggi semakin mengancam keberlangsungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat akan semakin susah memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan papan, pendidikan dan pengembangan usaha. Apalagi di beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah sangat memberatkan masyarakat miskin. Pada tahun 2005 terjadi kenaikan BBM berkisar rata-rata lebih dari 100 %. Selain itu juga terjadi

inflasi yang cukup tinggi hingga mencapai 17,03% yang dikarenakan meningkatnya harga beras yang cukup besar pada bulan Januari 2006 (Dokumen Bagian Sosial, Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dalam Lestari 2008. hal: 3). Permasalahan yang semakin kompleks tersebut perlu mendapatkan penanganan yang efektif.

Upaya-upaya untuk menanggulangi distribusi pendapatan terutama untuk kelompok masyarakat miskin telah dan masih dilakukan pemerintah salah satunya yaitu melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT yang telah diselenggarakan beberapa tahun ini hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek karena sifatnya hanya pemberian uang tunai. Upaya yang dilakukan pemerintah harus lebih bersifat mengarahkan dan memfasilitasi masyarakat miskin agar lebih produktif dan memiliki daya saing dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ataupun masyarakat yang kaya. Berdasarkan pernyataan itu maka pemberdayaan masyarakat menjadi penting sebagai strategi dalam mewujudkan hal tersebut, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dalam bentuk yang lebih kompleks, tidak hanya berupa bantuan dana. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah perkotaan, sebenarnya pemerintah telah melakukannya sejak dahulu sekitar tahun 1998. Program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan bantuan dana akan tetapi diselenggarakan juga penguatan kelembagaan masyarakat. Masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan pengalokasian dana, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Hal tersebut tidak lain untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam hal ekonomi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Beberapa hal yang dapat diwujudkan misalnya mulai dari perbaikan infrastruktur, simpan pinjam dan pelatihan usaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut masuk dalam beberapa program yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dan dilakukukan oleh berbagai pihak tidak hanya pemerintah saja. Hal tersebut tidak lain hanya untuk mempercepat upaya penanggulangan distribusi pendapatan yang timpang terutama untuk masyarakat miskin. Jika dilihat kembali tabel 2 mengenai indeks gini di perkotaan pada tahun 1998 ke atas, ketimpangan distribusi pendapatan masih saja mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan juga oleh pihak lain selain pemerintah. Pemerintah tidak mungkin dapat mengatasi permasalahan distribusi pendapatan sendirian. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Meskipun upaya tersebut tidak mudah dilakukan dan memerlukan proses yang panjang. Tetapi hal tersebut bisa dikatakan sebuah upaya bersama baik pemerintah dan masyarakat yang mencerminkan kepedulian dan kemandirian untuk menangani suatu permasalahan bersama. Masyarakat miskin sebagai korban timpangnya distribusi pendapatan sebenarnya mempunyai kemampuan untuk berdaya tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Kemampuan mereka untuk lebih berdaya dapat muncul ketika mereka berkelompok. Kelompok tersebut merupakan wujud dari keswadayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Koperasi merupakan kelompok yang tumbuh dari masyarakat yang mempunyai potensi dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di negara-negara maju sekalipun, peran koperasi masih diperhitungkan. Pada tataran global, koperasi dikenal sebagai dengan menyitir konsep ekonomi Anthony Giddens *the third way* atas ideologi pembangunan ekonomi. Amerika yang sangat kapitalis sekalipun dalam menjalankan ekonominya ternyata menerapkan konsep dan prinsip-prinsip koperasi sebagai organisasi ekonomi yang digerakkan atas keswadayaan anggota. Keswadayaan dalam usaha dengan partisipasi anggota ditambah dengan manajemen yang berbasis profesionalisme menjadi kata kunci berkoperasi secara baik, sehingga mampu melakukan ekspansi pasar antar negara dan diakui menjadi raksasa ekonomi dunia (www.ginandjar.com). Beberapa Koperasi di Indonesia ternyata juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga tahun 2008 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 149.793 unit. Dari

keseluruhan tersebut yang dapat dikatakan koperasi aktif sebanyak 104.999 unit. Namun dari sejumlah koperasi aktif tersebut terdapat 42.267 koperasi yang berhak disebut berkualitas. Jumlah koperasi yang berkualitas tidak sampai 50% dari jumlah koperasi yang aktif. Data tersebut merupakan hasil susunan peringkat koperasi yang dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM hingga akhir 2008. Tri Basuki menambahkan, jumlah koperasi berkualitas akan terus ditargetkan meningkat di tahun 2009, karena upaya tersebut bertujuan untuk menetapkan peringkat koperasi, yang dapat digunakan sebagai pendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat (www.kapanlagi.com). Meskipun pada tahun 2008 jumlah koperasi yang berkualitas tidak mencapai 50% dari total jumlah koperasi yang aktif, akan tetapi jika dibandingkan pada tahun 2007, pada tahun 2008 jumlah koperasi berkualitas bertambah sebanyak 886 unit.

Jika dikaitkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai sekarang ini kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan ekonomi rakyat belum pernah mencapai hasil yang optimal. Akan tetapi masih ada beberapa koperasi yang masih giat dalam melakukan upaya tersebut. Di Propinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang pemberdayaan ekonomi telah dan masih terus dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW). Koperasi Serba Usaha SBW ini sebenarnya berawal dari perkumpulan arisan ibu-ibu yang kemudian digagas Mursia Zaafril Ilyas menjadi perkumpulan simpan pinjam, dan berlanjut dari Pra Koperasi menjadi Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" tahun 1977, dengan akta notaris Nomor: 3992/BH/II/77. Koperasi tersebut telah berpuluh-puluh tahun menyalurkan modal dan beberapa hal lain sebagai upaya pemberdayaan. Sesuai dengan aturan koperasi bahwa permodalan bersumber pada simpanan anggota. Akan tetapi selain itu permodalan juga bisa didukung dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan yang lain. Dalam koperasi tersebut juga diselenggarakan pelatihan teknis usaha terutama dalam hal keuangan dan juga terdapat konsultasi usaha sebagai upaya membantu memecahkan permasalahan anggotanya dalam menjalankan usaha. Konsultasi dan pelatihan tersebut menjadi menarik karena keduanya berjalan dengan suasana

kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Selain itu koperasi tersebut juga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemberdayaan.

Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), merupakan salah satu warna koperasi yang memperkuat gerakan koperasi di Indonesia dalam rangka melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Puskowanjati adalah sekunder untuk 45 koperasi simpan pinjam atau koperasi primer di daerah Jawa Timur, Indonesia. Jumlah anggotanya Puskowanjati sudah mencapai 40 000 orang. Semua koperasi simpan pinjam yang dibina oleh Puskowanjati memakai STR atau Sistem Tanggung Renteng sebagai dasarnya pinjaman. Termasuk koperasi SBW juga memakai sistem tanggung renteng sebagai dasar pinjaman (Hall, 2004. hal: 50). Prinsip dasar tanggung renteng adalah jika ada salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar angsuran pinjaman pada bulan yang bersangkutan, maka seluruh anggota kelompok akan menanggung kewajibannya dengan melunasi angsurannya pada bulan tersebut. Oleh sebab itu sistem ini disebut ‘tanggung-renteng’, jadi merupakan penerapan dari sistem gotong-royong, saling tolong-menolong. Jika bulan depan ia sudah mempunyai cukup uang, maka ia harus mengembalikan angsurannya bulan lalu kepada teman-temannya. (www.cect-usakti.org). Didasari sistem tanggung renteng, koperasi SBW sempat berkembang maju dalam segi organisasi maupun pengelolaan beberapa unit usaha. Bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai Koperasi Non KUD terbaik kedua tingkat nasional pada 1979. Akan tetapi, memasuki tahun 1982-1986, Koperasi ini lumpuh total. Dari jumlah anggota yang sudah mencapai lebih 5.000 orang, tersisa 360 orang. Alih-alih, Menteri Koperasi Bustanil Arifin pun menyalurkan dana pinjaman melalui Bank Indonesia sebesar Rp 625.000.000 guna mengembalikan deposito-deposito anggota dan masyarakat (Rahman, 2009. hal: 3). Meskipun pada tahun 1982 sampai dengan 1986 koperasi ini sempat lumpuh total dikarenakan *miss management*. Karena keampuhan dan kehandalan sistem kelompok dan tanggung renteng, maka anggota lambat laun sampai sekarang (tahun 2009) sudah kembali lagi dan hampir mencapai 5.000 orang (www.puskowanjati.com).

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) sebenarnya memiliki peluang yang sangat bagus dalam hal pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Pertama, penerapan sistem tanggung renteng ternyata memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali koperasi dari keterpurukan akibat *miss management*. Selain manfaatnya untuk memberikan kemudahan bagi anggota melakukan pinjaman uang. Dan kedua, jaringan kerjasama koperasi khususnya koperasi di Jawa Timur tidak hanya dari pihak dalam negeri tetapi dengan pihak luar negeri juga. Puskowanjati sebagai koperasi sekunder telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak asing misal USAID, CCA, CRS, FES, *Ford Foundation* dan *Asia Foundation*. Kerjasama hingga lintas negara memberikan peluang yang besar untuk koperasi bisa terus berkembang lebih baik lagi. Serta yang ketiga, KSU SBW telah menjadi badan usaha sejak tahun 1997. Hal tersebut adalah jangka waktu yang lama untuk belajar dari pengalaman kesuksesan atau hambatan-hambatan yang pernah terjadi di dalam ataupun di luar KSU SBW sebagai evaluasi yang bermanfaat. Akan tetapi peluang itu tidak akan bernilai jika koperasi tidak dapat mempertahankan prestasi dan melakukan inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dijalankan. Bukan tidak mungkin jika nantinya koperasi tersebut menghadapi permasalahan yang jauh lebih besar daripada permasalahan *miss manangement* jika tidak memperhatikan kedua hal tersebut. Upaya mempertahankan prestasi dan mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tantangan bagi koperasi. Karena fungsi koperasi tidak hanya menyejahterakan anggota dalam jangka pendek akan tetapi harus bisa untuk jangka panjang juga. Artinya kemandirian dalam pemberdayaan tidak berhenti ketika telah muncul sebuah wadah atau perkumpulan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan. Lebih dari itu kemandirian masyarakat juga bisa dilihat dari hasil sebuah wadah masyarakat dalam mewujudkan kemandirian anggotanya dari tahun ke tahun.

Pinjaman yang dilakukan anggota KSU SBW digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sejumlah 80% pinjaman dari Koperasi SBW digunakan untuk pendidikan anak. Selain untuk pendidikan anak, pinjaman yang dilakukan oleh anggota digunakan untuk tambah modal usaha. Pinjaman ini sangat penting untuk anggota, dan merupakan perbedaan di antara keberhasilan kecil dan keberhasilan besar. Pinjaman yang lain termasuk, pinjaman untuk barang-barang konsumtif, misalnya mengontrakkan rumah, perlengkapan sekolah, renovasi rumah atau

membeli alat rumah tangga dan lain-lain (Hall, 2004. hal: 64). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman justru lebih banyak digunakan untuk membiayai biaya pendidikan anak anggota. Sedangkan pemberdayaan ekonomi untuk anggota berupa pinjaman untuk modal usaha justru masih kurang diminati. Hal yang demikian akan berpengaruh pada kurang optimalnya fungsi koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terutama anggota meskipun masih banyak bentuk program pemberdayaan lain dalam koperasi tersebut yang telah diselenggarakan. Upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan hanya dirasakan oleh sebagian kecil anggota bahkan bisa dikatakan sebagian kecil dari masyarakat Kota Malang.

Melihat fenomena yang terjadi di dalam Koperasi SBW berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang masih kurang optimal maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)?
3. Apa instrumen yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)?
4. Siapa yang menjadi kelompok sasaran (*target group*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)?
5. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penerapan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (SBW)?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari program penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)
2. Untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)
3. Untuk mendeskripsikan instrumen yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)
4. Untuk mengidentifikasi kelompok sasaran (*target group*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)
5. Untuk mengidentifikasikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penerapan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara teoritis maupun praktis terhadap pemberdayaan masyarakat melalui media dan sistem yang sesuai dengan karakter target yang akan diberdayakan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan dunia administrasi publik, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat.
 - b) Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang penerapan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi .

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat dan mengoptimalkan fungsi koperasi.
- b) Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi dan peminat administrasi publik.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan dan praktisi tentang aplikasi pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dan mengapa koperasi sebagai media dalam melaksanakan pemberdayaan tersebut. Selain itu pada bab ini juga akan berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu juga diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Ada beberapa teori yang digunakan yaitu Konsep Administrasi Publik, Konsep Administrasi Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Koperasi

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, desain analisis data dan keabsahan data.

BAB IV Gambaran Umum Kota Malang dan Kondisi Perkoperasian di Kota Malang

Bab ini menggambarkan kondisi Kota Malang, koperasi-koperasi di Kota Malang dan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita. Dalam bab ini juga akan sedikit terlihat perbandingan antara KSU SBW dengan koperasi lain di Kota Malang.

BAB V Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data mengenai upaya-upaya, aktor yang terlibat, biaya dan aturan, kelompok sasaran (*target group*), faktor pendukung dan penghambat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

BAB VI Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Bab ini akan berisi analisis data yang diperoleh selama penelitian yang dan juga alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

BAB VII Penutup

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

Sebelum dijelaskan definisi administrasi publik, perlu juga untuk dijelaskan terlebih dahulu definisi “administrasi” dan “publik”.

1. Definisi Administrasi

Menurut S. P. Siagian (2004. hal: 2) bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Pasolong (2007. Hal: 3) mendefinisikan administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

2. Definisi Publik

Menurut Syafi'ie dkk (1999. hal: 18) bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. Sedangkan Frederickson dalam Pasolong (2007. hal: 6) menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif yaitu (1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”, (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

3. Definisi Administrasi Publik

Konsep administrasi administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu. Hanya saja para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administasi negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul *Public Administration* diganti menjadi Administrasi Negara (Pasolong. 2007. hal: 7).

Chandler dan Plano dalam Keban (2004. hal: 3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Sedangkan Pasolong (2007. hal: 8) mendefisikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi publik. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hubungan yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut merupakan warga negara yang berhak turut serta/terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemenuhan ragam kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan tujuan diselenggarakannya administrasi publik. Pemenuhan ragam kebutuhan publik merupakan upaya yang terencana karena mengutamakan efektifitas dan efisiensi.

B. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertian umum, seperti memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengalokasian sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (www.ginandjar.com).

Menurut Siagian (2003, hal: 5-6) bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan kehidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Dari definisi tersebut Siagian mengemukakan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsinya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (*opinion leaders*) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial. Bahkan “rakyat jelata” pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai “penonton”, semua harus berperan sebagai “pemain”.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*) (Projono,dkk, 1996: hal 269).

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless* (Pranarka,dkk. 1996.hal: 45-70).

Jika dikaji secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan/kekuatan dan atau proses pemberian daya/kemampuan/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007. hal: 75-76) menjelaskan pengertian keberdayaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat sebagai berikut :

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sebaiknya pemberdayaan jangan sampai menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaiknya harus mengantarkan masyarakat pada proses kemandirian. Sulistyani (2004. hal: 9) menyebutkan terdapat dua poin khusus yang diperoleh dari makna pemberdayaan yaitu :

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri
2. Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu untuk mandiri.

2. Tahap-tahap dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Prijono dan Pranarka dalam Asmarani (2001. hal: 45) mengungkapkan bahwa :

....paling tidak terdapat tiga tahapan dalam upaya pemberdayaan, yaitu tahap inisial, dimana proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. Kemudian tahap partisipatoris, dimana proses pemberdayaan mulai bergeser yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat. Dan terakhir tahap emasipatif, dimana pemberdayaan sudah

dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung pemerintah bersama masyarakat.

Di sisi lain Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007. hal: 2) menjelaskan pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Hal-hal yang dapat digunakan dalam tahapan ini adalah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun *demand*) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan dan *enabling*. Pengkapasitasan ini terdiri dari tiga jenis yaitu : manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar, lokakarya dan sejenisnya. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi, dan pengkapasitasan sistem nilai dapat dilakukan dengan membuat “aturan main” yang dipatuhi oleh masyarakat disana. Dan tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*. Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas dan peluang. Pemberian ini diberikan sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Proses pemberdayaan melibatkan beberapa komponen. Tetapi yang paling berperan dan menjadi kuncinya adalah masyarakat itu sendiri. Instrumen lain yang berada di luar individu hanyalah sebagai fasilitator, motivator terjadinya proses pemberdayaan. Prijono dan Pranarka dalam Nur'aini (2005. hal: 51) menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primernya, proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan pada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekundernya melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

3. Strategi Pemberdayaan

Parson et. al.(1994: hal 112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task center approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Berbeda dengan Parson yang melihat strategi pemberdayaan dari sisi luas cakupan target, Solihin (2009: hal 42-45) mengklasifikasikan strategi pemberdayaan dalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

- Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat;
- Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan;
- Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal;
- Keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut;
- Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial. Fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal kepada pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar;

b. Perluasan Kesempatan (*Promoting Opportunity*)

- Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marjinal;
- Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerahdaerah tertinggal; pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan dampak kepada perkembangan ekonomi wilayah;
- Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern.

c. Pengembangan Perlindungan Sosial (*Enhancing Social Security*)

- Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil;
- Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi. Jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak.

4. Aktor-aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terlibat peran dari aktor-aktor tersebut. Sulistiyani (2004. hal: 97) merancang peran ketiga aktor tersebut dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

| Aktor | Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat | Bentuk Output Peran |
|------------|--|---|
| Pemerintah | Formulasi Dan Penetapan Kebijakan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Mediasi | Bebagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa |
| Swasta | Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi | Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan pemeliharaan |
| Masyarakat | Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi | Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsisosial control, menjadi objek |

Sumber : Sulistiyani (2004)

Selain yang telah dikemukakan oleh Sulistiyani, Solihin (2009 : hal 42-45) lebih menjabarkan peran dari ketiga aktor pemberdayaan sebagai berikut :

a. Peranan Pemerintahan Daerah (Pemerintah)

- Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Membangun partisipasi masyarakat dengan memberikan kepercayaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
- Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.

- Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
- Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

b. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Masyarakat)

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berperan sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi konsultan pemerintah, dan dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program pemerintah.
- LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah.
- LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

c. Peranan Koperasi (Swasta)

- Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
- Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotong-royongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia.
- Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok.
- Kelompok dan anggota-anggotanya harus benar-benar dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama.

5. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang

dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul (1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. (Hutomo, 2004:hal 3).

6. Indikator Keberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2005: hal 63-65). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu : ‘kekuasaan di dalam’(power within), ‘kekuasaan untuk’(power to), ‘kekuasaan atas’ (power over) dan ‘kekuasaan dengan’(power with). Tabel berikut merupakan rangkuman dari indikator pemberdayaan.

Tabel 4. Indikator Keberdayaan

| Jenis Hubungan Kekuasaan | Kemampuan Ekonomi | Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan | Kemampuan Kultural dan Politis |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Kekuasaan di dalam: Meningkatkan | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi positif terhadap kontribusi | <ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan diri dan kebahagiaan | <ul style="list-style-type: none"> <i>Assertiveness</i> dan otonomi |

| Jenis Hubungan Kekuasaan | Kemampuan Ekonomi | Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan | Kemampuan Kultural dan Politis |
|--|--|---|---|
| kesadaran dan keinginan untuk berubah | ekonomi dirinya <ul style="list-style-type: none"> Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain Keinginan untuk mengontrol jumlah anak | <ul style="list-style-type: none"> Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hokum dan politik |
| Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses | <ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap pelayanan keuangan mikro Akses terhadap pendapatan Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga Akses terhadap pasar Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak | <ul style="list-style-type: none"> Ketrampilan, termasuk kemelekan huruf Status kesehatan dan gizi Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik | Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah Pengetahuan mengenai proses hokum, politik dan kebudayaan Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan |
| Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut | <ul style="list-style-type: none"> Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya Kontrol atas pendapatan aktifitas keluarga yang lainnya Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga | <ul style="list-style-type: none"> Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keluarga berencana. Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat. Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik. |

| Jenis Hubungan Kekuasaan | Kemampuan Ekonomi | Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan | Kemampuan Kultural dan Politis |
|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. | | |
| <p>Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern • Mampu memberi gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro | <ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat cultural, politis, hukum, pada tingkat masyarakat dan makro. |

Sumber : Suharto (2005)

7. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan indikator keberdayaan yang telah disebutkan di atas terutama dalam bidang ekonomi, menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Memberikan motivasi atau konsultasi untuk meningkatkan kesadaran atau keinginan masyarakat untuk berkontribusi dan berkeinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara baik di tingkat rumah tangga maupun di masyarakat.
- Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Selain itu juga mempermudah akses

untuk mendapatkan aset-aset produksi dan informasi pasar melalui layanan yang tersedia dengan prosedur yang mudah.

- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengatur dan memanfaatkan aset-aset produksi, pinjaman ataupun pendapatan yang telah dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. Peran dalam hal ini bisa diartikan dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal bekerjasama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

E. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Berikut ini terdapat beberapa pengertian koperasi yang dikutip dari Subandi (2007: hal 5) :

Dalam ILO *recommendation* nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi.

Menurut *Internasional Cooperative Allience* (ICA), Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis,

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1), koperasi adalah Badan usaha yang beranggotaan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat I a.) untuk mencapai kesejahteraan (pasal 3) memodali bersama (pasal 4.1) dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b) orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bersangkutan (pasal 17 ayat 1)

Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono, salah seorang pakar koperasi yang pemikiran-pemikirannya perlu dipahami mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

2. Prinsip Koperasi di Indonesia

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.25 tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian

3. Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan pendirian koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, UU no. 25/1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu, diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU no. 25/1992 itu, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial mereka.
- b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Bentuk dan Jenis Koperasi

Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2 :

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
- b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi

Tentang jenis koperasi terdapat dalam pasal 17 bagian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967,

Berdasarkan lapangan usaha yang dimiliki

- a. Koperasi Konsumsi, yang berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya
- b. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya.
- c. Koperasi Produksi, yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya.
- d. Koperasi Serba Usaha, yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya

Berdasarkan golongan masyarakat yang berkumpul mendirikanannya

- a. Koperasi Pegawai Negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.
- b. Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yang merupakan

wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaannya anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.

- c. Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Veteran, Koperasi Kaum Pensiunan dan sebagainya yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongannya masing-masing

5. Keanggotaan koperasi

Berdasarkan pengertian koperasi yang dikemukakan oleh ICA di atas maka : *"Anggota koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis"*.

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi pada organisasinya. Semua aturan yang diletakkan sebagai kewajiban para anggota koperasi dapat bersumber pada :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 12/1967
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- c. Berbagai keputusan rapat anggota yang meliputi hal-hal antara lain :
 - 1) Mengamalkan landasan-landasan, asas, dan sendi dasar koperasi, undang-undang, peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta keputusan-keputusan rapat anggota.
 - 2) Menghadiri dan aktif berperan dalam Rapat Anggota
 - 3) Melunasi simpanan-simpanan yang ditentukan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain
 - 4) Berperan aktif dalam proses usaha yang diselenggarakan koperasi mulai dari membeli, menjual dan lain-lain pada koperasi
 - 5) Mengikuti pendidikan yang diadakan, tentang perkoperasian
 - 6) Kewajiban lainnya yang berupa tanggungan, sebagai berikut :
 - a) Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita, baik yang terjadi ketika penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran koperasi
 - b) Bila tanggungan anggota bersifat terbatas, tanggungan anggota hanya sejumlah uang yang ditetapkan dan tercantum dalam AD koperasi, sedangkan bila ditetapkan tanggungan bersifat tak terbatas berarti tanggungan meliputi juga harga benda milik anggota jika ternyata koperasi tidak mampu menutupi kerugian saat pembubaran.
 - c) Anggota yang telah keluar masih harus menanggung kerugian saat koperasi dibubarkan, dengan syarat kerugian itu timbul saat yang bersangkutan masih berstatus anggota dan saat keluarnya belum lewat 12 bulan.

- d) Bila terdapat anggota yang ternyata tidak mampu memenuhi tanggungannya maka tanggungannya dibebankan kepada anggota lainnya secara merata (Edilius,dkk, 1993: hal 86-87).

Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Pengaturan hak-hak anggota ini sama seperti kewajiban-kewajibannya diatur dalam beberapa sumber seperti UU Koperasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang mengatur antara lain :

- a. Menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sekaligus bersuara dalam rapat
- b. Memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus/BP (Badan Pemeriksa)
- c. Menuntut diselenggarakan Rapat Anggota (RA) berdasar atas ART
- d. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam rapat, baik diminta maupun tidak.
- e. Mendapat pelayanan yang sama antar anggota.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.
- g. Menerima bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi menurut ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar (Edilius,dkk, 1993: hal 87-88).

Berdasarkan kewajiban dan hak anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Selain itu dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak, serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota dapat diuraikan menjadi :

- a. Pemilik, pemakai, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan).
- b. Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunal.
- c. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya
- d. Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya;
 - 1) memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya,
 - 2) memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung bersama-sama maka kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat diselesaikan.
 - 3) memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.
- e. Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang ; a) merasa cocok bila mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam bidang ekonomi, b) merasa kuat

bila mereka bersatu menjadi anggota Koperasi, dan c) merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya. Subandi (2007:hal 7)

6. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur kata lainnya adalah bagan atau susunan. Sedangkan istilah Organisasi berasal dari perkataan bahasa Yunani “Organon” yang dimaksudnya:alat/perkakas. Dengan demikian organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai suatu susunan dari alat-alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi ini tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian. Dan ini merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Adapun tujuannya adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Susunan atau Struktur Organisasi Koperasi dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu :

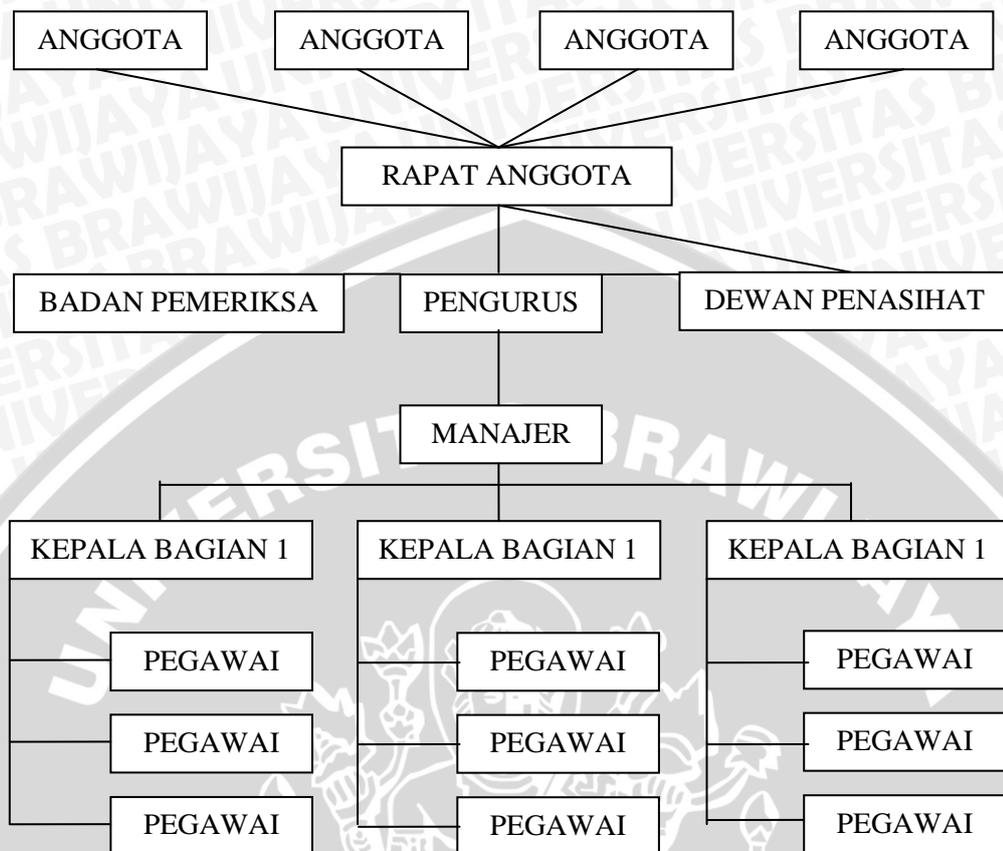
a. Dimensi Dalam (*intern*) Organisasi Koperasi

Menurut Prof. Dr. Jl. Mey dan Drs. P.M.M.H Swei dalam Edilius dkk (1993;hal 84) mengatakan bahwa hal-hal yang menimbulkan masalah yang merupakan inti dari teori organisasi intern adalah “pemisahan pimpinan dan pelaksanaan serta pengkhususan pimpinan sendiri.”

Sesuai dengan UU No. 12/1967. Organisasi intern koperasi yang disebut sebagai alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota (RA), Pengurus dan Badan Pemeriksa. Namun demikian bagi kepentingan koperasi dapat diadakan Dewan Penasihat. Bahkan lebih dari itu dapat dibenarkan. Dewasa ini struktur intern organisasi koperasi makin memanjang dan meluas sejalan dengan makin kompleksnya tugas/kegiatan baik pengurus maupun koperasinya sehingga diperlukan peran karyawan (termasuk manajer)

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya gambar Struktur Organisasi Intern tersebut seperti tampak pada gambar 4

Gambar 2 Struktur Organisasi Intern Koperasi



1) Anggota Koperasi

Keanggotaan koperasi dapat terdiri dari orang-orang dan badan-badan hukum koperasi

2) Rapat Anggota (RA)

Rapat Anggota merupakan salah satu “alat perlengkapan organisasi” di samping Pengurus dan Badan Pemeriksa, juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi di mana tiap anggota berhak atas satu suara.

3) Pengurus

Keberhasilan koperasi sebagian besar ditentukan oleh kredibilitas pengurus dalam memimpin koperasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria tertentu bagi anggota yang dapat diangkat sebagai pengurus. Dalam hubungan ini dapat diketengahkan pendapat Dr. Harsono dalam Djamhari (1985: hal 93) dari segi ketrampilan anggota pengurus harus memiliki ketrampilan dalam hal teknik pengambilan

keputusan, teknik penyelenggaraan rapat, teknik pembuatan laporan dan interpretasi data, kemampuan meramalkan (*forecasting*) dan kemampuan memelihara dan meluaskan hubungan keluar koperasi ketrampilan pemasaran.

Pengurus harian dipilih dari anggota “Pengurus Lengkap/Pleno” yang bertanggung jawab khusus untuk melaksanakan tugas operasional sekaligus wakil pengurus lengkap. Adapun Pengurus Harian yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara

4) Badan Pemeriksa (BP)

Badan Pemeriksa mempunyai kedudukan sejajar dengan pengurus. Di bawah RA keduanya sederajat dalam pandangan anggota koperasi, diangkat dari dan oleh anggota, melaksanakan kehendak anggota dan karena itu bertanggung jawab terhadap anggota melalui RA.

Bentuk pemeriksaan secara garis besar dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Pemeriksaan Intern adalah bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa yang khusus dibentuk untuk keperluan ini oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan UU No. 12/1967 pasal 27-30 tentang badan Pemeriksa.
- b) Pemeriksaan Ekstern dilakukan oleh Lembaga/Instansi/Pejabat yang pembentukannya/penunjukannya di luar kuasa koperasi yang diperiksa. Adapun dasar hukum pemeriksaan ekstern ini adalah pasal 37-39 UU No. 12/1967 beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dengan tujuan antara lain untuk:
 1. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada koperasi seperti aspek organisasi dan manajemen, aspek usaha, aspek administrasi pembukuan dan lain-lain
 2. Mengetahui sampai di mana bimbingan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh koperasi yang bersangkutan
 3. Mengamankan kepentingan koperasi yang bersangkutan dan kepentingan pihak lainnya yang bekerjasama dengan koperasi yang bersangkutan
 4. Mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang diterapkan pengurus sesuai dengan AD/ART maupun keputusan RA serta peraturan yang berlaku
 5. Meneliti kebenaran dan ketelitian/kecermatan data-data keuangan koperasi

Sesuai dengan bunyi pasal 38 dan 39 UU No. 12/1967 adalah bahwa pejabat seperti yang dimaksud dalam SK Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 1968. Jo SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 91 tahun 1968, tanggal 1 Oktober 1968 yaitu : 22 KPTS/MENTRANSKOP/68

- a) Direktur Jenderal (Dirjen) Koperasi
- b) Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi/Daerah Istimewa
- c) Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya
- d) Petugas-petugas yang bertindak atas nama Dirjen Koperasi, Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi/Daerah Istimewa, Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya

5) Dewan Penasehat

Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasihat demi kepentingan koperasi pada umumnya, pengurus pada khususnya. Untuk keperluan ini dapat diangkat Dewan Penasihat yang anggotanya berasal dari organisasi koperasi sesuai keahliannya.

Tugas utama Dewan Penasihat ini adalah mengajukan saran-saran/anjuran/nasihat yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatannya sehari-hari.

6) Manajer dan Karyawan Lainnya

Posisi peran pengurus dan manajer koperasi Indonesia sangat strategis dan struktural. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh Top Manajemen Koperasi untuk menjalankan usaha, baik dimensi ideal maupun ekonomi koperasinya.

Dengan sebab itu keterbatasannya, waktu, keahlian dan lain-lain serta kemajuan manajerialnya umumnya, pengurus dapat mendelegasikan wewenangnya kepada manajer, khusus untuk menjalankan perusahaan (bbidang ekonomi) koperasi.

Dengan Demikian karyawan-karyawan (termasuk manajer) koperasi ini merupakan tenaga professional dalam menjalankan/melaksanakan kebijakan pengurus. Mereka diangkat dan diberhentikan pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus.

b. Dimensi luar (*extern*) Organisasi Koperasi

Dimensi di luar organisasi koperasi adalah berbagai kesatuan organisasi yang ada di luar koperasi.

7. Jaringan Kerjasama Koperasi

a. Pengertian Jaringan Kerjasama Koperasi

Menurut Edilius, dkk (1993: hal 183) Jaringan kerjasama koperasi adalah suatu pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan kekuatan bersama.

b. Macam-macam jaringan kerjasama koperasi

Jaringan kerjasama ini ada empat macam yaitu :

- 1) Vertikal yaitu kerjasama antara koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis
- 2) Horizontal yaitu kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi primer dan koperasi sekunder dengan koperasi sekunder
- 3) Diagonal yaitu kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis dan antara koperasi dengan non koperasi
- 4) Internasional yaitu kerjasama koperasi di dalam negeri dengan koperasi di luar negeri (Edilius, dkk, 1993: hal 183-184)

c. Manfaat jaringan kerjasama koperasi

Manfaat jaringan kerjasama koperasi antara lain :

- 1) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari dalam gerakan koperasi secara efisien supaya memunculkan kelipatan daya guna yang semakin tepat
- 2) Memperluas usaha antar koperasi agar manfaat ekonomis jatuh di tangan koperasi
- 3) Perpaduan antar koperasi yang lemah dengan yang kuat agar dapat mewujudkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui alih sumber daya, teknologi dari satu koperasi kepada koperasi yang lain
- 4) Menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha-usaha yang semakin terpadu dalam satu lingkup system yang terarah.
- 5) Menaikkan sumbangan koperasi terhadap pembentukan Produksi Nasional (GNP) secara lebih terarah
- 6) Memudahkan pembinaan dan pengawasan antar koperasi yang satu dengan yang lain
- 7) Meningkatkan memunculkan para wira koperasi yang berwawasan luas (Edilius, dkk, 1993: hal 184).

8. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi dalam Koperasi

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 1997: 210-224). Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan koperasi yang dirangkum dari beberapa tulisan ilmiah :

- a. Koperasi memberikan modal untuk memberikan kemudahan bagi anggota dalam memulai atau mengembangkan usaha

Peran Koperasi Wanita dalam pemberdayaan perempuan yang paling dominan adalah memberikan kredit modal investasi maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif yaitu pelaku UMKM dan masyarakat sekitar pada umumnya yang ingin mengembangkan usahanya atau memulai usaha melalui unit simpan pinjam, yang sebelum berdirinya Kopwan mereka sering terjatoh oleh para pelepas uang dengan bunga tinggi (Harsosumarto, 2007: hal 9)

- b. Koperasi sebagai fasilitator bagi anggota dalam menjalin hubungan kemitraan

Aspek penting dalam melakukan pemberdayaan adalah melakukan hubungan kemitraan yang kedua belah pihak yang bersifat saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

... kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya (gurem) dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan (Kartasmita, 1996:hal 6).

- c. Koperasi memberikan kemudahan akses bagi anggota untuk terlibat dalam mempengaruhi manajemen koperasi sendiri

Koperasi menurut ajaran ekonomi kelembagaan dari John Commons mengutamakan keanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan modal tetapi berdasar keikutsertaan usaha betapapun kecilnya. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan hukum bukan perkumpulan modal. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat terbuka/transparan dan benar-benar partisipatif. Peran anggota merupakan indikator penting dalam mengenali koperasi secara universal, dengan tidak dibatasi oleh visi politis maupun kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat di mana koperasi itu hidup (Kartasmita, 2007: hal 4)

Selain tiga poin konsep pemberdayaan ekonomi dalam koperasi yang telah dicantumkan di atas, masih ada beberapa poin lagi. Beberapa poin tersebut dikemukakan oleh Harsosumarto (2007: hal 9-10), menurut dia peran koperasi wanita lainnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan ketrampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi/akutansi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi, pasar, peluang usaha, peningkatan kesadaran perempuan atas hak-haknya di lingkungan kerja maupun keluarga, kegiatan/program pemberdayaan perempuan pelaku UMKM bekerja sama dengan jaringan lembaga internasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006: hal 5) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu (Fathoni, 2006: hal 97). Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat (Muslimin, 2002: hal 15). Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari obyek yang akan diteliti agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual dari obyek penelitian agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berusaha mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, diuraikan, dianalisis serta selanjutnya menerima alternatif pemecahan masalah.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Upaya-upaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) terdiri dari:
 - a. Simpanan dan Pinjaman
 - b. Pelatihan-pelatihan
 - c. Pemasaran Produk yang Dihasilkan Anggota
 - d. Konsultasi Usaha
 - e. Akses Pekerjaan dengan upah yang Layak
2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) baik dari Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
3. Instrumen yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) meliputi biaya dan aturan-aturan.
4. Kelompok sasaran (*target group*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dikelompokkan menurut gender dan cakupan wilayah
5. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penerapan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)
 - a. Internal
 - b. Eksternal

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Malang sedangkan situs penelitian adalah Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dipilih dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya penerapan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat pada tahap emansipatif tepatnya pemberdayaan melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW). Selain itu KSU SBW juga telah berdiri sejak lama dan sudah banyak belajar dari kesuksesan dan hambatan-hambatan yang pernah dihadapi.
2. Meskipun KSU SBW tekah dikatakan pernah menjadi koperasi non KUD terbaik peringkat 2 nasional akan tetapi penyerapan modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk anggota di Koperasi SBW masih menempati porsi yang sedikit.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2002 : hal 107). Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang atau yang dapat dijadikan sebagai narasumber data karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut :

1. Data primer

Yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*), dengan pengelola dan anggota Koperasi SBW terkait dengan proses, tujuan dan hambatan dalam

pemberdayaan. Dengan pertimbangan bahwa mereka lebih banyak mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Data sekunder

Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti. Berarti data ini tidak secara langsung berhubungan dengan responden. Data sekunder meliputi : dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari rekaman penyelenggaraan pemberdayaan. Selain itu akan dilakukan triangulasi dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan di bedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999). Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang sedang diamati sehingga mempengaruhi obyek amatan tersebut, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja. Yang akan diamati dalam proses observasi ini akan dilakukan secara fleksibel melihat kondisi obyek dan lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan semua panca indera yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan obyek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Instrumen ini digunakan agar peneliti dapat terhindar dari kesalahan akan apa yang telah diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999 :hal 157). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Akan tetapi setelah di lapangan, peneliti akan mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir. Wawancara ini akan dilakukan terhadap Ketua Kopwan Setia Budi Wanita, beberapa pengurus Kopwan SBW dan beberapa kelompok anggota yang diklasifikasikan berdasar pada kepentingan kelompok anggota terhadap koperasi. Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

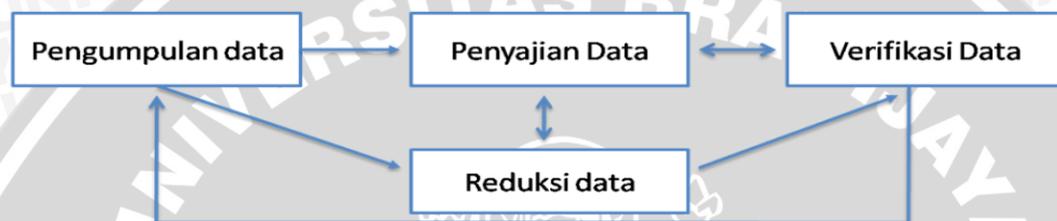
Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip-arsip yang dianggap berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen–dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel dari majalah, koran atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Desain Analisis Data

Metode analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang bersifat atau menonjolkan angka-angka sedangkan data kualitatif merupakan data-data yang tidak berbentuk angka-angka. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga diperoleh kesimpulan.

Moleong (2001: hal.190) merumuskan pengertian analisis data adalah proses analisis data mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan, kemudian dikategorikan. Tahap akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, baru melakukan penafsiran data. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis- analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah.



Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles & Hubberman (1992: hal.15)

Analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles & Hubberman, 1992: hal.15).

G. Keabsahan Data

Hasil penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses penelitian. Baik atau tidaknya hasil penelitian sangat tergantung dari proses yang dijalani oleh peneliti selama melakukan dan menyusun penelitian. Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar itu disebut sebagai keabsahan data. Menurut Moelong, (1999: hal.173) menetapkan keabsahan data diperlukan dengan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan

(*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Berikut ini penjelasannya :

1. Derajat kepercayaan (*credibility*). Untuk memeriksa kredibilitas dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan *peerdebriefing*

Hasil kajian didiskusikan dengan orang lain yaitu dengan dosen pembimbing yang mengetahui pokok pengetahuan tentang penelitian dan metode yang diterapkan.

b. Triangulasi

Hal ini dilakukan sejak terjun ke lapangan dengan berbagai wawancara maupun seperti berbincang biasa dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang sumber lain yang berbagai fase penelitian di lapangan. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

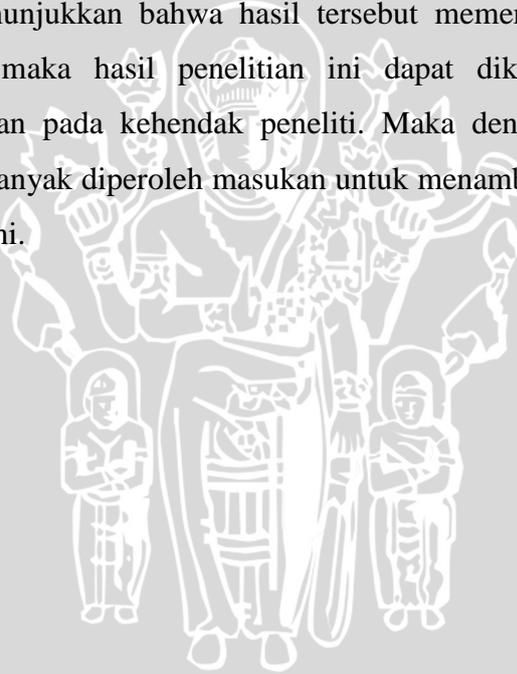
- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*transferability*) Keteralihan berbagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya.

3. Ketergantungan (*dependability*) dan Kepastian (*conformability*).

Menurut istilah konvensional gabungan antara ketergantungan dan kepastian disebut realibilitas. Dengan alat yang *reliable*, maka dapat diperoleh data yang valid. Alat yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Maka hal yang perlu dilakukan adalah memadukan ketergantungan dan kepastian. Maka data yang perlu disiapkan adalah :

- a. Data mentah yang diolah dalam bentuk laporan lapangan.
- b. Hasil analisa data berupa, tafsiran kesimpulan definisi, interaksi data, hubungan *literature*, dan laporan akhir.
- c. Catatan proses yang digunakan, misal metodologi, desain, prosedur, dan usaha-usaha agar penelitian dapat dipercaya. Apabila pemeriksaan ternyata menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi kriteria yang diharapkan, maka hasil penelitian ini dapat dikatakan valid dan ketergantungan pada kehendak peneliti. Maka dengan penelitian ini diharapkan banyak diperoleh masukan untuk menambah kebenaran dari hasil kajian ini.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA MALANG DAN KONDISI PERKOPERASIAN DI KOTA MALANG

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Karakteristik Geografis Kota Malang

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06o – 112.07o Bujur Timur, 7.06o – 8.02o Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab. Malang
- Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab. Malang
- Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang
- Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab. Malang.

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

2. Kondisi Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,9oC sampai 24,1oC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,8oC dan suhu minimum 19,0oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% - 85%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang

mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Agustus, September dan Juni.

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Malang

Komposisi penduduk asli Kota Malang berasal dari berbagai etnik dan berbagai pemeluk agama. Etnik masyarakat Kota Malang meliputi etnik Jawa (mayoritas), Madura, Arab dan Cina (minoritas). Sedangkan untuk agama yang dianut oleh masyarakat Kota Malang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi dari adanya perbedaan tersebut masyarakat Kota Malang memiliki kebanggaan bersama yaitu identitasnya sebagai Arek Malang (Arema).

Selain dari keberadaan penduduk asli, banyak juga masyarakat luar yang datang ke Kota Malang. Masyarakat pendatang mayoritas adalah para pedagang, pekerja dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) misalnya Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Beragamnya masyarakat Kota Malang juga berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng. Namun sakarang ini kondisi Tari Topeng semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo dan Jogja), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung dan Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi).

4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, pada periode 1990–2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86 %. Jika dilihat dari data jumlah penduduk Tahun 2007, mayoritas penduduk berjenis kelamin laki-laki. Selain itu jika dilihat dari segi persebarannya (kecamatan), mayoritas penduduk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukun. Berikut ini Tabel

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2007.

Tabel. 5 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2007

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Jumlah Jiwa | Rasio Jenis Kelamin |
|----|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Blimbing | 85.790 | 85.435 | 171.225 | 100,42 |
| 2 | Kedungkandang | 78.229 | 78.734 | 156.963 | 99,36 |
| 3 | Klojen | 61.211 | 63.975 | 125.186 | 95,68 |
| 4 | Lowokwaru | 86.904 | 82.090 | 168.994 | 105,86 |
| 5 | Sukun | 90.269 | 89.330 | 179.599 | 101,05 |
| | Jumlah | 402.403 | 399.564 | 801.967 | 100,71 |

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Jumlah dari sekian penduduk Kota Malang pada tahun 2007 tersebut, penduduk Kota Malang memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk Kota Malang baik laki-laki maupun perempuan adalah tamatan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 24,78% dari total keseluruhan penduduk Kota Malang yang mengenyam pendidikan. Berikut ini adalah data (tabel) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2007.

Tabel. 6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2007

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Tidak/Belum Tamat SD/MI | 6.72 | 6.66 | 13.39 |
| 2 | SD/MI | 9.54 | 12.14 | 21.68 |
| 3 | SMP/MTs | 9.73 | 9.13 | 18.86 |
| 4 | SMU/MA | 12.70 | 12.08 | 24.78 |
| 5 | SMK | 6.99 | 3.81 | 10.80 |
| 6 | Diploma I,II | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| 7 | Diploma III | 0.73 | 0.83 | 1.57 |
| 8 | D IV/S1 | 3.56 | 3.72 | 7.29 |

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 9 | S2/S3 | 0.44 | 0.20 | 0.64 |
| | Jumlah | 51.00 | 49.00 | 100.00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang

5. Kondisi Ketenagakerjaan

Mata pencaharian penduduk Kota Malang mayoritas bergelut di bidang perdagangan. Jumlah tenaga kerja di bidang perdagangan hingga mencapai 123.974 orang. Jumlah tersebut merupakan 33,87% dari jumlah keseluruhan penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama tahun 2007. Sedangkan jumlah tenaga kerja di bidang pertanian hanya 6.595 orang (1,8%). Selain di bidang perdagangan dan pertanian, mata pencaharian penduduk Kota Malang juga meliputi di bidang pertambangan, penggalian, industri dan lain sebagainya. Berikut tabel yang berisi lapangan usaha utama penduduk Kota Malang usia 10 tahun ke atas beserta jumlah tenaganya.

Tabel. 7 Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2007

| No | Lapangan Usaha Utama | Jumlah Tenaga Kerja | Presentase |
|----|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 6,595 | 1.80 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 1,263 | 0.35 |
| 3 | Industri | 69,512 | 18.99 |
| 4 | Listrik Gas & Air | 2,018 | 0.55 |
| 5 | Konstruksi | 16,657 | 4.55 |
| 6 | Perdagangan | 123,974 | 33.87 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 17,975 | 4.91 |
| 8 | Keuangan | 15,397 | 4.2 |
| 9 | Jasa-jasa | 108,226 | 29.57 |
| 10 | Lainnya | 4,419 | 1.21 |
| | Jumlah | 366,036 | 100.00 |

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, BPS Kota Malang

Ternyata tidak semua penduduk Kota Malang yang di usia kerja telah memiliki pekerjaan. Hal tersebut bisa dilihat dari data Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. Jumlah sisa pencari kerja dalam Bursa Tenaga Kerja Tahun 2007 tercatat terdiri dari laki-laki sebanyak 15.511 orang dan perempuan sebanyak 14.017 orang.

Tabel. 8 Keadaan Bursa Tenaga Kerja Tahun 2007

| No | Uraian | Jenis Kelamin | |
|----|-----------------------------------|---------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Sisa Pencari Kerja Terdaftar | 15,511 | 14,017 |
| 2 | Lowongan Kerja | | |
| | • Sisa Lowongan Tahun Lalu | 135 | 188 |
| | • Lowongan Yang Terdaftar | 1,403 | 978 |
| | • Lowongan Yang dapat Dipenuhi | 256 | 445 |
| | • Lowongan Kerja Dihapuskan | - | - |
| | • Sisa Lowongan Tahun Ini | 1,282 | 721 |
| 3 | Penempatan Tenaga Kerja | | |
| | • Antar Kerja Lokal (AKL) | 178 | 58 |
| | • Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | - | 35 |
| | • Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | 7 | 299 |

Sumber : Dinas Ketengakerjaan Kota Malang

Jumlah pencari kerja pada tahun 2007 yang terdaftar sebanyak 29.528 terdiri dari pencari kerja laki-laki dan pencari kerja perempuan. Berikut ini adalah tabel jumlah pencari kerja terdaftar menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2007

Tabel. 9 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Bursa Kerja) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Sekolah Dasar | 96 | 10 | 106 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 364 | 246 | 610 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 7.038 | 5.554 | 12.592 |
| 4 | Diploma/Akademi | 1.525 | 1.641 | 3.166 |
| 5 | Sarjana | 6.488 | 6.566 | 13.054 |
| | Jumlah | 15.511 | 14.017 | 29.528 |

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Berdasarkan data dari tabel. 9 dapat diketahui bahwa pencari kerja paling banyak dari mereka dengan tingkat pendidikan Sarjana, yaitu sejumlah 13.054 orang dengan rincian laki-laki sejumlah 6.488 orang dan perempuan sejumlah 6.566 orang.

6. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data berikut ini yaitu presentase jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran per kapita/bulan tahun 2007 diketahui bahwa kelompok pengeluaran per kapita/bulan >500.000 menduduki peringkat paling tinggi yaitu 37.50%.

Tabel. 10 Presentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita/Bulan Tahun 2007

| No | Kelompok Pengeluaran Perkapita/Bulan | Presentase |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1 | < 100.000 | 0.54 |
| 2 | 100.00-149.999 | 2.31 |
| 3 | 150.00-199.999 | 4.76 |
| 4 | 200.000-299.999 | 17.93 |
| 5 | 300.000-499.999 | 36.96 |
| 6 | > 500.000 | 37.50 |
| | Jumlah | 100.00 |

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, BPS Kota Malang

Banyaknya kelompok pengeluaran perkapita/bulan >500.000 ternyata masih kurang mewakili kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang bulan Desember tahun 2006, masih banyak jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu sejumlah 24.272 RTM.

Tabel. 11 Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan Tahun 2006 (Desember)

| No | Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1 | Kedung Kandang | 6.632 |
| 2 | Sukun | 6.255 |
| 3 | Klojen | 3.407 |
| 4 | Blimbing | 4.158 |
| 5 | Lowokwaru | 3.820 |
| | Jumlah | 24.272 |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

B. Gambaran Umum Koperasi-koperasi di Kota Malang

Berikut ini adalah data mengenai koperasi-koperasi di Kota Malang yang dinaungi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan koperasi-koperasi yang dinaungi oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur.

Tabel. 12 Data Koperasi di Kota Malang yang Dinaungi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (2004-2008)

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Jumlah Koperasi | Koperasi | 616 | 621 | 627 | 638 | 643 |
| 2 | Jumlah Anggota | Orang | 93.871 | 94.221 | 103.448 | 105.263 | 66.181 |
| 3 | Jumlah Karyawan | Orang | 1.554 | 1.559 | 1.712 | 1.733 | 1.105 |
| 4 | Modal Sendiri | Juta (Rp) | 76.727 | 82.123 | 118.318 | 126.600 | 180.382 |
| 5 | Modal Luar | Juta (Rp) | 123.198 | 135.806 | 125.095 | 136.354 | 320.551 |
| 6 | Volume Usaha | Juta (Rp) | 203.265 | 271.633 | 387.960 | 394.766 | 479.109 |
| 7 | SHU | Juta (Rp) | 10.395 | 11.760 | 13.512 | 13.749 | 20.285 |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang

Berdasarkan data di atas ternyata dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi-koperasi di Kota Malang menunjukkan angka positif. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang terus meningkat setiap tahun (mulai tahun 2004 sampai tahun 2008).

Tabel. 13 Data Koperasi di Kota Malang yang Dinaungi oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur Tahun 2008

| No | Nama Koperasi | Jumlah Anggota | Omzet | Aset |
|----|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Setia Budi Wanita | 5.296 | Rp. 25.701.741.000 | Rp.16.995.496.587 |
| 2 | Kinanti | 168 | Rp. 6.852.326.587 | Rp. 7.912.483.111 |
| 3 | Mawar Putih | 425 | Rp. 796.248.500 | Rp. 520.176.087 |
| 4 | Bhakti Astra Makmur | 1.373 | Rp. 4.375.353.700 | Rp. 5.409.660.647 |

Sumber : www.puskowanjati.com

Berdasarkan data koperasi di Kota Malang yang dinaungi oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, dapat dilihat bahwa Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) termasuk dalam daftar tersebut. Selain itu dapat dilihat juga diantara semua koperasi tersebut, Koperasi SBW merupakan koperasi yang memiliki jumlah anggota, omzet dan aset yang paling besar.

C. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Profil Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Koperasi Setia Budi Wanita merupakan koperasi yang lahir dari perkumpulan arisan para isteri dokter yang diprakarsai oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Perkumpulan tersebut didirikan pada tahun 1954 dan pada saat itu anggotanya sejumlah 17 orang. Dari perkumpulan tersebut muncul gagasan-gagasan yang kemudian diwujudkan bersama-sama. Pada tahun 1977 Ibu Mursia menggagas bahwa perkumpulan tersebut ditingkatkan menjadi sebuah koperasi. Sebelum gagasan itu muncul perkumpulan tersebut sudah mengalami transisi yaitu menjadi Prakoperasi bernama Setia Budi Wanita (SBW) yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam. Gagasan Ibu Mursia untuk menjadikan prakoperasi Setia Budi Wanita menjadi koperasi terwujud pada tanggal 30 Desember 1977. Pada saat itu Prakoperasi SBW mendapatkan status Badan Hukum dengan Nomor : 3992/BH/II/77 dan berubah nama menjadi Koperasi Serba Usaha “ Setia Budi Wanita “ Malang yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 76 Malang.

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kinerjanya. Adapun visi dan misi tersebut yaitu :

Visi

Wadah pemberdayaan di bidang ekonomi sosial budaya melalui sistem tanggung renteng untuk mengangkat harkat, derajat, martabat dan kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan profesionalisme mewujudkan perempuan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas.

Misi

1. Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan perkoperasian.
2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengembangan Sumber Daya Manusia anggota secara terencana dan berkelanjutan.

3. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap dan sistematis.
4. Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasar nilai-nilai koperasi (*value based cooperative management*).
5. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat.
6. Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk mengembangkan usahanya dan usaha koperasi.
7. Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna meningkatkan pelayanan.
8. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota dan masyarakat dengan tepat sasaran.
9. Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi KSU SBW, dapat diketahui pemberdayaan bidang ekonomi telah menjadi orientasi bagi koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota. Selain itu sebagai koperasi wanita ternyata KSU SBW mempunyai visi dan misi yang tidak hanya menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi di kalangan perempuan saja akan tetapi pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat secara umum baik laki-laki maupun perempuan.

Berbeda dengan beberapa koperasi yang ada, anggota KSU SBW diwajibkan untuk memiliki kelompok. Keberadaan kelompok-kelompok ini terkait dengan sistem simpan pinjam yang diterapkan di KSU SBW. Sistem simpan pinjam tersebut dinamakan Sistem Tanggung Renteng (STR). Sistem Tanggung Renteng ini yang kemudian juga menjadi media pemberdayaan ekonomi bagi anggota koperasi. Garis besar makna dari STR ini yaitu ketika ada anggota yang tidak mampu memenuhi angsuran pinjaman pada waktu yang ditentukan, setiap anggota yang lain dalam kelompok yang sama harus membantu anggota tersebut dengan memberikan pinjaman uang mereka untuk memenuhi angsuran dari anggota tersebut. Kelompok juga kemudian menempuh kesepakatan mengenai waktu pelunasan pinjaman anggota tersebut kepada kelompok. Penerapan STR ini menghendaki bahwa semua permasalahan simpan pinjam harus diselesaikan di kelompok.

Sesuai dengan namanya yaitu Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita, unit usaha KSU SBW sudah berbeda pula jika dibandingkan pada saat masih menjadi prakoperasi. Unit usaha KSU SBW sudah beragam tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja. Beberapa unit usaha yang dimiliki SBW yaitu Unit

Usaha Simpan Pinjam melalui STR, Unit Usaha Warung Serba Ada (Waserda), Unit Usaha Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) dan Simpanan Non Tanggung Renteng (NTR). Semua unit usaha yang ada tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan anggota yang semakin beragam dan menjadi salah satu bentuk perwujudan visi dan misi koperasi.

2. Keanggotaan

Berdirinya KSU SBW selama berpuluh-puluh tahun ternyata diikuti pula dengan pertumbuhan jumlah anggota. Berdasarkan data yang ada pertumbuhan jumlah anggota KSU SBW meningkat jika dibandingkan jumlah anggota antara tahun 2005 dan tahun 2008. Meskipun tahun-tahun diantaranya jumlah anggota KSU SBW sempat mengalami penurunan. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan jumlah anggota dan pertumbuhan jumlah kelompok mulai tahun 2005 hingga 2008.

Tabel. 14 Pertumbuhan Jumlah Anggota Tahun 2005-2008

| No | Keadaan Data | Tahun | | | |
|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Jumlah anggota seluruhnya | 5.185 | 4.134 | 4.084 | 5.296 |
| | • Anggota Penuh | 4.221 | 3.085 | 3.755 | 4.859 |
| | • Calon Anggota | 964 | 457 | 329 | 437 |
| 2 | Anggota baru | 535 | 721 | 829 | 1.452 |
| 3 | Anggota mengajukan keluar | 192 | 181 | 141 | 123 |
| 4 | Anggota AK yang direalisasi | 294 | 626 | 384 | 343 |

Sumber : Hasil olahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU SBW

Tabel. 15 Pertumbuhan Jumlah Kelompok Tahun 2005-2008

| No | Keadaan Data | Tahun | | | |
|----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Jumlah kelompok penuh | 142 | 141 | 137 | 183 |
| 2 | Jumlah kelompok KPPK | 535 | 721 | 125 | 119 |
| | Jumlah seluruh kelompok | 355 | 357 | 357 | 302 |

Sumber : Hasil olahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU SBW

Keterangan : Kelompok penuh terdiri dari kelompok penuh aktif dan kelompok penuh pasif. Kelompok Penuh Aktif adalah kelompok tanggung renteng yang anggotanya minimal 15 orang dan tidak bermasalah. Sedangkan Kelompok Penuh Pasif adalah kelompok tanggung renteng yang anggotanya kurang dari 15 orang dan bermasalah yang ditangani secara khusus (pada tahun 2008 terdapat 23 Kelompok Penuh Pasif)

3. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan laporan neraca per 31 Desember yang ada mulai tahun 2005 sampai 2008, dana pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KSU SBW mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2005 dan 2006 dana pembagian SHU di atas jumlah Rp. 200.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 dana pembagian SHU turun menjadi di bawah jumlah Rp. 200.000.000,-. Berikut ini tabel dana pembagian SHU mulai tahun 2005 hingga tahun 2008.

**Tabel. 16 Dana Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
Mulai Tahun 2005-2008**

| No | Tahun | Dana Pembagian SHU (Rp) |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2005 | 218.342.167 |
| 2 | 2006 | 250.272.152 |
| 3 | 2007 | 184.903.643 |
| 4 | 2008 | 187.883.066 |

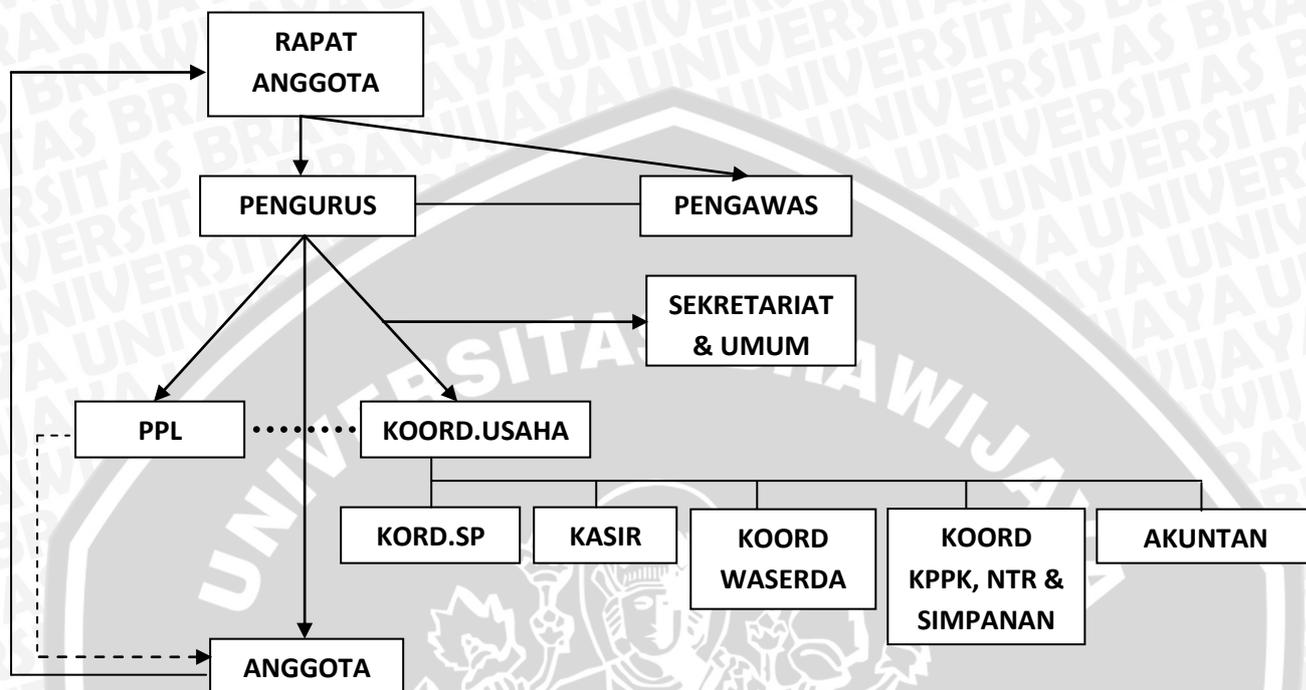
Sumber : Data olahan dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU SBW

Penurunan atau peningkatan SHU KSU SBW akan mempengaruhi penurunan dan peningkatan dana alokasi untuk beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Sisa Hasil Usaha (SHU) dialokasikan pada beberapa hal sebagai berikut :

| | |
|-------------------|------|
| Cadangan koperasi | 30 % |
| Jasa Anggota | 45 % |
| Dana Pengurus | 10 % |
| Dana Karyawan | 5 % |
| Dana Pendidikan | 5 % |
| Dana Sosial | 5 % |

4. Struktur Organisasi

Gambar. 4 Bagan Struktur Organisasi



Sumber : KSU Setia Budi Wanita

5. Nama, Jabatan dan Tugas dalam Organisasi

Tabel. 17 Nama, Jabatan dan Tugas Pengurus

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|---------------------------|----------|--|
| 1 | Dra. Sri Untari Bisowarno | Ketua I | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab penuh secara umum Bertanggung jawab atas hubungan dengan luar lembaga Mengetahui dan menandatangani deposito anggota Pengukuhan kelompok dan penyampaian Surat Keputusan (SK) dan Penanggung Jawab (PJ) Kelompok Baru |
| 2 | Rieni S.Sofyan | Ketua II | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab tentang mekanisme rencana kerja yang sudah disepakati anggota Bertanggung jawab tentang peraturan-peraturan khusus dan Surat Keputusan (SK) Bertanggung jawab Bidang Pendidikan dan pengarsipan Bertanggung jawab penuh tentang (Pembina dan Penyuluh Lapang) PPL |

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|--------------------|---------------|--|
| | | | <p>dan Pengaturan PPL</p> <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab tentang Lokakarya dan Sarasehan Bertanggung jawab tentang pemecahan kelompok Mempersiapkan kader Bertanggung jawab mengenai aset-aset lembaga yang berkaitan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Notaris bersama-sama dengan Bendahara Bertanggung jawab dengan Usaha Simpan Pinjam Pendampingan Kelompok Meminta pertanggungjawaban pada KPPK |
| 3 | Herni Yuli Lestari | Sekretaris I | <ul style="list-style-type: none"> Meminta pertanggungjawaban pada kesekretariatan Bertanggung jawab mengenai surat masuk dan surat keluar Pengarsipan surat Bertanggung jawab mengenai segi keorganisasian dan keanggotaan Bertanggung jawab mengenai Notula Pendampingan kelompok Bertanggung jawab secara penuh tentang kesekretariatan Bertanggung jawab tentang kinerja karyawan |
| 4 | Edien Soepomo | Sekretaris II | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab penuh tentang urusan rumah tangga koperasi Bertanggung jawab dengan Warung Serba Ada (Waserda) Bersama dengan Sekretaris I bertanggung jawab tentang kesekretariatan Bertanggung jawab atas satpam Bertanggung jawab dalam pembuatan grafik tentang kondisi Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita dari sisi organisasi maupun usaha. Meminta pertanggungjawaban pengisian papan data oleh Pembina Penyuluh Lapangan (PPL) dan laporan PPL yang masuk Mengatur dan merawat arsip Mencatat, menyimpan dan merawat inventaris dengan tertib Pendampingan kelompok Bertanggung jawab mengenai buletin |
| 5 | Sudiastuti | Bendahara | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab penuh mengenai segi keuangan beserta laporan dan pengarsipannya Mengatur jalannya keuangan anggota Bersama dengan Ketua II membuat peraturan-peraturan khusus tentang keuangan |

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|------|---------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur gaji karyawan dan berbagai kompensasi yang diberikan kepada perangkat • Bertanggung jawab dengan aset-aset lembaga yang berkaitan dengan Bank Rakyat Indonesia dengan Notaris bersama dengan Ketua II • Pendampingan kelompok |

Sumber : KSU Setia Budi Wanita

Tabel. 18 Nama, Jabatan dan Tugas Pengawas

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|--------------------|---------|--|
| 1 | Eveline Kawilarang | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan organisasi dan usaha • Mengarahkan segala kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota. • Memberikan evaluasi kegiatan berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota • Memberikan evaluasi kegiatan berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota |
| 2 | Anan Maria Indung | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan organisasi dan usaha • Mengarahkan segala kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota. • Memberikan evaluasi kegiatan berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota • Memberikan evaluasi kegiatan berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota |

Sumber : KSU Setia Budi Wanita

Tabel. 19 Nama, Jabatan dan Tugas Karyawan

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|-------------|-------------------|--|
| 1 | Sri Wahyuni | Koordinator Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir semua tugas karyawan • Bertanggung jawab atas kelancaran usaha pada semua unit • Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan usaha pada semua unit • Berkoordinasi dengan Pengurus minimal 2 kali dalam 1 bulan • Bekerjasama dengan Petugas Penyuluh Lapang (PPL) |

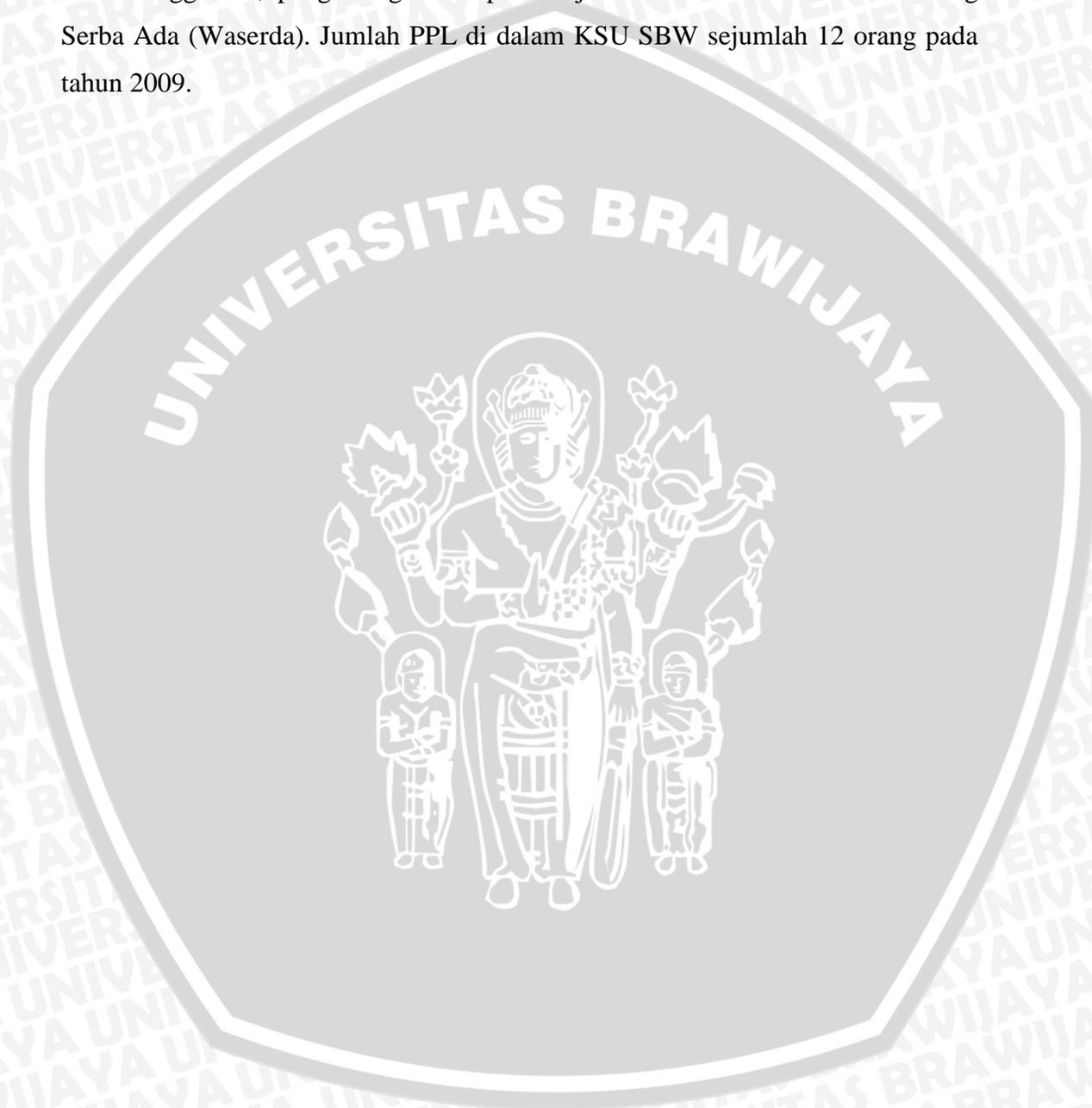
| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|------------------|--|---|
| 2 | Rochaniati | Koordinator Simpan Pinjam (SP) | <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinir tugas-tugas di Loket Bagian Simpan Pinjam (SP) Pelaporan Khusus Simpan Pinjam (SP) Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 3 | Andriani Susanti | Loket I | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas tugas dan pelaporan pada wilayah yang sudah ditentukan Melayani realisasi pinjaman Melayani Simpanan Tanggung Renteng (STR) Melayani Angsuran |
| 4 | Vonny P. | Loket II | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas tugas dan pelaporan pada wilayah yang sudah ditentukan Melayani realisasi pinjaman Melayani Simpanan Tanggung Renteng (STR) Melayani Angsuran |
| 5 | Yenny | Loket III | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas tugas dan pelaporan pada wilayah yang sudah ditentukan Melayani realisasi pinjaman Melayani Simpanan Tanggung Renteng (STR) Melayani Angsuran |
| 6 | Hendrik E. | Kasir I | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas Kas Keluar dan Kas Masuk setiap harinya dan di bawah pengawasan Pengurus dan Koordinator Usaha |
| 7 | Dwi Wahyu | Kasir II | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas Kas Keluar dan Kas Masuk setiap harinya dan di bawah pengawasan Pengurus dan Koordinator Usaha |
| 8 | Pudji Lestari | Koordinator Warung Serba Ada (Waserda) | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas unit yang dipimpin Pengadaan dan penjualan barang Pelaporan dan berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 9 | Hartini | Bagian Pembelian | <ul style="list-style-type: none"> Menentukan barang-barang yang masuk di Waserda Berkoordinasi dengan Koordinator Waserda |
| 10 | Jito | Bagian Gudang | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dalam gudang Berkoordinasi dengan Koordinator Waserda |
| 11 | Laluk | Kasir | <ul style="list-style-type: none"> Bagian pembelian tunai/kredit Berkoordinasi dengan Koordinator Waserda Pelaporan piutang Waserda |
| 12 | Sutris | Umum | <ul style="list-style-type: none"> Pengepakan Pengiriman Angkut barang |
| 13 | Wawan | Umum | <ul style="list-style-type: none"> Pengepakan |

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS |
|----|--------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman • Angkut barang |
| 14 | Ferry | Driver | <ul style="list-style-type: none"> • Khusus pengiriman barang Waserda • Berkoordinasi dengan Koordinator Waserda |
| 15 | Didik | Koordinator Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK), Simpan Pinjam Non Tanggung Renteng (NTR) | <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas unit yang dipimpin • Pelaporan kerja • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 16 | Bagio | Petugas Penyuluh Lapang (PPL) KPPK | <ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran dan bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya KPPK • Berkoordinasi dengan Koordinator KPPK |
| 17 | Puguh | Petugas Penyuluh Lapang (PPL) KPPK | <ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran dan bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya KPPK • Berkoordinasi dengan Koordinator KPPK |
| 18 | Wahyu | Non Tanggung Renteng (NTR) Simpanan | <ul style="list-style-type: none"> • Melayani angsuran dan realisasi pinjaman Non Tanggung Renteng • Menerima dan mengeluarkan simpanan-simpanan • Membuat laporan • Berkoordinasi dengan Koordinator KPPK |
| 19 | Lilien | Akuntan | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan keuangan secara global • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha • Berkoordinasi dengan Pengurus (Bendahara) |
| 20 | Indra | Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu kelancaran tugas organisasi dan Pengurus • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 21 | Atiek | Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu kelancaran tugas organisasi dan Pengurus • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 22 | Saiful | Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kantor • Membantu menyiapkan konsumsi karyawan dan pengurus • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 23 | Hadi | Satpam | <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas keamanan kantor • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |
| 24 | Ali | Satpam | <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas keamanan kantor • Berkoordinasi dengan Koordinator Usaha |

Sumber : KSU Setia Budi Wanita

Pembina Penyuluh Lapang (PPL)

Pembina Penyuluh Lapang (PPL) memiliki tugas dalam menyampaikan aturan/kebijakan baru dari pengurus kepada anggota. Misalnya meliputi prosedur masuk menjadi anggota KSU SBW, prosedur peminjaman, prosedur untuk keluar dari keanggotaan, penghitungan Simpan Pinjam dan informasi terkait Warung Serba Ada (Waserda). Jumlah PPL di dalam KSU SBW sejumlah 12 orang pada tahun 2009.



BAB V

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MALANG MELALUI KOPERASI SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA (KSU SBW)

A. Upaya-upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Simpanan dan Pinjaman

Salah satu strategi pemberdayaan ekonomi dalam Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) yaitu diadakannya usaha koperasi dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Dalam bentuk pemberdayaan ekonomi ini masyarakat diarahkan untuk dapat mengatur alokasi pendapatan untuk kebutuhan hidup termasuk modal usaha dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menyesuaikan kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Kategori usaha simpanan dan pinjaman ini sendiri juga bisa dikelompokkan dalam 3 bentuk yaitu Simpan Pinjam (SP), Pinjaman dan Simpanan.

a. Simpan Pinjam (SP)

Simpan Pinjam (SP) ini merupakan pemberdayaan dalam bentuk pinjaman modal kepada masyarakat, khususnya bagi anggota KSU SBW. Berbeda dengan bank, akses pinjaman modal yang ditawarkan SP ini lebih mudah dijangkau untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut karena pinjaman modal dari program SP ini tidak menghendaki adanya penyediaan agunan dari anggota baik itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun sertifikat tanah. Akan tetapi anggota diwajibkan untuk disiplin membayar angsuran untuk pelunasan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sejalan dengan yang diucapkan oleh Ibu Titin, salah satu anggota KSU SBW

..... yang diagunkan kita cuma moral, kepercayaan moral yang diminta SBW, ya tanggung jawab moral itu tadi. Kurang enak gimana? Kalau kita ke koperasi lain, misal perlu agunan-agunan minimal BPKB..iya yang punya kalau nggak punya...(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok pada tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 selesai pertemuan kelompok di rumah Ibu Yeni, Penanggung Jawab Kelompok 160)

Dana pinjaman yang diberikan kepada anggota dalam program ini selain bersumber dari uang simpanan anggota sendiri juga bersumber dari uang yang didapatkan koperasi melalui kerjasama dengan pihak lain. Simpanan dari anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Semua anggota KSU SBW wajib memiliki ketiga simpanan ini. Selain dari simpanan, pinjaman yang diperuntukkan anggota juga bersumber dari PT Perusahaan Nasional Mandiri (PNM). Pihak di luar koperasi ini telah bekerjasama dengan KSU SBW dalam penyediaan dana yang diperuntukkan bagi program simpan pinjam ini. Kerjasama antara PT. PNM dengan KSU SBW ini telah berlangsung lama, kurang lebih sejak tahun 2005. Dana yang dikucurkan oleh PT. PNM kepada KSU SBW ini berlangsung setiap 2 tahun. Hal yang telah dijelaskan tersebut juga telah disampaikan oleh Ibu Yuni

....Pihak lain yang bekerjasama dengan kita itu dari pihak PNM, PNM ini bekerjasama dengan cara penyediaan dana kepada kita. Dan dana ini memang khusus diperuntukkan untuk pinjaman kelompok (kelompok tanggung renteng). Kalau masalah sejak kapan kita kerjasama itu kurang lebih sejak tahun 2005 Mas.....(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 23 November 2009, pukul 11.30-12.00 di Ruang Koordinator Usaha)

Program Simpan Pinjam (SP) ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat diselenggarakan dengan adanya persyaratan bahwa anggota harus mempunyai kelompok. Kelompok yang dimaksud ada dua yaitu Kelompok Bulanan dan Kelompok Harian atau Mingguan. Kelompok Bulanan adalah kelompok yang melakukan rutin simpanan, pinjaman dan angsuran setiap satu bulan sekali dalam pertemuan kelompok. Sedangkan Kelompok Harian atau Mingguan adalah kelompok yang melakukan angsuran (baik angsuran untuk simpanan maupun pinjaman) dan pinjaman. Kelompok Harian atau Mingguan ini dinamakan Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil atau biasa disingkat KPPK.

Kelompok Bulanan

Persyaratan seseorang yang menginginkan untuk masuk menjadi anggota koperasi yang tergabung dalam Kelompok Bulanan (minimal 15 orang, maksimal 40 orang) selain harus memiliki kelompok, juga diharuskan untuk membayar

terlebih dahulu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Besaran simpanan pokok yaitu Rp.100.000,-, sedangkan besaran simpanan wajib minimal Rp.10.000,- dan besaran simpanan manasuka maksimal Rp.5.000.000,-. Seandainya setelah menjadi anggota tersebut ingin keluar dari keanggotaan, semua simpanan dikembalikan kepada anggota tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titin berikut ini :

..nanti kalau anggota ingin keluar, setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) simpanan-simpanan kita dikembalikan. Jadi uang itu nggak hilang..Cuma itu aja. ...(wawancara tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 selesai pertemuan kelompok di rumah Ibu Yeni, Penanggung Jawab Kelompok 160)

Setelah simpanan-simpanan tersebut dipenuhi baik mengenai keanggotaan dalam kelompok ataupun pembayaran simpanan, seseorang tersebut telah menjadi anggota dan mempunyai hak untuk melakukan pinjaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pinjaman juga dilakukan melalui pertemuan antar anggota dalam kelompok yaitu setiap satu bulan sekali. Anggota yang menginginkan pinjaman terikat dengan adanya plafon dan persetujuan dari anggota lain dalam kelompok tersebut. Plafon merupakan batasan maksimal besaran pinjaman yang boleh didapatkan oleh anggota. Besaran plafon untuk setiap anggota jika dihitung 400% dari simpanan wajib yang dimiliki oleh anggota tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titin

.....Simpanan wajib itu dasarnya kita utang, plafonnya kita utang. Empat kali lipat dari simpanan wajib. Jadi misal simpanan wajib kita 2 juta, maka kita dapat 8 juta..kalau untuk nambah simpanan wajib minimal 10 ribu maksimal 150 ribu per bulan... (wawancara tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 selesai pertemuan kelompok di rumah Ibu Yeni, Penanggung Jawab Kelompok 160)

Tabel 20. Jumlah Simpanan Wajib Mulai Tahun 2005-2006

| No | Tahun | Jumlah simpanan wajib |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2005 | Rp.2.347.541.350,- |
| 2 | 2006 | Rp.2.739.089.151,- |
| 3 | 2007 | Rp.3.331.025.178,- |
| 4 | 2008 | Rp.4.264.933.740,- |

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU SBW

Akan tetapi meskipun besaran plafon adalah Rp.4.000.000 tidak selalu anggota bisa mendapatkan pinjaman di batas maksimal tersebut. Besaran pinjaman yang bisa didapatkan oleh anggota juga tidak terlepas dari persetujuan anggota lain dalam kelompok. Persetujuan besaran pinjaman oleh kelompok dilakukan dengan cara mempertimbangkan kemampuan anggota yang meminjam dalam mengangsur pinjaman tersebut. Jika anggota yang meminjam diperkirakan tidak bisa mengangsur untuk setiap bulannya maka jumlah besaran pinjaman tersebut tidak disetujui. Akan tetapi besaran pinjaman tersebut kemudian dapat disesuaikan dengan kemampuan angsuran anggota.

Meskipun dalam kenyataannya pinjaman yang didapatkan anggota harus disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengangsur, terkadang masih ada anggota yang tidak bisa memenuhi angsuran pada saat pertemuan kelompok berlangsung. Hal tersebut bisa saja terjadi karena seseorang tidak selalu mempunyai sejumlah uang pada saat dibutuhkan. Permasalahan seperti inilah yang kemudian diatasi dengan Sistem Tanggung Renteng (STR). Anggota lain dalam kelompok yang sama berkewajiban untuk membantu anggota yang tidak mampu membayar angsuran. Secara teknis tidak serta merta STR diwujudkan dengan cara anggota mengeluarkan uang lebih untuk memberikan bantuan pada saat dibutuhkan (pada saat pertemuan kelompok). Akan tetapi pada setiap pertemuan kelompok, anggota selain diwajibkan untuk membayar angsuran, anggota juga diwajibkan untuk membayar kas kelompok. Kas kelompok inilah yang nantinya dipergunakan untuk membantu anggota yang tidak mampu membayar angsuran pada saat dibutuhkan. Pada saat pertemuan itu pula bagi anggota yang tidak mampu mengangsur menjanjikan waktu pelunasan pinjaman uang dari kas kelompok tersebut. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Puji berikut ini

.....biar nanti ndak..setiap ada yang nggak bayar terus “urunan” (patungan).. Itu ada dari kelompok itu punya kas TR, misalnya setiap anggota membayar seribu (Rp.1.000,-) per bulan. Jadi kalau ada yang nggak bayar diambilkan dari kas ini. Jadi lebih praktislah...(wawancara tanggal 5 Juli 2009 pukul 11.00-12.00 di Warung Serba Ada (Waserda)

Angsuran, simpanan dan besaran pinjaman yang telah disetujui kelompok, dicatat dalam formulir yang telah disediakan oleh koperasi. Bagi anggota yang

menginginkan pinjaman (karena tidak semua anggota dalam kelompok menginginkan pinjaman) maka formulir tersebut dibawa ke koperasi sebagai syarat bahwa anggota tersebut dapat mengambil uang pinjamannya. Pengambilan pinjaman tersebut bisa dilakukan keesokan harinya setelah diadakannya pertemuan kelompok. Begitu juga dengan angsuran dari anggota yang telah tercatat dalam formulir, keesokan hari setelah pertemuan kelompok harus segera disetorkan oleh PJ.

Pertemuan kelompok yang dilakukan di rumah Penanggung Jawab Kelompok ini tidak hanya sebagai wadah bagi anggota baik untuk melakukan simpanan, pinjaman maupun angsuran. Selain itu ada beberapa aktifitas lain yang dilakukan oleh anggota. Hal tersebut dapat diketahui pada susunan acara dalam pertemuan kelompok. Adapun susunan acara untuk setiap pertemuan kelompok adalah sama. Susunan acara tersebut meliputi

1. Pembukaan
2. Doa
3. Menyanyi Mars KSU SBW
4. Penyampaian informasi dari PJ kepada anggota yang lain. (organisasi, pendidikan, keuangan dan waserda)
5. Penyampaian informasi dari PPL kepada anggota (mungkin informasi dari PJ kurang lengkap)
6. Musyawarah untuk menyepakati pinjaman yang akan dilakukan oleh anggota.
7. Penutup

Sebelum pertemuan kelompok diselenggarakan, pada tanggal 5 Penanggung Jawab (PJ) dari semua kelompok hadir dalam pertemuan yang diadakan di koperasi. Pertemuan ini dinamakan Pertemuan Kelompok-kelompok Binaan (K2B). Disini PJ mendapatkan informasi dari PPL yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke anggota lain saat pertemuan kelompok. Informasi yang disampaikan terutama masalah kondisi keuangan koperasi. Hai tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuni sebagai berikut :

..Setiap tanggal 5 seluruh Penanggung Jawab kita undang ke koperasi. PJ akan mendapatkan informasi-informasi terutama terkait keuangan yang disampaikan oleh PPL..masalah biaya kan sensitif sekali ya....(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 10.00.11.00 di Ruang Koordinator Usaha)

Selain pemberian informasi, dalam pertemuan ini juga menjadi wadah bagi PJ dan PPL untuk memberikan kritik atau saran terhadap pelayanan koperasi seperti yang diungkapkan juga oleh Ibu Yuni.

...di pertemuan K2B pengurus memberikan kebebasan bagi PJ untuk... utamanya bagaimana sih kita selaku pelaksana, pelayanannya seperti apa. Itu setiap bulan mengungkapkan PJ menyampaikan keluhan atau kritik atas pelayanan dari koperasi...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 10.00.11.00 di Ruang Koordinator Usaha)

Saat pertemuan kelompok yang diadakan rutin setiap bulan tidak hanya sebagai wadah kelompok untuk melakukan simpanan, pinjaman, angsuran dan pemberian informasi saja. Tetapi pertemuan ini juga sebagai salah satu wadah bagi anggota untuk menyalurkan aspirasinya selain melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penyaluran aspirasi anggota akan menunggu lama jika wadahnya hanya saat diselenggarakannya RAT. Hal tersebut karena RAT dilakukan satu tahun sekali. Selain itu tidak semua anggota bisa hadir dalam RAT, hanya PJ dan Asisten PJ yang bisa hadir dalam RAT. Oleh karena itu pertemuan kelompok sangat besar artinya bagi para anggota. Anggota dapat mengungkapkan keluhan, saran ataupun kritik kepada koperasi baik yang ditujukan kepada karyawan, pengurus dan pengawas atau yang ditujukan dalam hal pelayanan dan fasilitas yang disediakan untuk anggota. Setiap aspirasi dari anggota ditulis dalam suatu buku yang dinamakan Buku Penghubung. Buku Penghubung ini yang nantinya diberikan kepada Pengurus pada setiap bulan. Hal ini diungkapkan juga oleh Ibu Nur berikut ini

...Pertemuan-pertemuan rutin seperti ini juga menampung aspirasi anggota...selain itu ada Buku Penghubung yang diisi anggota mengenai keluhan atau lain-lain yang setiap bulan dikasih ke pengurus....(Wawancara dengan Ibu Nur, Penanggung Jawab Kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009 pukul 15.00-16.00 di Rumah Ibu Nur)

Kelompok Harian atau Mingguan

Kelompok harian atau mingguan ini biasa disebut sebagai Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK). Jumlah anggota dalam setiap kelompok dibatasi yaitu 3-5 orang. Sesuai dengan namanya, anggota dari KPPK ini ditujukan untuk para pedagang atau pengusaha skala kecil baik itu seorang laki-

laki ataupun perempuan dalam hal pemberian modal. Anggota dari KPPK misalnya para pemilik usaha kelontong, “mlijo” (penjual sayuran, daging, lauk pauk yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling), produsen tahu, produsen tempe dan produsen jamu. Selain memiliki usaha, syarat yang lain untuk menjadi anggota KPPK yaitu membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Besaran simpanan yang harus dibayar untuk simpanan pokok sejumlah Rp.100.000,-, simpanan wajib minimal sejumlah Rp. 100.000,- dan untuk besaran simpanan manasuka tidak ada ketentuan batas.

Sebenarnya keberadaan KPPK ini juga mempunyai tujuan untuk menghindarkan para pedagang ataupun pengusaha kecil dari jeratan sistem yang diterapkan oleh “Bank Thithil” (Bank Harian). Jasa pinjaman yang ditawarkan KPPK lebih rendah daripada jasa pinjaman dari Bank Thithil. Jasa Pinjaman dari KPPK sebesat 3-4 %. Sedangkan jasa pinjaman yang diberlakukan oleh “Bank Thithil” terlalu tinggi dan memberatkan para pedagang ataupun pengusaha kecil yaitu sekitar 5-10% bahkan ada yang hingga mencapai 30 %. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibu Titin berikut :

.....Dulu mas saya juga ikut Bank Thithil, tetapi setelah masuk KSU SBW saya sudah tidak ikut lagi. Jasa pinjaman yang dikenakan Bank Thithil terlalu memberatkan bisa sampai 30 %....(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160)

Status keanggotaan dalam KPPK ada 2 yaitu calon anggota dan anggota. Calon anggota yaitu seseorang yang berkeinginan masuk menjadi anggota yang telah diperiksa identitas dan tingkat usahanya oleh pihak dari koperasi akan tetapi belum melunasi simpanan pokok. Sedangkan Anggota yaitu seseorang yang telah diperiksa identitas dan tingkat usahanya oleh pihak koperasi dan telah melunasi simpanan pokok. Berbeda dengan kelompok bulanan meskipun calon anggota KPPK belum melunasi simpanan pokok, mereka bisa mendapatkan pinjaman. Hal ini bukan berarti seseorang tersebut tidak berupaya untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Akan tetapi untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran yang rutin dibayarkan (2-3 bulan sekali) sudah mencakup simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Baik bagi calon anggota maupun anggota, awal

pinjaman dibatasi minimal sejumlah Rp.300.000,- dan maksimal sejumlah Rp. 500.000,-. Akan tetapi terdapat pengecualian, jika tingkat kemampuan mengangsur anggota diperkirakan nantinya tidak mampu memenuhi pinjaman sejumlah Rp.300.000 ribu maka anggota bisa melakukan pinjaman di bawah Rp.300.000,-. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Didik, Penanggung Jawab KPPK dan Simpanan Non Tanggung Renteng (NTR).

.....Kita ada batasan jumlah pinjaman untuk anggota baru minimal Rp.300.000,- ribu maksimal Rp.500.000,- Itupun tidak mutlak harus mengambil seperti itu, apabila tingkat kemampuan ini di bawah Rp.300.000,-, mereka bisa mengambil pinjaman di bawah Rp.300.000,- ... (wawancara dengan Bapak Didik pada tanggal 12 Agustus 2009 pada pukul 09.30-10.30 di ruang KPPK)

Jumlah kelompok KPPK hingga tahun 2009 terdapat 122 kelompok atau 584 orang. Jumlah 122 kelompok tersebut tersebar di wilayah Malang Raya (Kota Malang dan Kabupaten Malang). Akan tetapi mayoritas anggota berasal dari Kota Malang. Seperti halnya Kelompok Bulanan, di dalam KPPK juga terdapat seorang Penanggung Jawab (PJ) dan terdapat juga pertemuan kelompok (pertemuan antar anggota dalam kelompok). Akan tetapi ada perbedaan dengan Kelompok Bulanan, pertemuan kelompok dalam KPPK dilaksanakan 2-3 bulan sekali. Angsuran dan pemberian pinjaman dilakukan langsung pada saat pertemuan tersebut tanpa harus pergi ke koperasi. Dalam hal ini Pembina Penyuluh Lapang (PPL) sebagai pihak yang menyalurkan langsung uang pinjaman dari koperasi kepada anggota pada saat pertemuan kelompok (di rumah PJ).

Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota KPPK juga dibantu oleh koperasi. Setiap 6 bulan sekali diadakan pertemuan PJ di koperasi. Pertemuan ini selain dihadiri oleh semua PJ juga dihadiri oleh Petugas KPPK beserta Pengurus. Dalam pertemuan PJ ini dibahas permasalahan anggota KPPK misalnya mengenai permasalahan simpan pinjam atau permasalahan yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha. Sebelum hadir dalam pertemuan 6 bulan sekali tersebut, terlebih dahulu PJ mengakomodir permasalahan-permasalahan anggota. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disampaikan oleh PJ kepada anggota yang lain secara langsung. Penyampaian informasi ini mudah

dilakukan karena PJ dan anggota lain setiap hari bertemu (lokasi kerja berdekatan).

Jika anggota KPPK pada suatu saat menginginkan untuk pindah dan bergabung dengan Kelompok Bulanan, hal tersebut bisa dilakukan. Persyaratan masuk sebagai anggota dari Kelompok Bulanan harus dipenuhi. Persyaratan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu meliputi anggota harus tergabung dalam kelompok (minimal 15 orang, maksimal 40 orang). Selain itu calon anggota juga diharuskan untuk membayar terlebih dahulu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Besaran simpanan pokok yaitu Rp.100.000,-, sedangkan besaran simpanan wajib minimal Rp.10.000,- dan besaran simpanan manasuka maksimal Rp.5.000.000,-. Berpindahnya anggota KPPK ke dalam Kelompok Bulanan secara otomatis tidak ada kewajiban lagi bagi PPL (petugas KPPK) terhadap anggota yang pindah tersebut karena PPL untuk KPPK dan Kelompok Bulanan berbeda.

b. Program Simpanan

Program Simpanan ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatur dan memanfaatkan pendapatan yang telah dimiliki sesuai kebutuhan. Program Simpanan terbagi menjadi 4 yaitu Simpanan untuk Pendidikan (Simpati), Simpanan Manasuka Harian (Simara), Simpanan untuk Idul Fitri atau Natal (Sifina) dan Deposito Berjangka.

Beberapa dari Program Simpanan ini terkecuali Deposito Berjangka diperuntukkan baik bagi anggota maupun non anggota koperasi. Deposito Berjangka hanya diperuntukkan bagi anggota. Masing-masing bagian dari Program Simpanan ini memiliki beberapa ketentuan baik dari segi waktu pengambilan maupun batasan besaran simpanan :

- Simpanan untuk Pendidikan (Simpati), masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini dapat menyimpan uangnya dengan nominal minimal sebesar Rp.10.000,-. Sedangkan untuk penarikan atau pengambilan simpanan tersebut hanya dapat dilakukan 1 tahun sekali yaitu pada saat Tahun Ajaran Baru. Hal ini pada dasarnya karena Simpati diadakan untuk memberikan

fasilitas bagi masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan untuk anak.

- Simpanan Manasuka Harian (Simara), simpanan ini merupakan program simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mempersiapkan biaya untuk kebutuhan yang mendadak. Simpanan Manasuka Harian (Simara) ini dapat diambil sewaktu-waktu dan untuk minimal nominal simpanan yaitu sebesar Rp. 10.000,- dan maksimal saldo Rp.25.000.000,-.
- Simpanan Idul Fitri atau Natal (Sifina), simpanan ini merupakan program simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mempersiapkan biaya untuk kebutuhan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Natal. Minimal nominal dari simpanan ini yaitu sebesar Rp.10.000,- sedangkan untuk pengambilan simpanan dapat dilakukan menjelang Hari Raya (Idul Fitri atau Natal).
- Deposito Berjangka, program simpanan ini biasanya dimanfaatkan bagi anggota yang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Minimal nominal simpanan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.1.050.000.000,-. Sedangkan untuk pengambilan deposito dibatasi setelah jangka waktu kontrak. Jangka waktu kontrak untuk deposito ini yaitu selama 6 bulan. Sebelum jangka waktu kontrak, deposito tidak bisa diambil.

c. Program Pinjaman

Program Pinjaman ini diperuntukkan bagi masyarakat umum (baik anggota maupun non anggota koperasi. Koperasi Setia Budi Wanita menamakan program ini dengan sebutan Program Non Tanggung Renteng (NTR). Pada awalnya diselenggarakannya Program NTR dilatarbelakangi oleh kebutuhan pinjaman anggota yang tidak sepenuhnya terpenuhi di dalam Kelompok Bulanan. Pinjaman yang dilakukan di Kelompok Bulanan terbatas dengan adanya plafon. Padahal biasanya kebutuhan anggota tidak hanya sebatas besaran pinjaman yang bisa didapatkan dari Kelompok Bulanan tersebut. Kebutuhan anggota yang dimaksud salah satunya yaitu kebutuhan untuk modal usaha. Usaha yang dimiliki oleh anggota tidak selamanya mengalami stagnan. Usaha yang semakin berkembang membutuhkan modal yang juga semakin meningkat. Hal tersebut kemudian

membuat Program NTR ini yang menjadi pilihan dalam mendapatkan modal tambahan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Woro

..Disini ada namanya NTR..NTR itu Non Tanggung Renteng...untuk pinjaman ini ada agunannya kayak BPKB dan sertifikat tanah. NTR ini biasanya untuk orang yang butuh dana besar, umpamanya butuh berapa gitu..kalau misal pedagang masih kurang modal, mungkin di kelompok pinjamannya masih kurang untuk modal.. (wawancara dengan Ibu Woro, Penanggung Jawab Kelompok 36 pada pukul 09.30-10.00 di KSU SBW)

Pinjaman yang didapatkan dari Program NTR mensyaratkan adanya jaminan yang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat tanah baik bagi anggota maupun non anggota. Selain jaminan tersebut, calon peminjam juga harus menyertakan slip gaji sebagai media bagi petugas NTR untuk mengetahui kemampuan besaran angsuran calon peminjam. Bagi calon peminjam yang tidak memiliki gaji, misalnya karena calon peminjam adalah seorang wirausaha maka petugas NTR perlu melakukan survey lapangan.

.....Bagi umum bisa menggunakan fasilitas NTR kalau ada referensi dari anggota..selain itu kita juga harus turun lapangan untuk menganalisa usaha si pemohon misal untuk mengetahui pendapatannya berapa, pangsa pasarnya dan kira-kira kemampuan angsurannya seperti apa... (wawancara dengan Bapak Didik pada tanggal 12 Agustus 2009 pada pukul 09.30-10.30 di ruang KPPK)

Setelah diketahui kemampuan besaran angsuran dan nilai jaminan kemudian petugas NTR menentukan jangka waktu angsuran (maksimal 2 tahun) dan besaran pinjaman yang akan didapatkan oleh calon peminjam. Oleh karena itu tidak selalu besaran pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam akan dipenuhi. Besaran pinjaman tersebut tergantung atau disesuaikan dengan kemampuan angsuran dan nilai jaminan calon peminjam.

Bagi anggota koperasi yang memanfaatkan program pinjaman ini, angsuran merupakan tanggung jawab pribadi atau tidak dapat dibantu oleh anggota lain dengan cara tanggung renteng. Hal ini karena program ini sama sekali tidak terkait dengan Kelompok Bulanan ataupun Kelompok Harian/Mingguan. Bagi pihak di luar anggota koperasi yang menginginkan pinjaman dari program ini, selain harus memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak tersebut juga harus mendapatkan rekomendasi dari anggota koperasi (penjamin). Program NTR ini memberikan memberikan jasa

angsuran yang lebih rendah bagi anggota yaitu sebesar 4 % sedangkan bagi non anggota dikenakan jasa angsuran 4,5%.

2. Pelatihan-pelatihan

Program Simpanan dan Pinjaman merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi. Bentuk lain yang bisa dilakukan dalam hal pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur dan memanfaatkan pinjaman atau pendapatan untuk kegiatan produktif. Peningkatan kemampuan tersebut bisa dilakukan melalui cara diadakannya pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini bisa meliputi pelatihan khusus (bagi pengurus, pengawas, PPL dan PJ), pelatihan ketrampilan dan pelatihan wirausaha. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Indung terkait dengan diselenggarakannya pelatihan oleh KSU SBW :

...Supaya dengan pelatihan yang diberikan itu dapat menambah pengetahuan anggota. Sehingga dengan begitu anggota bisa mempraktekan, dapat duit dan kesejahteraan bertambah. Itu memang pelatihan arahnya ke sana... (wawancara dengan Ibu Indung, Pengawas, pada tanggal 10 September 2009 pukul 13.00-14.00, di Rumah Ibu Santoso, PJ Kelompok)

Hal yang serupa diungkapkan juga oleh salah satu pengurus yaitu Ibu Sofyan mengenai arahan dari KSU SBW kepada anggota agar anggota mengaplikasikan pelatihan yang didapatkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sofyan sebagai berikut :

....Kan kami mengadakan pelatihan juga di aula KSU SBW, sebelum pelatihan dimulai, acara dibuka oleh pengurus. Kebetulan bidang pendidikan adalah saya maka terlebih dahulu pada saat pembukaan acara, saya menjelaskan kepada anggota mengenai tujuan diadakan pelatihan tersebut dan mengarahkan agar anggota bisa dapat uang untuk menambah pendapatan rumah tangga dari pelatihan yang diikuti...(wawancara dengan Ibu Rieni S. Sofyan, Ketua II KSU SBW pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 10.00-11.00 WIB di KSU SBW)

Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh anggota harus dilaporkan. Setiap anggota yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan harus membuat laporan. Laporan tersebut digunakan pengurus sebagai alat evaluasi, seperti yang diungkapkan Ibu Sofyan beriku ini :

...Setiap anggota yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan harus membuat laporan mengenai pelatihan tersebut. Dari laporan yang ada tersebut digunakan pengurus sebagai alat pemantauan dan evaluasi... (wawancara dengan Ibu Rieny S. Sofyan, Ketua II KSU SBW pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 10.00-11.00 WIB di KSU SBW)

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota KSU SBW mayoritas merupakan program yang diselenggarakan atas kerjasama KSU SBW dan pihak luar. Dari koperasi sendiri, pelatihan dilakukan oleh anggota yang mahir dalam suatu ketrampilan tertentu. Sedangkan dari pihak luar dilakukan kerjasama baik dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota koperasi akan tetapi dari beberapa pelatihan yang lain juga ada yang diperuntukkan bagi non anggota.

a. Pelatihan yang dilakukan KSU SBW tanpa kerjasama dengan pihak luar

Pelatihan Tanggung Renteng

Bagi setiap calon anggota yang akan masuk menjadi anggota harus menempuh pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan yang dimaksud adalah Pelatihan Tanggung Renteng. Pelatihan Tanggung Renteng ini diwajibkan bagi semua calon anggota yang akan menjadi anggota. Berikut ini keterangan lebih lanjut mengenai Pelatihan Tanggung Renteng yang dikemukakan oleh Ibu Puji :

....Kemudian untuk anggota baru diberikan pembinaan untuk mengenal betul tanggung renteng seperti apa..anggota mempunyai kewajiban dan hak apa saja. Itu berlangsung 1 bulan. Minggu ke 3 hari sabtu dan minggu (2 kali). Dilakukan oleh PPL dan Pak Dede, anggota koperasi yang diangkat sebagai staf ahli... (Wawancara dengan Bu PUji, Koordinator Waserda, pada tanggal 5 Agustus 2009, pada pukul 10.00-11.00 WIB di Waserda)

Pelatihan Ketrampilan

Pelatihan ini merupakan pelatihan ketrampilan sulam pita yang pelatihnya adalah anggota koperasi sendiri yang mahir dalam ketrampilan tersebut. Pelatihan ketrampilan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota ini baru diselenggarakan pada tahun 2009. Pada tahun-tahun sebelumnya semua pelatihan ketrampilan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar. Akan tetapi dengan

adanya pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh anggota merupakan sebuah bentuk kepercayaan diri KSU SBW bahwa untuk beberapa pelatihan ketrampilan saja tanpa kerjasama dengan pihak luar pun KSU SBW bisa melaksanakan.

Anggota yang menjadi pelatih dalam kegiatan ini adalah seorang wirausaha yang bergerak dalam bidang ketrampilan sulam yang bernama Ibu Titin. Sulaman yang telah dihasilkan mampu merambah pasar domestik dan pasar internasional (Australia). Kemampuan sulam didapatkan Ibu Titin selain dari belajar secara otodidak, juga dari keikutsertaannya (perwakilan dari KSU SBW) dalam suatu Pelatihan Wirausaha Muda yang pernah diselenggarakan di Bandung. Ternyata kemampuan yang telah didapatkan anggota tersebut kemudian difasilitasi oleh KSU SBW untuk ditularkan ke anggota yang lain.

Pelatihan ini dapat diikuti semua anggota yang mempunyai minat untuk ikut serta. Semua peralatan untuk pelatihan disediakan oleh koperasi. Akan tetapi biaya pengadaan peralatan menjadi tanggung jawab anggota. Pelatihan ini diselenggarakan di aula KSU SBW selama 12 hari. Masing-masing Kelompok-kelompok Binaan (K2B, 1 K2B= 12-13 kelompok) diberi jatah satu kali pelatihan yaitu selama 2 jam dalam sehari. Selama 12 hari pelatihan tidak dilaksanakan secara berturut-turut karena tidak mungkin aula koperasi hanya digunakan untuk pelatihan itu saja. Aula koperasi biasanya juga digunakan untuk tempat latihan paduan suara anggota atau tempat pertemuan rutin PJ dan PPL. Akan tetapi dalam satu minggu pelatihan ini bisa dilakukan 2-3 kali. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Titin sebagai berikut :

...Alat-alatnya lembaga yang menyediakan, ibu-ibunya yang mengganti biaya alat-alat tadi. Untuk biaya kursus gratis. Untuk masalah waktu loncat-loncat karena aula tempat pelatihan biasanya digunakan untuk pertemuan K2B juga..ini sekarang berhenti karena puasa, nanti setelah lebaran dilanjutkan. Dua minggu yang lalu sudah sempet jalan, satu minggunya kurang lebih 2-3 kali..masing-masing K2B dapat jatah sehari....(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160))

Beberapa anggota yang telah ikut serta, ada beberapa yang kemudian meminta secara personal kepada Ibu Titin untuk melatih secara privat. Hal tersebut karena anggota belum puas dengan pelatihan yang dirasakan terlalu singkat. Selain itu ada juga anggota yang berminat untuk mengadakan pelatihan

yang serupa di kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan meminta kesediaan Ibu Titin untuk menjadi pelatihnya.

b. Pelatihan yang dilakukan KSU SBW melalui kerjasama dengan pihak luar

Kerjasama dengan Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati)

Puskowanjati merupakan koperasi sekunder yang menaungi koperasi-koperasi wanita di Jawa Timur yang menggunakan Sistem Tanggung Renteng. Puskowanjati ini juga memiliki unit usaha yang tidak jauh berbeda dengan koperasi-koperasi primer yang dinaunginya yaitu unit usaha simpan pinjam. Salah satu koperasi primer yang di bawah naungannya adalah KSU SBW. Terdapat sedikit perbedaan dengan koperasi primer terkait mengenai anggota. Anggota dari Puskowanjati berupa koperasi, yaitu koperasi-koperasi wanita yang ada di Jawa Timur. Setiap bulannya koperasi primer juga membayar simpanan kepada Puskowanjati dan selain itu juga mempunyai hak untuk melakukan pinjaman dengan waktu yang ditentukan oleh koperasi primer sendiri. Terdapat juga plafon yang membatasi pinjaman koperasi primer kepada Puskowanjati.

Kerjasama antara KSU SBW dengan Puskowanjati sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Kerjasama dalam hal pelatihan dan konsultasi yang dilakukan Puskowanjati dengan KSU SBW diperuntukkan baik bagi pengurus, pengawas, PPL maupun karyawan. Pelatihan ini diselenggarakan setiap satu bulan sekali. Penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi ini dilaksanakan secara bergantian untuk pengurus, pengawas, PPL dan karyawan di setiap bulannya. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibu Yuni dalam kutipan wawancara sebagai berikut

.....Kita bekerjasama dengan Puskowanjati sudah lama Mas, yang pasti ya sudah puluhan tahun. Setiap bulan kita selalu mendapatkan pelatihan dari Puskowanjati. Pelatihan itu untuk para pengurus, pengawas, PPL dan karyawan. Dalam pelatihan itu kita juga mengungkapkan permasalahan kita di koperasi terkait masalah pekerjaan...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 23 November 2009, pukul 11.30-12.00 di Ruang Koordinator Usaha)

Kerjasama dengan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Kota Malang

Pelatihan yang diselenggarakan atas kerjasama KSU SBW dengan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) adalah wujud anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan kepada koperasi. Oleh karena itu anggota koperasi yang mengikuti pelatihan ini tidak dikenakan biaya sedikitpun. Pelatihan dari Balatkop ini dilakukan setiap tahun sekitar pada Bulan Juni atau Bulan Juli. Pelatihan ini biasanya dilakukan hingga 1-3 kali. Pada Bulan Juni atau Bulan Juli merupakan agenda tahunan dari Balatkop untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dengan Koperasi Gerakan. Sebenarnya jenis koperasi juga bisa dibedakan menjadi 2 yaitu Koperasi Fungsional dan Koperasi Gerakan. Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita adalah salah satu Koperasi Gerakan yang berada di Kota Malang.

Paket pelatihan yang disediakan oleh Balatkop untuk setiap tahunnya biasanya adalah berupa paket pelatihan khusus. Paket pelatihan khusus dalam arti bahwa paket pelatihan yang diberikan berisi materi sesuai bidang ilmu atau bidang pekerjaan yang digeluti oleh peserta. Paket pelatihan tersebut misal paket pelatihan yang dikhususkan untuk bendahara, koordinator usaha, pengawas dan para anggota yang mempunyai usaha. Paket pelatihan yang menawarkan kuota peserta yang banyak yaitu paket pelatihan wirausaha. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yuni berikut ini :

...Pernah pelatihan untuk pengusaha, itu yang lebih banyak. Jadi wanita yang bergerak di bidang usaha yang kisarannya di apa ini, itu mendapatkan kesempatan pelatihan di Balatkop. Biasanya mereka (Balatkop) mintanya banyak sampai dengan 10 orang...kalau untuk pelatihan tadi untuk keuangan atau akuntansi paling banyak 2 orang yang diberikan kesempatan balatkop untuk kita.. (wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

Dalam menentukan anggota-anggota yang akan dikirimkan oleh KSU SBW khususnya untuk paket pelatihan wirausaha, Koordinator Usaha akan melakukan diskusi dengan PPL. Setelah itu PPL kemudian meminta kesediaan keikutsertaan kepada anggota yang ditunjuk. Mulai tahun 2009 pelatihan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota (anggota selain pengurus, pengawas dan karyawan).

Kalau saat ini (tahun 2009) kita lebih banyak minta pelatihan untuk anggota dari Balatkop, kalau kami dari karyawan kita sudah satu bulan sekali didatangkan konsultan. Kira-kira apa yang dibutuhkan kita terus permasalahan seperti apa yang kita hadapi. Hasil dari temuan konsultan ini nanti didiskusikan dengan pengurus. Konsultan ini dari Puskowanjati (wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

Sebelum tahun 2009, setiap tahunnya materi pelatihan yang ditawarkan dari Balatkop merupakan inisiatif dari Balatkop sendiri tanpa ada pertimbangan inisiatif dari koperasi. Selain itu materi pelatihan dari Balatkop lebih berdasarkan teori. Sedangkan untuk tahun 2009 Balatkop lebih membuka diri, artinya materi yang akan diberikan Balatkop disesuaikan dengan kebutuhan anggota koperasi. Balatkop juga mulai bekerjasama dengan pihak lain (praktisi) sebagai pelatih misalnya dari tokoh akademis ataupun tokoh dari gerakan koperasi. Sebelum tahun 2009 juga Balatkop membuat modul yang isinya dari pertimbangan mereka sendiri, sedangkan yang akan dikembangkan untuk tahun 2010, modul yang dibuat Balatkop lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil anggota koperasi.

Pada tahun 2009 KSU SBW sudah mengirmlkan 30 anggotanya untuk berpartisipasi dalam pelatihan usaha melalui kerjasama dengan Balatkop. Pelatihan itu dilaksanakan selama 1 minggu. Dalam pelatihan tersebut dihadirkan Pengusaha Roti sebagai pelatih. Dalam pelatihan, Pengusaha Roti melakukan bercerita mengenai pengalamannya menjadi pengusaha roti. Selain itu dalam pelatihan yang sama para peserta pelatihan juga diminta untuk praktek membuat roti. Praktek pembuatan roti tersebut kemudian di evaluasi dan didiskusikan dalam pelatihan tersebut.

Kerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

Kota Malang

Berbeda dengan pelatihan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balatkop, pelatihan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) tidak rutin setahun sekali. Kerjasama dengan Dekopinda ini dilaksanakan sekitar 2-3 tahun sekali. Anggaran dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan berasal dari iuran yang ditarik dari koperasi-koperasi. Anggota koperasi yang diikutkan pelatihan ini juga terbatas,

sekitar 10-15 orang dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam menentukan anggota-anggota yang akan dikirimkan oleh KSU SBW khususnya untuk pelatihan wirausaha, Koordinator Usaha akan melakukan diskusi dengan PPL. Setelah itu PPL kemudian meminta kesediaan keikutsertaan kepada anggota yang ditunjuk.

...Kita sesuaikan dengan penawaran pendidikan dari pihak luar. Orang pertama yang pasti kita ajak bicara adalah PPL. PPL kan paham betul...ooo. di kelompok ini ada ini, di kelompok ini spesialisnya catering, kelompok ini spesialisnya makanan kering, makanan basah, nasi kuning disini. Itu tu PPL paham semua...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

Pelatihan dari Dekopinda lebih diarahkan pada manajemen usaha yang meliputi penghitungan biaya usaha dan langkah-langkah pengusaha dalam menjalankan usahanya. Selama ini untuk pelatihan manajemen usaha sudah dilakukan hingga 3 angkatan. Pelatihan ini dilaksanakan 1-3 tahun sekali. Satu kali pelaksanaan dilakukan kurang lebih selama 10 hari. Pelatihan ini tidak hanya berkisar penyampaian teori akan tetapi terdapat diskusi dengan pengusaha yang didatangkan. Hasil dari diskusi kemudian dibuktikan dengan turun ke lapangan, dan hasil temuan di lapangan juga kembali didiskusikan.

Selain pelatihan manajemen usaha, terdapat juga pelatihan yang ditujukan kepada pengurus, pengawas, karyawan dan bahkan PPL. Misalnya pelatihan yang pernah diikuti oleh Ibu Yuni, Koordinator usaha selama 10 hari. Dalam pelatihan tersebut peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberikan suatu permasalahan mengenai organisasi, keuangan maupun pengawasan. Selain itu Ibu Jujun, salah satu PPL pernah mengikuti pelatihan khusus pelatihan PPL. Beberapa waktu kemudian ketika Dekopinda menyelenggarakan pelatihan khusus PPL lagi, Ibu Jujun direkrut untuk menjadi pelatih.

Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Malang

Pelatihan ketrampilan menjadi agenda KSU SBW setiap tahun. Dalam setahun, KSU SBW biasanya mengikutsertakan sekitar 30-40 anggota untuk pelatihan ketrampilan. Pelatihan ketrampilan tersebut meliputi ketrampilan

menjahit, tata rias dan tata boga. Para anggota yang ikut serta dalam hal ini tidak semuanya mempunyai orientasi untuk mengaplikasikan ketrampilannya untuk berwirausaha. Beberapa anggota mempunyai tujuan sekedar untuk meningkatkan ketrampilannya misal dalam hal memasak. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Jujun sebagai berikut :

...Terus yang kerjasama dengan BLK itu menjahit, saya kebetulan ikut. Saya sudah sudah bisa menjahit, buat baju sendiri bisa. Tapi karena saya kepingin tahu kalau buat mal atau pola itu ooo..seperti ini ya . Itu lama 40 hari, masuk senin sampai jumat.... (wawancara dengan Ibu Jujun, PPL pada tanggal 25 Agustus 2009, pukul 12.10-13.20 WIB di ruang Koordinator Usaha)

Setiap tahunnya pelatihan tidak selalu dilatih dengan pelatih yang sama. Bahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2008, KSU SBW melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari, Malang dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Malang untuk menyelenggarakan pelatihan ketrampilan. Pelatihan yang dilakukan melalui kerjasama dengan BLK dilaksanakan selama 40 hari (senin-jumat) dan jumlah pesertanya terbatas. Pelatihan ini tidak menghendaki pungutan biaya kepada para peserta. Dalam hal ini BLK telah menyediakan tenaga pengajar, bahan untuk prakek dan biaya-biaya lain.

Sedangkan untuk pelatihan yang dilakukan melalui kerjasama dengan SMK jumlah peserta tidak terbatas hanya saja, peserta dikenakan biaya. Bagi anggota koperasi yang berminat untuk ikut serta akan tetapi tidak mampu membayar tunai maka KSU SBW memberikan pinjaman untuk mereka. Anggota tersebut dapat mengangsur biaya pelatihan tersebut ke koperasi, dan KSU SBW membayar tunai biaya pelatihan kepada SMK. Sebelum memberikan pinjaman, KSU SBW memeriksa terlebih dahulu kemampuan mengangsur anggota tersebut. Sedangkan bagi anggota yang mampu membayar tunai biaya pelatihan maka KSU SBW hanya menjembatani anggota tersebut dengan SMK, misalnya dalam hal pembayaran pelatihan atau informasi-informasi lain. Pada tahun 2009 KSU SBW tidak memberikan fasilitas pinjaman untuk dapat mengikuti pelatihan dari SMKN 1 Malang.

...Kerjasama dengan SMKN 1 dekat MOG (Malang Olympic Garden) untuk tahun 2009 tidak ada fasilitas pinjaman karena harganya semakin tinggi disana, anggota juga banyak yang keberatan, tahun lalu ndak

masalah,. Untuk pelatihan kecantikan saja 1,5 juta .Akhirnya tahun ini kita tidak kerjasama lagi. Tapi tahun-tahun sebelumnya berjalan terus... (Wawancara dengan Ibu Yuni pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di ruang Koordinator Usaha)

Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kerjasama dengan LSM yang didanai oleh *International Labour Organization* (ILO) ini diperuntukkan bagi para mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah kembali ke Indonesia. Kerjasama ini baru dilakukan pada tahun 2009 dan telah berjalan beberapa bulan. Kerjasama antara KSU SBW dengan LSM ini mengarahkan para mantan TKI untuk melakukan kegiatan produktif atau berwirausaha supaya tidak kembali menjadi TKI lagi.

Awal dari hubungan kerjasama dengan LSM tersebut yaitu karena lolosnya PPL yang dikirim KSU SBW dalam sebuah *Training of Trainer* (TOT) yang diselenggarakan oleh ILO bersama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibu Jujun.

...Saya kapan itu, Desember tahun kemarin (2008) disuruh untuk menghadiri TOT di Surabaya.selama seminggu. Disitu ada penilaian dan saya masuk 4 besar. Akhirnya saya disuruh melatih di Donomulyo dan Blitar. Pelatihan lebih fokus ke kewirausahaan. Ada modulnya mas, jadi modul itu yang saya sampaikan. Isi dari modul itu pelatihan mulai dari membuat suatu usaha sampai pemasaran. Ada sharing juga dari pengalaman usaha mantan TKI tersebut.... (wawancara dengan Ibu Jujun, PPL pada tanggal 25 Agustus 2009, pukul 12.10-13.20 WIB di ruang Koordinator Usaha).

Kerjasama dengan Yayasan Damandiri

Kerjasama KSU SBW dengan Yayasan Damandiri merupakan bentuk kerjasama pemberdayaan ekonomi dengan mengarahkan target sasaran untuk dapat membentuk sebuah koperasi wanita atau bergabung dengan koperasi wanita yang sudah berdiri. Target sasaran yaitu para peserta Keluarga Berencana (KB). Kerjasama ini merupakan bagian dari program yang dicetuskan oleh Yayasan Damandiri yaitu Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA). Program ini baru dirintis pada tahun 2009, KSU SBW sebagai pihak yang memberikan pelatihan

Sistem Tanggung Renteng (STR) dan mengawasi berjalanya program tersebut. Sedangkan Yayasan Damandiri sebagai penyandang dana dan pencetus program.

Yayasan Damandiri memilih KSU SBW sebagai rekan kerja dalam program POSDAYA ini dengan pertimbangan bahwa KSU SBW sudah berpengalaman lama dalam menjalankan koperasi dengan Sistem Tanggung Renteng. Selain itu KSU SBW juga diketahui sudah pernah mengalami masa jatuh dan bangkit dalam menjalankan koperasi. Akan tetapi sebelum PPL KSU SBW dipercayakan untuk turun lapangan dan memberikan pelatihan STR kepada peserta KB. PPL tersebut juga diharuskan untuk menjalani proses pendidikan yang diselenggarakan Yayasan Damandiri.

....kita sudah mengadakan pelatihan tempatnya juga di Unibraw. Pada Bulan Mei kemarin (tahun 2009). Itu ada sekitar 33 peserta dari ketua-ketua UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Mereka memang ditawarkan mau mendirikan koperasi sendiri atau bergabung dengan koperasi sudah ada. Mereka lebih condong, karena SBW sudah besar, mereka banyak bergabung kepada kami. Karena SBW sendiri juga menerapkan sistem tanggung renteng. Tetapi kalau mau mendirikan koperasi sendiri itu difasilitasi juga oleh Damandiri...(wawancara dengan Ibu Herni, Sekretaris I KSU SBW pada pukul 09.30-10.30 WIB di Ruang Sekretariat)

3. Pemasaran Produk yang Dihasilkan Anggota

Pemasaran sebuah produk merupakan hal yang dianggap paling penting bagi semua pengusaha. Jika produk sudah dihasilkan akan tetapi wilayah pasar sempit maka akan berakibat sedikitnya laba yang didapatkan atau justru mengalami kerugian. Berdasarkan hal ini KSU SBW tidak hanya memberikan pinjaman modal ataupun pelatihan ketrampilan, KSU SBW juga menyediakan fasilitas bagi anggotanya yang berwirausaha untuk memasarkan produknya. Fasilitas tersebut diwujudkan KSU SBW berupa Warung Serba Ada (Waserda), Bazaar dan Jaringan Kerja.

a. Warung Serba Ada (Waserda)

Warung Serba Ada atau biasa disingkat waserda merupakan salah satu unit usaha dari KSU SBW yang menyediakan beraneka ragam barang untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pemenuhan kebutuhan anggota yang dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi saja. Bagi para anggota yang

memiliki usaha, waserda juga bisa menjadi salah satu tempat untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan. Misalnya produk dari anggota yang dipasarkan yaitu makanan ringan dan pakaian. Penjualan produk dari anggota tersebut, Waserda hanya mengambil keuntungan 5% dari harga sebenarnya (harga dari anggota).

..Setiap harinya bisa nitip barang di waserda, pokoknya tidak sama dengan anggota yang lain. Kalau sudah ada yang nitip baju kita nitip yang lain, kalau sudah ada yang ini kita nitip yang lain. Waserda nanti cuma mengambil keuntungan yang dikit kok dari harga yang kita minta. Maisal kita minta Rp.100.000,- ribu. Mereka cuma Rp.105.000,- gitu ..5 persennya...(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160))

Dari sekian banyaknya produk yang dihasilkan oleh anggota, tidak semuanya bisa ditampung dalam waserda tersebut. Hal ini sehubungan dengan kebutuhan anggota yang beragam dan tidak bisa hanya dipenuhi dengan produk yang dihasilkan anggota. Oleh karena itu Waserda juga menjual produk yang dihasilkan non anggota (barang pabrikan).

Selain menjadi tempat pemasaran Waserda juga menjadi tempat bagi anggota yang memiliki usaha “pracangan” untuk mendapatkan barang yang akan dijual kembali. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puji sebagai berikut :

...Disini ada anggota yang punya usaha pracangan, ituambilnya..”kulakan”nya disini. Itu fasilitasnya pembayarannya 2 minggu, bisa dikirim. Misal tanggal 1 ngambil, tanggal 15 bayar. Kalau anggota yang punya usaha itu bisa ambil untuk pracangan maksimal 5 juta dengan syarat ada surat keterangan dari RT bahwa anggota yang terkait betul-betul punya usaha dan perlu diketahui juga oleh PJ dan PPL...(wawancara dengan Ibu Puji, Penanggung Jawab Waserda pada tanggal 5 Agustus 2009,pukul 10.00-11.00 WIB di Waserda)

b. Bazar

Berbeda dengan Waserda, keberadaan bazar tidak setiap hari. Akan tetapi bazar diadakan rutin setiap bulan yaitu mulai tanggal 8-15 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pada saat ulang tahun koperasi. Bazar juga merupakan pasar alternatif bagi anggota yang memiliki usaha tapi belum mempunyai kesempatan untuk memasarkan produknya di Waserda. Tempat bazar ini diadakan yaitu di sepanjang jalan depan KSU SBW.

Dalam Bazar ini, semua produk yang dijual adalah produk dari anggota. Produk hasil non anggota tidak diperkenankan untuk dijual dalam bazaar ini. Apabila ada anggota yang membeli barang dalam bazar lebaran ini secara kredit, hal tersebut diperkenankan bahkan akan dibantu oleh koperasi. Koperasi akan membayar tunai barang tersebut kepada penjual dan anggota yang menginginkan kredit bisa melakukan angsuran melalui waserda hingga 10 kali angsuran. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Titin berikut ini :

...Bazar lebaran, kalau nanti barang yang laku ya misalkan ya. Anggota yang beli minta 10 kali misalkan, bisa dibantu oleh lembaga berarti yang punya dagangan dibayar cash, anggota bayar ke lembaga, ke waserda, diangsur 10 kali. Dipermudah kalau untuk bazar lebaran. Pokoknya diketahui PJ dan PPLnya...(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160))

c. Jaringan Usaha

Jaringan usaha ini merupakan kegiatan koperasi dalam mendata usaha-usaha yang dimiliki anggota dan memanfaatkan data tersebut jika ada pesanan pasar. Adanya jaringan usaha ini biasanya dimanfaatkan juga oleh koperasi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ketika terdapat even koperasi misalnya adanya kunjungan studi banding dari pihak luar. Maka anggota yang mempunyai usaha catering akan dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut.

Selain ada anggota yang mempunyai catering, banyak juga anggota yang memiliki usaha salon seperti yang dijelaskan oleh Ibu Indung berikut ini

...Didata yang punya usaha, yang punya catering siapa saja, siapa yang kemudian yang punya usaha misalnya salon. Banyak anggota yang punya usaha salon dari pelatihan-pelatihan tersebut. Setiap kita punya even, itu dimanfaatkan. Tidak usah menggunakan jasa salon di luar, gunakan saja jasa salon anggota..(wawancara dengan Ibu Indung, Pengawas, pada tanggal 10 September 2009 pukul 13.00-14.00, di Rumah Ibu Santoso, PJ Kelompok)

Ada juga ketika anggota membutuhkan beberapa bahan untuk menyiapkan konsumsi untuk hajat misalnya beras, ayam dan tepung. Koperasi kemudian memberitahukan kepada anggota yang mempunyai usaha dagang beberapa produk yang dibutuhkan tersebut. Koperasi juga memberikan bantuan kepada anggota yang mempunyai hajat tersebut berupa tenggang waktu pembayaran beberapa

produk yang dibeli dari anggota selama satu minggu. Dalam hal ini koperasi membeli tunai produk-produk dari anggota yang mempunyai usaha tersebut.

4. Konsultasi Usaha

Sebenarnya penyediaan jasa konsultasi usaha tidak menjadi program kerja tersendiri dari KSU SBW. Jasa konsultasinya juga terbatas hanya menangani permasalahan perhitungan keuangan usaha. Akan tetapi pada kenyataannya, keberadaan jasa konsultasi ini bermanfaat bagi anggota. Dari beberapa anggota yang pernah menggunakan jasa ini diketahui bahwa anggota yang memiliki usaha belum mengerti sepenuhnya cara menghitung laba rugi dalam suatu usaha. Setelah melakukan konsultasi ternyata anggota menyadari bahwa ada beberapa variabel lagi yang perlu dicantumkan dalam menghitung laba rugi. Selama ini (hingga tahun 2009) anggota dapat menggunakan jasa konsultasi perhitungan keuangan usaha ini secara gratis.

5. Akses Pekerjaan dengan Upah yang Layak

Keberadaan KSU SBW merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja bagi penduduk Kota Malang. Pada tahun 2009 ini tercatat terdapat 43 tenaga kerja yang mengisi posisi jabatan dalam organisasi koperasi. Posisi jabatan tersebut meliputi pengurus sejumlah 5 orang, pengawas sejumlah 2 orang, karyawan sejumlah 24 orang dan Pembina Penyuluh Lapang (PPL) sejumlah 12 orang.

Jumlah nominal penghasilan baik pengurus, pengawas, karyawan dan PPL di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Jujun mengenai penghasilan penugurus, pengawas, PPL dan karyawan:

... misalnya untuk penghasilan pengurus dan pengawas disebut "Uang Kehormatan", penghasilan karyawan disebut "gaji" dan penghasilan PPL disebut "Uang Kompensasi". Kalau dikaitkan dengan UMR, penghasilan PPL, Insya Allah di atas UMR, di atas sedikit lah. Kalau Pengurus kan jelas di atas UMR. Kalau karyawan jelas Mas di atas UMR ada Jamsostek juga untuk mereka. PPL juga ada asuransi kecelekaan juga... (wawancara dengan Ibu Jujun, PPL, pada tanggal 6 September 2009, pukul 13.30-13.40 di Rumah Ibu Yeni)

Pada jangka waktu tertentu KSU SBW menyediakan kesempatan kerja lagi kepada masyarakat atau khususnya anggota koperasi untuk dapat mengisi posisi

jabatan yang kosong. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa ketentuan yang membatasi masa kerja masing-masing posisi jabatan dalam koperasi.

- Pengurus mempunyai masa jabatan selama 4 tahun. Setiap anggota mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi pengurus maksimal selama 3 periode berturut-turut. Batas usia pensiun pengurus yaitu di usia 65 tahun.
- Pengawas mempunyai masa jabatan selama 2 tahun. Setiap anggota mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi pengawas maksimal selama 3 periode. Batas usia pensiun pengawas yaitu di usia 65 tahun.
- Karyawan mempunyai masa kerja selama 4 tahun. Batas usia pensiun karyawan yaitu di usia 55 tahun.
- Pembina Penyuluh Lapang (PPL) mempunyai masa jabatan selama 3 tahun. Batas usia pensiun PPL yaitu di usia 55 tahun.

Beberapa cara yang diterapkan untuk mengisi posisi jabatan kosong dalam koperasi. Pertama, pemilihan pengurus dan pengawas oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kedua, pengadaan beberapa tes untuk melakukan penyeleksian calon karyawan. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan khusus bagi calon Pembina Petugas Lapang (PPL) untuk menjadi seorang PPL.

B. Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

- a. Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Kota Malang merupakan salah satu pihak dari pemerintah yang bekerjasama dengan KSU SBW dalam menyelenggarakan pelatihan profesi dan pelatihan kewirausahaan. Hal tersebut sejalan dengan kutipan wawancara dengan Ibu Yuni

...Anggaran pelatihan dari Dekopin berasal dari iuran koperasi makanya pelatihannya lebih singkat, kalau anggaran pelatihan dari Balatkop berasal dari anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah untuk koperasi makanya pelatihannya lebih lama...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha, pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 di Ruang Koordinator Usaha)

- b. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Malang. Dalam hal ini telah menyediakan tenaga pengajar, bahan untuk prakek, tempat dan biaya-biaya lain dalam menyelenggarakan pelatihan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu Yuni yang menceritakan bahwa KSU SBW bekerjasama dengan BLK sebagai pihak pemerintah :

...Untuk pelatihan ketrampilan dan usaha dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah mempunyai program-program untuk itu. Koperasi mengikutkan anggota yang mempunyai usaha untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut. Jika sifatnya kewirausahaan ya kerjasama dengan Balai Latihan Koperasi (Balatkop), jika sifatnya ketrampilan langsung kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha, pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 11.00-12.00 di Ruang Koordinator Usaha)

2. Swasta

- a. Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) tergolong pihak swasta. Dalam menjalankan usahanya KSU SBW juga mengambil keuntungan. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa orang. Hasil wawancara berikut ini berasal dari Ibu Nur, Ibu Titin dan Bapak Didik :

*...Alasan saya masuk SBW, karena SBW menawarkan **bunga yang ringan dalam pinjaman**, prosedur yang mudah untuk memperoleh pinjaman, terdapat pendidikan agama, ngaji bersama satu bulan sekali...Wawancara dengan ibu Nur, Penanggung Jawab Kelompok 155, pada tanggal 8 September 2009 pukul 15.15-15.45 di rumah Ibu Nur)*

*....Kalau di waserda pemasaran harian. Waserda hanya mengambil **sedikit keuntungan dari barang titipan** tersebut yaitu lima persen...(Wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160 pada tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 di Rumah Penanggung Jawab Kelompok 160)*

*...Kalau Simara (Simpanan Manasuka Harian) penarikan sewaktu-waktu ,nilai minimal sepuluh ribu maksimal saldo dua puluh lima juta. Kemudian untuk **bunga satu persen** tanpa biaya administrasi tanpa biaya pajak...(Wawancara dengan Bapak Didik pada tanggal 12 Agustus 2009 pukul 10.00-11.00 WIB, di Ruang Kerja)*

- b. PT. Perusahaan Nasional Mandiri (PNM) juga sebagai pihak swasta. Hal tersebut karena PT. PNM merupakan bentuk perseroan. Berikut ini adalah kutipan wawancara mengenai kerjasama KSU SBW dengan PT PNM yang diungkapkan oleh Ibu Yuni

...selain beberap tadi kita juga (KSU SBW) ada kerjasama lagi dalam bentuk pinjaman yaitu dengan PT Perusahaan Nasional Madani...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

- c. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) termasuk pihak swasta karena dalam kegiatannya, Puskowanjati mengambil keuntungan. Puskowanjati juga mempunyai unit usaha simpan pinjam dengan beranggotakan koperasi-koperasi primer. Dalam usaha simpan pinjam tersebut Puskowanjati juga mengenakan bunga pada anggotanya. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Yuni terkait kerjasama KSU SBW dengan Puskowanjati :

...Puskowanjati mengayomi koperasi mulai dari modal dan pembinaan. Setiap bulan koperasi SBW dan Puskowanjati melakukan komunikasi terkait dengan masalah pembinaan. Untuk setiap bulan pembinaan dilakukan bergantian missal bulan pertama pembinaan pengurus, bulan berikutnya , PPL , bisa pengawas, karyawan...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

- d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Malang dalam hal ini tergolong pihak swasta karena melakukan usaha komersial dalam hal penyediaan pelatihan ketrampilan untuk para anggota KSU SBW. Hal tersebut didasarkan pada kutipan wawancara yang menyatakan bahwa adanya biaya yang mahal untuk ikut dalam pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Malang

*.....Anggota yang menginginkan ketrampilan menjahit, memasak ataupun kecantikan difasilitasi pinjaman (diangsur 10 kali) dan menyalurkan mereka ke SMK. Koperasi yang **membayar tunai ke SMK**. Pelatih dan alat yang menyediakan SMK. Untuk tahun ini tidak ada fasilitas seperti itu karena **biaya pelatihannya semakin mahal**...(Wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada*

tanggal 7 agustus 2009 pukul 13.30-15.45 di Ruang Koordinator Usaha)

3. Masyarakat

- a. Anggota KSU SBW dalam hal ini adalah Ibu Titin yang memberikan pelatihan ketrampilan sulam pita kepada anggota KSU SBW yang lain. Hal tersebut sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Titin dalam kutipan wawancara berikut :

....pelatihan yang diadakan koperasi dengan pelatihnya adalah saya sendiri yaitu pelatihan sulam. Alat-alatnya disediakan oleh koperasi. Akan tetapi nantinya anggota mengganti biaya pengadaan alat-alat tersebut...(wawancara dengan Ibu Titin, anggota Kelompok 160 pada tanggal 6 September 2009, pukul 13.00-14.00 WIB di Rumah Penanggung Jawab Kelompok 160)

- b. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang sebagai penyedia paket pelatihan bagi anggota koperasi. Dalam penyediaan paket pelatihan tersebut, Dekopinda sebagai pihak pelatih, penyedia tempat dan alat. Kutipan wawancara berikut dengan Ibu Yuni mengenai hubungan KSU SBW dengan Dekopinda Kota Malang

...Dekopin itu sebuah gerakan. Koperasi yang ada dalam naungan Dekopin termasuk SBW memberikan iuran kepada dekopin berupa beberapa persen dari SHU, yang kemudian iuran tadi dikelola oleh Dekopin dan diwujudkan dalam bentuk paket-paket pelatihan...(Wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 7 agustus 2009 pukul 13.30-15.45 di Ruang Koordinator Usaha)

- c. *International Labour Organization* (ILO). ILO merupakan lembaga internasional yang melakukan kerjasama dengan KSU SBW. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Jujun berikut ini :

...Desember tahun kemarin saya diikutkan koperasi SBW mengikuti TOT (training of trainer). Pelatihan itu kerjasama dengan pemprov dan depnaker propinsi, penyelenggranya ILO. Dilakukan selama seminggu, saya masuk 4 besar. Kemudian diminta dari pihak ILO menjadi trainer Donomulyo dan Blitar. Trainer pemberdayaan ekonomi untuk mantan TKI, lebih fokus untuk diarahkan ke wirausaha...Wawancara dengan Ibu Jujun, Pembina Penyuluh Lapangan pada tanggal 25 Agustus 2009 pada pukul 12.10-13.20 WIB di ruang Koordinator Usaha)

- d. Yayasan Damandiri, yayasan ini bekerjasama dengan KSU SBW dalam suatu program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dengan kelompok target yaitu memberdayakan para peserta Keluarga Berencana (KB). Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Herni mengenai hal tersebut :

kalau dari Yayasan yaitu Damandiri itu kita menumbuhkan UPPKS lagi. Harapannya dari peserta KB bisa mendirikan koperasi perempuan dan pemberdayaan dari program POSDAYA Damandiri. Untuk mendirikan koperasi menggunakan STR .(wawancara dengan Ibu Herni, Sekretaris I KSU SBW pada pukul 09.30-10.30 WIB di Ruang Sekretariat)

C. Instrumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh KSU SBW terdapat beberapa instrumen penting yang patut menjadi perhatian. Beberapa instrumen tersebut meliputi biaya dan aturan. Kedua instrumen ini menjadi penting karena menjadi faktor pendukung terkait berlangsungnya pemberdayaan ekonomi. Dari beberapa upaya pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan KSU SBW dalam pemberdayaan, hanya konsultasi usaha saja yang tidak dianggarkan biaya. Hal ini terjadi karena konsultasi usaha pada dasarnya tidak masuk dalam rencana kerja dari KSU SBW. Berikut ini dijelaskan biaya dan aturan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Biaya

a. Pinjaman anggota yang disediakan KSU SBW

Tabel 21. Rencana dan Realisasi Pinjaman Anggota

| No | Tahun | Pinjaman | Volume Usaha | | Deviasi | % |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Rencana | Realisasi | | |
| 1 | 2006 | Pinjaman Anggota TR | 9.050.000.000 | 8.982.230.000 | (67.770.000) | -0,75 |
| | | Pinjaman Anggota NTR | 975.000.000 | 1.415.500.000 | 440.500.000 | 45,18 |
| | | Pinjaman KPPK | 2.375.000.000 | 1.677.450.000 | (697.550.000) | -29,3 |
| Jumlah | | | 12.400.000.000 | 12.075.180.000 | (324.820.000) | |
| 2 | 2008 | Pinjaman | 11.600.000.000 | 15.315.100.000 | 3.715.100.000 | 32,03 |

| No | Tahun | Pinjaman | Volume Usaha | | Deviasi | % |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Rencana | Realisasi | | |
| | | Anggota TR | | | | |
| | | Pinjaman Anggota NTR | 2.500.000.000 | 1.882.900.000 | (617.100.000) | -24,68 |
| | | Pinjaman KPPK | 1.350.000.000 | 1.187.300.000 | (162.700.000) | -12,05 |
| Jumlah | | | 15.450.000.000 | 18.385.300.000 | 2.617.100.000 | 19,00 |

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU SBW

b. Biaya pelatihan

Tabel 22. Anggaran untuk Beberapa Jenis Pelatihan

| No | Jenis Pelatihan | Tujuan | Sasaran | Anggaran |
|----|--|--|--|---------------|
| 1 | Pemantapan Sistem TR untuk seluruh anggota, meneruskan program tahun sebelumnya bagi anggota yang belum mengikuti. | Memperdalam dan mempertegas Sistem TR kepada seluruh anggota meneruskan program tahun sebelumnya melalui pemantapan Sistem TR kepada anggota yang diadakan setiap bulan. | Seluruh Anggota | Rp.18.000.000 |
| 2 | Pendidikan khusus PJ yang belum optimal melaksanakan Sistem TR. | Memantapkan dan membantu PJ. me mahami sistem TR, hak dan kewajibannya sebagai PJ | PJ Kelompok yang belum optimal melaksanakan TR | Rp. 5.000.000 |
| 3 | Pendidikan kader PPL | Melanjutkan program tahun sebelumnya untuk membentuk kader-kader PPL yang siap dengan SDM yang sesuai dengan kebutuhan lapangan | Anggota atau PJ kelompok yang ber minat menjadi PPL | Rp. 5.000.000 |
| 4 | Pelatihan kewirausahaan. | Menambah pengetahuan & wawasan manajemen pada usahanya bagi anggota | Anggota yang punya usaha baik anggo ta bulanan maupun anggota KPPK | Rp. 2.500.000 |
| 5 | Pelatihan Ketrampilan | Menambah pengetahuan & ketrampilan bagi anggota | Anggota yang punya usaha baik anggota bulanan maupun anggota KPPK | Rp. 2.500.000 |

Sumber : KSU Setia Budi Wanita

c. Biaya pemasaran

Biaya pemasaran produk anggota yang diselenggarakan oleh KSU SBW tidak dianggarkan untuk setiap bentuk pemasaran. Biaya pemasaran melalui

waserda tidak dianggarkan secara khusus. Hanya saja setiap produk anggota yang dijual melalui waserda, waserda mengambil keuntungan sebesar 5 %/item dari harga yang dipasang oleh anggota. Sedangkan biaya pengadaan bazar tidak akan tetapi pengadaan bazar selalu dilakukan setiap bulan. Hal tersebut bisa dilakukan karena KSU SBW hanya menyediakan tempat di halaman KSU SBW untuk para anggota yang akan menjual barang dagangannya. Selanjutnya untuk jaringan usaha, bentuk pemasaran ini juga tidak dianggarkan biayanya karena sifat tugasnya yang tidak terlalu berat, yaitu melakukan pendataan mengenai anggota-anggota yang memiliki usaha.

d. Biaya Gaji

Nominal untuk gaji yang diberikan baik kepada pengurus, pengawas, PPL dan karyawan ada di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang. Besaran UMR Kota Malang pada tahun 2009 yaitu Rp. 945.373,-. Biaya gaji di KSU SBW ada di angka di atas Rp.1.000.000,- dan dibayarkan satu bulan sekali.

2. Aturan

Dalam pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW masyarakat dapat ikut serta dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan jika sudah menjadi anggota. Jenis keanggotaan ada dua yaitu anggota yang masuk kelompok bulanan dan anggota yang masuk kelompok harian atau bisa disebut anggota KPPK. Syarat untuk menjadi anggota kelompok bulanan harus membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Besaran simpanan pokok yaitu Rp.100.000,-, sedangkan besaran simpanan wajib minimal Rp.10.000,- dan besaran simpanan manasuka maksimal Rp.5.000.000,-. Sedangkan syarat untuk menjadi anggota KPPK juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka dengan besaran yang berbeda dibandingkan dengan anggota kelompok bulanan. Besaran simpanan yang harus dibayar untuk simpanan pokok sejumlah Rp.100.000,-, simpanan wajib minimal sejumlah Rp. 100.000,- dan untuk besaran simpanan manasuka tidak ada ketentuan batas.

Masyarakat selain anggota tidak dapat berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW. Hanya saja untuk kegiatan pemberdayaan Pinjaman Non Tanggung Renteng (NTR), Simpanan (Sifina, Simara dan Simpati) dan beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan

melalui kerjasama dengan pihak lain, masyarakat non anggota juga bisa mendapatkannya dengan persyaratan tertentu. Jika seseorang atau beberapa orang sudah keluar dari status keanggota KSU SBW, mereka sudah tidak bisa berpartisipasi dari serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi KSU SBW, akan tetapi kecuali untuk beberapa kegiatan yang sebelumnya dijelaskan. Terdapat beberapa hal yang membuat seseorang atau beberapa orang dikeluarkan dari status keanggotaan KSU SBW. Hal tersebut bisa terjadi karena keinginan dari anggota sendiri dan bisa juga dari keinginan kelompok untuk mengeluarkan anggota tersebut. Anggota yang keberdaanya dirasakan kelompok merepotkan justru merepotkan maka kelompok mempunyai hak untuk mengajukan pengeluaran anggota tersebut. Misalnya anggota yang tidak disiplin untuk membayar angsuran atau anggota yang sama sekali tidak membayar angsuran.

D. Kelompok Sasaran (*Target Group*) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Berdasarkan Gender

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa yang menjadi kelompok sasaran pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh KSU SBW baik dari kaum perempuan maupun dari kaum laki-laki. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Didik ketika menceritakan tentang keanggotaan Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK)

.....Anggota dari KPPK terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam satu kelompok dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Anggota yang tergabung dalam KPPK lebih ditekankan terdiri dari pedagang ataupun pengusaha kecil bukan berdasarkan gender...(wawancara dengan Pak Didik, Koordinator KPPK dan NTR pada tanggal 12 Agustus 2009, pukul 10.00-11.00 WIB)

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Herni mengenai kelompok sasaran pemberdayaan ekonomi oleh KSU SBW. Meskipun kelompok sasaran pemberdayaan ekonomi oleh KSU SBW baik dari kaum laki-laki maupun perempuan akan tetapi mayoritas anggota dari KSU SBW adalah dari kaum perempuan. Hal tersebut sudah menjadi misi dari pendahulu KSU SBW. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ibu Herni :

....Koperasi SBW ini adalah koperasi wanita jadi mayoritas anggotanya ya dari kaum perempuan meskipun memang ada beberapa anggota adalah laki-laki. Dan kenapa wanita? Itu berdasarkan sejarahnya dulu. Bu Syafril sebagai pendiri, mendirikan koperasi SBW dulu tidak lain tujuannya untuk memberikan pendidikan bagi perempuan. Harapan Wanita sekarang berpikiran rasional, mampu memenej ekonomi rumah tangga bersama suami....(wawancara dengan Ibu Herni, Skretaris I KSU SBW pada pukul 09.30-10.30 WIB di Ruang Sekretariat)

2. Berdasarkan Cakupan Wilayah

Kelompok sasaran pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW yaitu masyarakat di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang dan Kota Malang) dan Kota Batu baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Rieni S. Sofyan berikut ini :

Sampai sekarang ini kami (KSU SBW) merambah hingga Malang Raya (Kabupaten Malang dan Kota Malang) dan Kota Batu dalam hal pemberdayaan masyarakat (wawancara dengan Ibu Rieni S. Sofyan, Ketua II KSU SBW pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 10.00-11.00 WIB di KSU SBW)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Didik mengenai cakupan wilayah pemberdayaan ekonomi oleh KSU SBW. Bapak Didik mengemukakan wilayah asal dari para anggota KPPK. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak Didik :

Anggota KPPK itu merambah hingga Malang Raya, yang terbanyak dari anggota KPPK yaitu berasal dari Kota Malang. Untuk jumlah anggota per kecamatan di Kota Malang hampir sama (wawancara dengan Pak Didik, Koordinator KPPK dan NTR pada tanggal 12 Agustus 2009, pukul 10.00-11.00 WIB)

E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Internal

a. Faktor pendukung

- Adanya pendampingan yang intensif dari PPL

Pendampingan dari PPL kepada anggota yang intensif menjadi faktor pendukung dalam melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan koperasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuni

...Kita secara organisasi, tatanannya seperti apa..pengurus mempunyai kepanjangan tangan yaitu PPL. PPL terjun ke kelompok. Ini betul-betul menjadi suatu nilai plus tersendiri. Sehingga semua program yang ada itu bisa segera disosialisasikan melalui program pertemuan kelompok. (wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator usaha pada tanggal 26 Agustus 2009, pada pukul 13.00-14.10 di Ruang Koordinator Usaha)

- Adanya Buku Penghubung

Partisipasi anggota berupa penyampaian kritik, saran dan keluhan kepada KSU SBW yang terkait dalam pemberdayaan ekonomi telah dilakukan melalui media yang disebut Buku Penghubung. Berikut ini adalah wawancara dengan salah satu anggota kelompok KSU SBW terkait mengenai Buku Penghubung :

...Melalui Buku Penghubung, itu saran-saran semua masuk kesini, terkait masalah pemberdayaan juga. Selain itu keluhan terhadap karyawan ataupun pengurus juga. Iya ini dikumpulkan setiap bulan. Ini yang menjembatani kelompok dengan lembaga (KSU SBW). Jika hanya RAT saya yang menjadi media untuk menyampaikan aspirasi anggota ya nanti permasalahan terlalu menumpuk. Karena RAT diadakan satu tahun sekali..(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok pada tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 selesai pertemuan kelompok di rumah Ibu Yeni, Penanggung Jawab Kelompok 160)

- Pertemuan rutin antara PJ Kelompok, PPL dan Pengurus

Pertemuan rutin antara PJ Kelompok, PPL dan Pengurus menjadi sebuah wadah yang tepat dalam menyampaikan permasalahan anggota secara lisan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Tuni berikut :

....Pertemuan satu bulan sekali, pada setiap bulannya kita kumpulkan ketua kelompok. Itu juga merupakan media yang efektif . dimana pengurus bisa menjelaskan secara detil baik program ataupun permasalahan dan keinginan dari anggota terkait kegiatan yang diselenggarakan koperasi.. (wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator usaha pada tanggal 26 Agustus 2009, pada pukul 13.00-14.10 di Ruang Koordinator Usaha)

- Adanya sistem tanggung renteng

Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam proses Simpan Pinjam memberikan hal yang baik seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Sofyan berikut ini :

.....Adanya sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam memberikan dampak positif yaitu meminimalisir terjadinya kredit macet. Sehingga pinjaman yang disediakan untuk anggota berjalan

dengan lancar.... (wawancara dengan Ibu Rieni S. Sofyan, Ketua II KSU SBW pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 10.00-11.00 WIB di KSU SBW)

b. Faktor Penghambat

- Masih ada PPL yang kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota.

Keberadaan PPL tidak selalu menjadi faktor pendukung bagi pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut bisa saja justru menjadi faktor penghambat. Tidak semua PPL secara proaktif dalam menyampaikan informasi, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yuni berikut ini :

...Menurut pengamatan saya, hambatan itu juga bisa karena tidak proaktifnya PPL dalam menyampaikan informasi ke lapangan pada saat pertemuan kelompok. Dalam pertemuan kelompok itu kan kadang PJ cenderung fokus menyelesaikan masalah keuangan atau angsuran. Sehingga penyampaian informasi dari PJ kadang kurang lengkap. Maka dari itu PPL harus sigap dan peka apa saja informasi yang belum tersampaikan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor yaitu 12 PPL kan kemampuannya beda....(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator usaha pada tanggal 26 Agustus 2009, pada pukul 13.00-14.10 di Ruang Koordinator Usaha)

- Anggota yang kurang disiplin

Pelaksanaan simpan pinjam akan berjalan lancar juga terkait dengan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu PJ Kelompok yang bernama Ibu Yeni berikut :

....anggota yang sering tidak membayar angsuran pada saat pertemuan akan merepotkan kelompok. Apalagi PJ. PJ harus berusaha menagih kepada anggota yang bersangkutan. Bahkan saya juga kadang sampai menagih ke rumah anggota yang bersangkutan. (wawancara dengan Ibu Yeni, PJ Kelompok 160 pada tanggal 6 September 2009, pada pukul 13.00-14.00 WIB di Rumah Ibu Yeni)

- Permasalahan pribadi anggota

Permasalahan pribadi anggota juga berpotensi untuk menjadi factor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi, seperti yang dijelaskan Ibu Erfat beriku ini :

....Ada sih mas beberapa pelatihan yang diselenggarakan koperasi, tapi saya sendiri kurang care dengan pelatihan itu. Maksudnya saya hampir nggak pernah ikut pelatihan. Paling yang saya ikuti pelatihan tanggung renteng itupun karena wajib bagi semua anggota. Masalahnya saya harus mengurus anak saya yang masih kecil...(wawancara dengan Ibu Erfat, anggota dari kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009, pada pukul 14.30-14.50 WIB di Rumahnya Ibu Nur, PJ kelompok 155)

- Konsultasi usaha yang tidak diprogramkan

Keberadaan konsultasi usaha sebenarnya memberikan manfaat yang baik bagi anggota akan tetapi konsultasi ini tidak menjadi program kerja KSU SBW, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Yuni terkait permasalahan tersebut :

....Beberapa anggota sempat berkonsultasi dengan saya mengenai penghitungan keuangan dalam usaha. Anggota ada yang terkadang menyadari bahwa hitungan di atas kertas memperlihatkan laba usaha yang didapat masih sedikit, karena ada beberapa variabel yang selama ini tidak dimasukkan dalam penghitungan laba rugi. Akan tetapi jarang anggota yang melakukan konsultasi ini karena memang konsultasi ini tidak menjadi program kerja koperasi.....(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator usaha pada tanggal 26 Agustus 2009, pada pukul 13.00-14.10 di Ruang Koordinator Usaha)

2. Eksternal

a. Faktor Pendukung

- Bantuan dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang

Bantuan dana dari DPRD Kota Malang kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang memberikan dampak yang baik bagi koperasi-koperasi di bawah naungannya termasuk KSU SBW

....Yang saya lihat ya baik Walikota Malang dan Gubernur Jawa Timur saat ini, karena propinsi Jawa Timur diberi nama Propinsi Koperasi. Karena semua koperasi yang berhasil ada di Jawa timur. Sekarang yang saya lihat Walikota konsen kepada koperasi. Dulu seperti Dekopinda untuk dana dari APBD tidak pernah ada. Kebetulan saya juga pengurus BKWK (Badan Komunikasi Wanita Koperasi). Sekarang ada kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan dana kepada Dekopinda. Hal ini berpengaruh baik pada berkembangnya koperasi..(wawancara dengan Ibu Herni, Sekretaris I KSU SBW pada tanggal 15 September 2009, pada pukul 09.30-10.30 di Ruang sekretariat)

- Banyaknya mitra kerja

Selama KSU SBW berdiri, KSU SBW telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Beberapa pihak ada yang sudah tidak menjalin hubungan kerjasama dengan KSU SBW (misal kerjasama dengan SMK 1 Negeri Malang) dan ada juga yang mulai merintis kerjasama dengan KSU SBW (misalnya Yayasan Damandiri)

b. Faktor Penghambat

- Biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota

Kerjasama dalam pelatihan ketrampilan menjadi terhambat ketika biaya yang ditawarkan mitra kerja semakin tinggi, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuni berikut ini :

....Jadi kita yang bayar tunai ke SMK untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan fasilitas pinjaman (kredit) kepada anggota dan kita hubungkan ke SMK untuk tenaga, tempat dan alat ada disana. Untuk tahun ini (tahun 2009) sudah tidak karena biaya pelatihan ketrampilan dari SMK semakin mahal. Setiap tahun bertambah. Untuk tahun ini kita tidak bekerjasama lagi dengan SMK depan MOG itu..(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 7 Agustus 2009, pada pukul 13.30-15.45 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

BAB VI

ANALISA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MALANG MELALUI KOPERASI SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA (KSU SBW)

A. Tahap-tahap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang Melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, hal: 2) menjelaskan pemberdayaan mempunyai tiga tahapan penting yang harus dilakukan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tiga tahapan tersebut juga dilakukan oleh KSU SBW dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi masyarakat Malang. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran

Dalam tahap penyadaran KSU SBW mewujudkan salah satunya dalam bentuk Pelatihan Tanggung Renteng. Tahap penyadaran memiliki tujuan yaitu memberikan pencerahan kepada sasaran pemberdayaan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun *demand*) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka. Pelatihan Tanggung Renteng ini dilaksanakan pada awal ketika seseorang masuk menjadi anggota baru KSU SBW. Tidak ada pungutan biaya kepada anggota terkait keikutsertaannya dalam pelatihan ini. Anggota baru diberikan penyadaran bahwa ketika sudah menjadi anggota KSU SBW maka ada beberapa hak yang patut mereka miliki dan ada beberapa kewajiban yang patut mereka laksanakan. Hal tersebut juga sejalan dengan kutipan wawancara dengan Ibu Yuni:

.....anggota baru wajib ikut pembinaan untuk mengenal betul tanggung renteng seperti apa..anggota mempunyai kewajiban dan hak apa saja. Hak itu termasuk simpanan, pinjaman, pelatihan-pelatihan, waserda, bazaar,dan fasilitas yang lain. Itu berlangsung 1 bulan. Minggu ke 3 hari sabtu dan minggu (2 kali). Dilakukan oleh PPL dan Pak Dede yaitu anggota koperasi yang diangkat sebagai staf ahli... (Wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha, pada tanggal 5 Agustus 2009, pada pukul 11.00-12.00 WIB di Ruang Koordinator Usaha)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Ibu Yuni juga bisa diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam pelatihan tersebut selain anggota baru adalah PPL (Pembina Penyuluh Lapang) dan Pak Dede. Kedua pihak tersebut merupakan pihak dari KSU SBW sendiri. KSU SBW pada kenyataannya telah mempunyai sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas tersebut. Selain itu dalam kutipan wawancara tersebut juga diketahui bahwa pelaksanaan Pelatihan Tanggung Renteng hanya dilakukan 2 kali pertemuan. Padahal tidak semua anggota baru memiliki tingkat kemampuan pemahaman yang sama. Dalam 2 kali pertemuan, tidak semua anggota baru akan benar-benar memahami apa yang telah ditransfer dalam pelatihan tersebut. Permasalahan seperti ini telah disadari oleh KSU SBW. Oleh karena itu ada upaya lain yang dilakukan oleh KSU SBW untuk menangani permasalahan tersebut.

Selain Pelatihan Tanggung Renteng, KSU SBW juga melakukan pendampingan kepada seluruh kelompok anggota. Pendampingan ini dilakukan oleh Pembina Penyuluh Lapang (PPL). Dalam pendampingan tersebut telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPL melakukan sosialisasi program, kebijakan baru, informasi lain yang baru dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota. Sosialisasi beberapa hal tersebut akan selalu didapatkan selama berstatus menjadi anggota. Dan hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi anggota bahwa anggota berhak untuk mendapatkan informasi dan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh KSU SBW.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan dan *enabling*. Pengkapasitasan ini terdiri dari tiga jenis yaitu : manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar, lokakarya dan sejenisnya. Dalam hal ini KSU SBW melakukan pengkapasitasan manusia dalam bentuk konsultasi usaha dan pelatihan-pelatihan. Konsultasi usaha bukan merupakan program KSU SBW akan tetapi keberadaannya memberikan manfaat bagi anggota untuk membekali mereka dalam menjalankan usahanya.

Konsultasi usaha ini hanya dari segi penghitungan keuangan suatu usaha yang dilakukan oleh Koordinator Usaha KSU SBW. Dalam konsultasi usaha anggota sama sekali tidak dipungut biaya. Kemudian bentuk pengkapisitan yang lain yaitu pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud meliputi pelatihan ketrampilan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan profesi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Titin dalam kutipan wawancara berikut ini:

...Di SBW selain pelatihan tanggung renteng ada juga pelatihan ketrampilan seperti pelatihan sulam tadi mas yang saya jadi pelatihnya. Terus ada juga pelatihan kewirausahaan dan ada lagi pelatihan-pelatihan untuk pengurus, karyawan dan PPL... (wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160))

Pada tahap pengkapisitan ini tidak hanya dilakukan oleh KSU SBW sendiri. Akan tetapi ada beberapa pihak yang ikut serta bekerjasama dengan KSU SBW. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak dari pemerintah, swasta dan masyarakat seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Masing-masing pihak mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Kerjasama yang dilakukan SBW dengan pihak pemerintah melalui Balai Latihan Koperasi (Balatkop) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Dalam kerjasama ini Balatkop dan BLK menyediakan pelatih, tempat, alat dan biaya-biaya lainnya untuk pelatihan. Sedangkan KSU SBW mempersiapkan anggotanya untuk diikutsertakan dalam pelatihan tersebut. KSU SBW dan anggotanya sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Selain dari pihak pemerintah, KSU SBW juga bekerjasama dengan Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) sebagai pihak swasta. Dalam hal ini Puskowanjati memberikan bantuan dana dan pelatihan untuk KSU SBW. Sedangkan KSU SBW sebagai koperasi primer melakukan simpan pinjam di unit usahanya Puskowanjati. Hal ini juga telah dijelaskan Ibu Yuni dalam kutipan wawancara sebagai berikut

...Setiap bulan kita (KSU SBW) selalu mendapatkan pelatihan dari Puskowanjati. Pelatihan itu untuk para pengurus, pengawas, PPL dan karyawan. Dalam pelatihan itu kita juga mengungkapkan permasalahan kita di koperasi terkait masalah pekerjaan...(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 23 November 2009, pukul 11.30-12.00 di Ruang Koordinator Usaha)

Pihak swasta yang lain yang bekerjasama dengan KSU SBW adalah SMK Negeri I Malang. Pihak SMK I Negeri Malang menyediakan paket pelatihan ketrampilan. Paket pelatihan dari SMK tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Anggota KSU SBW diharuskan mengeluarkan sejumlah biaya. Dalam hal ini kedua pihak saling diuntungkan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu Yuni mengenai kerjasama dengan SMK I Negeri Malang :

....Anggota yang menginginkan ketrampilan mejahit, memasak ataupun kecantikan difasilitasi pinjaman (diangsur 10 kali) dan menyalurkan mereka ke SMK. Koperasi yang membayar tunai ke SMK. Pelatih dan alat yang menyediakan SMK...(Wawancara dengan Ibu Yuni pada tanggal 7 Agustus 2009, pukul 13.30-15.45 WIB di ruang Koordinator Usaha)

Mitra kerjasama KSU SBW dari pihak masyarakat yaitu meliputi kerjasama dengan Ibu Titin yang merupakan salah satu anggota KSU SBW, Yawasan Damandiri, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang dan *International Labour Organization* (ILO). Beberapa pihak tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda dari hubungan kerjasamanya dengan KSU SBW. Ibu Titin merupakan pelatih ketrampilan sulam yang mentransfer ilmunya kepada anggota lain melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh KSU SBW. Selama ini KSU SBW belum mempunyai staf ahli dalam hal pelatihan ketrampilan sulam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama pihak masyarakat dengan KSU SBW telah mampu menutupi kekurangan KSU SBW selama ini. Dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut anggota mengeluarkan biaya untuk pengadaan peralatan pelatihan dan Ibu Titin sebagai pelatih menerima komisi dari KSU SBW. Selain kerjasama dengan Ibu Titin, KSU SBW juga bekerjasama dengan Yayasan Damandiri dan *International Labour Organization* (ILO). Terdapat persamaan dari kerjasama ini yaitu KSU SBW memberikan kontribusi penyediaan pelatih dalam program kedua pihak tersebut. Dalam hal ini KSU SBW bukan sebagai penyelenggara program. KSU SBW sebagai pihak pendukung dari program. Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kedua program tersebut sama sekali tidak dipungut biaya.

3. Tahap Pendayaan

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*. Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas dan peluang. Pemberian ini diberikan sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Jika dikaitkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW maka tahap ini diwujudkan dalam bentuk simpanan dan pinjaman dana, bantuan pemasaran produk yang dihasilkan anggota dan akses pekerjaan dengan upah yang layak. Ketiga bentuk pemberdayaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh KSU SBW sendiri akan tetapi ada kerjasama yang dijalin dengan PT Perusahaan Nasional Madani (PT. PNM). PT. PNM menyediakan bantuan dana kepada KSU SBW dalam mendukung penyelenggaraan pinjaman bagi kelompok bulanan. Selain itu bentuk pemberdayaan yang lain dilakukan oleh KSU SBW sendiri.

Seluruh anggota KSU SBW mampu dan berhak untuk mengakses ketiga bentuk pemberdayaan ekonomi tersebut. Akan tetapi memang tidak semua anggota ikut serta dalam seluruh bentuk pemberdayaan ekonomi tersebut. Biasanya anggota hanya berpartisipasi dalam beberapa bentuk pemberdayaan saja. Hal tersebut selain karena tidak ada kewajiban bagi anggota untuk ikut serta dalam upaya pemberdayaan ekonomi tersebut, alasan lain yaitu karena keterbatasan KSU SBW. Misalnya saja tidak semua anggota menggunakan sarana pemasaran baik waserda ataupun bazar. Hal tersebut selain karena tidak semua anggota memiliki usaha juga karena keterbatasan daya tampung sarana pemasaran tersebut. Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Ibu Puji dalam kutipan wawancara berikut ini :

....di waserda juga menjadi tempat pemasaran produk dari anggota. Meskipun tidak semua produk anggota bisa ditampung disini..karena keterbatasan tempat. Hal itu sebenarnya juga disikapi koperasi dengan mengadakan bazar. Akan tetapi bazaar sendiri tidak diselenggarakan setiap hari...(wawancara dengan Ibu Puji, Penanggung Jawab Warung Serba Ada (waserda) pada tanggal 5 Agustus 2009,pukul 10.00-11.00 WIB di Waserda)

I

Dari ketiga bentuk pemberdayaan ekonomi tersebut, dua diantaranya mengharuskan adanya biaya yang dikeluarkan oleh anggota. Hanya akses pekerjaan dengan upah yang layak yang penyelenggaraanya tanpa pungutan biaya kepada anggota sebaliknya anggota yang bertispasi justru mendapatkan gaji

dalam penyelenggaraannya. Kemudian untuk pemasaran produk yang dihasilkan anggota melalui waserda menghendaki biaya. Biaya tersebut berupa keuntungan 5%/item harga produk dari anggota. Kemudian pinjaman yang diberikan juga mengharuskan biaya dari anggota yang berupa bunga pinjaman. Hanya saja dalam hal ini bunga yang harus dibayar tidak memberatkan anggota karena dapat diangsur, bunganya ringan dan dapat di-Tanggung Renteng. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titin dalam kutipan wawancara berikut ini :

....bunga dari pinjaman ini nggak berat mas, bungannya nggak terlalu tinggi. Lagian juga peluanasanya bisa diangsur. Kalaupun memang belum bisa angsuran juga bisa ditanggung renteng...(wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok 160, pada pukul 13.00-14.00 di Rumah Ibu Yeni (PJ Kelompok 160))

Berdasarkan uraian mengenai tahap-tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui KSU SBW pada kenyataannya telah menggambarkan fenomena administrasi publik. Chandler dan Plano dalam Keban (2004. hal: 3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Pasolong (2007. hal: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dari dua definisi tersebut terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi publik. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hubungan yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam uraian tahap-tahap pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh KSU SBW dapat diketahui bahwa hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat saling bersinergi. Hal tersebut telah digambarkan dengan jelas terutama pada tahap pengkapasitasan. Ketiga pihak terlibat dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Kerjasama KSU SBW dengan Balatkop dan BLK sebagai kepanjangan pemerintah telah memberikan keuntungan bagi keduanya. Anggota KSU SBW dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan yang diselenggarakan Balatkop

dan BLK secara gratis. Kemudian keuntungan yang didapat pihak pemerintah sendiri, bahwa KSU SBW menjadi pendukung program pemberdayaan ekonomi pemerintah. Kerjasama KSU SBW dengan SMK Negeri I juga memberikan keuntungan kedua pihak. KSU SBW dapat menyediakan program pelatihan untuk anggota dari SMK N I Malang. Sedangkan SMK N I Malang mendapatkan keuntungan materi dari KSU SBW berupa biaya pelatihan yang telah dibayar. Kemudian kerjasama KSU SBW dengan Yayasan Damandiri dan ILO juga memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Yayasan Damandiri dan ILO mendapatkan tenaga pelatih dari KSU SBW untuk program yang mereka selenggarakan. Sedangkan KSU SBW dapat menyediakan program pelatihan untuk masyarakat di luar anggota.

2. Pemenuhan ragam kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan tujuan diselenggarakannya administrasi publik. Pemenuhan ragam kebutuhan publik merupakan upaya yang terencana karena mengutamakan efektifitas dan efisiensi. Berdasarkan tahap-tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KSU SBW dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sebagian besar bentuk pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh KSU SBW yang bekerjasama dengan berbagai pihak tidak memungut biaya dari masyarakat. Hal ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yang selama ini menjadi kelompok sasaran pemberdayaan. Kemudian dari segi efisiensi lebih dirasakan oleh KSU SBW dan pihak pemerintah. KSU SBW dapat meminimalisasi kebutuhan biaya untuk menyediakan berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi baik untuk anggota maupun non anggota koperasi. Hal tersebut misalnya pada tahap pengkapasitasan biaya telah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Sedangkan pihak pemerintah diuntungkan oleh KSU SBW karena KSU SBW telah melakukan seluruh tahapan pemberdayaan kepada masyarakat meskipun anggaran yang dikucurkan pemerintah hanya pada tahap pengkapasitasan saja.

B. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Menurut Parson et. al.(1994: hal 112-113) bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras yaitu aras Mikro, Aras Mezzo dan Aras Makro. Berdasarkan teori tersebut strategi pemberdayaan ekonomi KSU SBW dapat digolongkan menjadi dua yaitu pemberdayaan ekonomi melalui Aras Mikro dan pemberdayaan melalui Aras Mezzo. Pertama, pemberdayaan ekonomi melalui Aras Mikro memiliki tujuan yaitu membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tujuan itu selaras dengan tujuan diselenggarakannya jasa konsultasi usaha untuk anggota koperasi. Anggota koperasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah anggota koperasi yang memiliki usaha. Keberadaan konsultasi usaha ini bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan anggota dalam melakukan penghitungan keuangan usaha. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Satrio dalam kutipan wawancara berikut ini :

....Saya kan ada usaha catering kebetulan setelah selang beberapa waktu menjadi anggota SBW saya mendapatkan ilmu mengenai penghitungan biaya usaha dari konsultasi ke koperasi. Saat itu saya sadar ternyata jika di atas kertas keuntungan yang saya dapatkan tidak begitu banyak, ada beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam penghitungan itu yang dulunya saya tidak pernah memasukkannya...(wawancara dengan Ibu Satrio, anggota kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009 pukul 14.50-15.15 WIB di Rumah Ibu Nur, PJ kelompok 155)

Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui Aras Mezzo dilakukan oleh KSU SBW dalam wujud simpan pinjam, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan akses pekerjaan dengan upah yang layak. Menurut Parson et. al.(1994: hal 112-113), Aras Mezzo adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Jika dikaitkan dengan beberapa wujud strategi pemberdayaan ekonomi yang telah disebutkan maka dapat ditarik benang merahnya. Pertama mengenai simpan pinjam. Simpan pinjam dapat dilakukan oleh anggota jika anggota tersebut tergabung dalam sebuah kelompok. Kelompok tersebut biasa

dinamakan Kelompok Tanggung Renteng. Dalam menyelenggarakan simpan pinjam tersebut setiap kelompok anggota harus mengadakan pertemuan rutin kelompok, yaitu satu bulan sekali. Dalam pertemuan kelompok tersebut, dinamika kelompok akan berjalan. Setiap permasalahan yang terjadi di dalam kelompok harus diselesaikan di dalam kelompok juga. Hal tersebut seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibu Titin:

... pertemuan kelompok ini Mas, tidak hanya dilakukan angsuran saja Mas. Kadang kami juga membahas masalah kelompok yang tidak disiplin bayar setoran. Biasanya kami menyepakati kalau ada yang nggak bisa bayar setoran ya kami temui bahkan sampai ke rumahnya segala... (wawancara dengan Ibu Titin, anggota kelompok pada tanggal 6 September 2009 pukul 13.00-14.00 selesai pertemuan kelompok di rumah Ibu Yeni, Penanggung Jawab Kelompok 160)

Kedua mengenai pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan oleh KSU SBW selalu melibatkan beberapa anggota koperasi. Pelatihan wirausaha ataupun pelatihan ketrampilan biasanya dihadiri oleh sekitar 30-40 anggota. Anggota yang dimaksud adalah semua anggota yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota. Pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan melalui transfer ilmu dengan cara lisan akan tetapi transfer ilmu juga dilakukan dengan praktek.

Ketiga mengenai pemasaran. Strategi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemasaran disediakan KSU SBW bagi sekelompok anggota yang telah mempunyai usaha. Pemasaran ini diwujudkan KSU SBW dalam bentuk Warung Serba Ada (Waserda), Bazaar dan Jaringan Usaha. Hal ini pada kenyataannya telah memberikan solusi bagi anggota yang mempunyai usaha dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Keempat mengenai akses pekerjaan dengan upah yang layak. Keberadaan KSU SBW sudah pasti akan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya pekerjaan sebagai pengurus, pengawas, karyawan dan PPL. Dalam menjalankan sebuah koperasi beberapa pihak tersebut sudah pasti akan melakukan koordinasi dan bekerjasama untuk memajukan dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

Jika dilihat dari konsep strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Solihin maka pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW telah memperhatikan beberapa hal yang penting dalam pemberdayaan misalnya (www.docstoc.com) :

- Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh KSU SBW dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi anggota untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan program koperasi atau lebih khusus terkait dengan masalah pemberdayaan ekonomi. Selain itu KSU SBW juga memberikan hak kepada semua anggota untuk dapat menjadi pengurus, pengawas, karyawan dan PPL dengan persyaratan tertentu.

Beberapa media yang menjadi sarana dalam penyampaian aspirasi anggota misal yaitu keberadaan Buku Penghubung yang bisa diisi saran ataupun kritikan dari anggota kepada pengurus, karyawan, pengawas ataupun PPL. Selain itu juga diadakannya pertemuan PJ dengan pengurus dan PPL setiap bulan salah satu fungsinya untuk membicarakan permasalahan kelompok. Kemudian Rapat Anggota Tahunan juga menjadi wadah aspirasi anggota untuk memberikan usulan rencana program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi untuk satu tahun ke depan.

- Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat.

Terkait dengan visi KSU SBW yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi, KSU SBW juga tidak melupakan sesuatu hal yang penting untuk mewujudkan keberdayaan anggota. Berdasarkan hal tersebut para anggota koperasi diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam kelompok. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yuni berikut ini :

...sistem Kelompok Tanggung Renteng kita, semua permasalahan kelompok harus selesai di kelompok, misalnya masalah setoran. Koperasi tahunya bahwa setoran setiap anggota sudah lengkap. Akan tetapi memang jika kelompok "mentok" tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka PPL, Pengurus atau Karyawan akan turun tangan.... (wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha KSU SBW pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 10.00.11.00 di Ruang Koordinator Usaha)

- Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial.

Proses berjalannya pemberdayaan ekonomi KSU SBW juga tidak terlepas dari keberadaan fasilitator atau pendamping. Fasilitator atau pendamping dalam KSU SBW dapat disebut sebagai Pembina Penyuluh Lapang (PPL). Menurut Solihin (www.docstoc.com) ada beberapa hal terkait dengan keberadaan pendamping dalam pemberdayaan yaitu :

- Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya.
- Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Solihin, PPL KSU SBW juga melaksanakan tugasnya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok secara rutin setiap bulan. Berikut penjelasan dari Ibu Jujun mengenai jadwal kerja dari PPL setiap bulan :

Jadwal kerja saya itu sekitar tgl 6-13 untuk turun ke kelompok. Untuk tgl 3 biasanya ada pembekalan dari pengurus mengenai materi2 apa yang akan disampaikan kepada anggota. Tgl 15 ada pemantauan dari PPL kepada kelompok Binaan mengenai penyelesaian setoran dari kelompok kepada koperasi (1x 24 jam). Kalau ada permasalahan PPL harus turun ke lapangan lagi untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam kelompok. Kemudian tgl 25 mengikuti acara evaluasi kinerja selama sebulan. Forum evaluasi dihadiri oleh Pengawas, Pengurus dan PPL dan Koord usaha. PPL melaporkan kegiatannya selama satu bulan. Permasalahan yang dibahas terkait organisasi dan keuangan...(wawancara dengan Ibu Jujun, PPL pada tanggal 25 Agustus 2009, pukul 12.10-13.20 WIB di ruang Koordinator Usaha)

- Pemberian akses kepada keluarga miskin dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern.

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dapat digolongkan juga sebagai koperasi wanita. Koperasi ini dinaungi oleh Koperasi Primer, yaitu Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Mayoritas anggota dan pengelola (pengurus, pengawas, karyawan dan PPL) KSU SBW adalah perempuan. Berdasarkan hal tersebut akses pekerjaan memang diperuntukkan seluas-luasnya untuk kaum perempuan.

Selain memberikan akses seluas-luasnya kepada kaum perempuan, KSU SBW ini juga memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman modal, bantuan pemasaran, pendidikan dan akses pekerjaan. Semua hal tersebut bisa didapatkan masyarakat setelah menjadi anggota koperasi. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dalam hal mudahnya prosedur melakukan pinjaman modal untuk para anggota koperasi, baik itu kaum perempuan ataupun kaum laki-laki. Agunan yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan modal, ternyata di KSU SBW ini agunan ditiadakan.

- Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi. Jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak. Terkait dengan hal tersebut, dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi KSU SBW menjalin hubungan kerjasama baik antara pihak di luar koperasi maupun dengan anggota koperasi sendiri.

C. Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW merupakan wujud pemberdayaan yang melibatkan semua aktor pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai bentuk kontribusi yang berbeda-beda pula terkait keterlibatannya dalam pemberdayaan tersebut.

1. Pemerintah

Menurut Solihin (2009 : hal 46) bahwa membangun partisipasi masyarakat dengan memberikan kepercayaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan memberikan kepercayaan kepada KSU SBW sebagai organisasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Hanya saja ketika KSU SBW tidak dapat melakukan beberapa bentuk strategi pemberdayaan maka terjadilah hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan KSU SBW.

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh KSU SBW dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut terkait masalah dana, sumber daya manusia dan tempat. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Malang melalui kepanjangan tangannya yaitu Balai Latihan Koperasi (Balatkop) dan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan KSU SBW dalam implementasi pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini kontribusi dari Pemerintah Kota Malang yaitu dalam hal penyediaan dana, penyediaan pelatih, peralatan-peralatan dan tempat sebagai faktor pendukung dalam menyelenggarakan pemberdayaan tersebut.

2. Swasta

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dalam konteks pemberdayaan ini bisa masuk dalam kategori pihak swasta. Hal tersebut dikarenakan koperasi bukanlah sebuah organisasi nirlaba. Koperasi mencari keuntungan dalam setiap usaha yang diselenggarakan termasuk dalam hal simpan pinjaman atau penjualan suatu produk. Menurut Solihin (2009 : hal 49) bahwa koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Selain itu koperasi merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotong-royongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. Dua hal yang dikemukakan oleh Solihin mengenai koperasi tersebut

telah diwujudkan oleh KSU SBW dalam beberapa bentuk strategi pemberdayaan ekonomi. Beberapa bentuk strategi pemberdayaan ekonomi tersebut misalnya simpan pinjam, pelatihan-pelatihan, pemasaran, konsultasi usaha dan akses pekerjaan dengan upah yang layak. Beberapa dari bentuk strategi pemberdayaan ekonomi tersebut ada yang diselenggarakan oleh KSU SBW sendiri dan ada juga yang dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak luar. Pihak swasta yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW tersebut yaitu antara lain PT Perusahaan Nasional Madani (PNM), sebagai penyedia dana untuk pinjaman kepada anggota KSU SBW. Selain PT PNM, pihak swasta lain yang menjadi rekan kerjasama dari KSU SBW adalah Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati). Puskowanjati memberikan bentuk pelatihan dan konsultasi baik kepada pengurus, pengawas, PPL dan Karyawan KSU SBW setiap bulan. Pihak swasta lain yang menjadi rekan kerjasama dalam hal pelatihan ketrampilan dengan KSU SBW adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Malang.

3. Masyarakat

Dalam konteks aktor pemberdayaan ekonomi bahwa yang dimaksud dengan masyarakat bisa meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW juga dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa LSM yaitu *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Damandiri. Menurut Solihin (2009: hal 48) bahwa LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah. Dari pernyataan Solihin tersebut yang perlu dicermati adalah pemberdayaan ekonomi di Kota Malang juga menjadi program Pemerintah sedangkan LSM mempunyai posisi yang strategis untuk dapat menjalankan program yang bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi tersebut. Program pemberdayaan ekonomi ini ternyata telah dan masih diselenggarakan oleh ILO dan Yayasan Damandiri. Dalam kasus ini program yang dimiliki oleh kedua LSM tersebut diselenggarakan melalui kerjasama dengan KSU SBW. Posisi kedua LSM tersebut dalam jalinan kerjasama dengan KSU SBW sebagai penyedia dana dan pemilik program.

D. Instrumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (SBW)

Dari beberapa upaya pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan KSU SBW dalam pemberdayaan, hanya konsultasi usaha saja yang tidak dianggarkan biaya. Hal ini terjadi karena konsultasi usaha pada dasarnya tidak masuk dalam rencana kerja dari KSU SBW. Berikut ini dijelaskan biaya dan aturan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW).

1. Biaya

a. Pinjaman anggota yang disediakan KSU SBW

Jika dilihat data mengenai realisasi pinjaman anggota tahun 2006 dan 2008 (Tabel. 21) diketahui bahwa terjadi peningkatan dana untuk pinjaman sebesar Rp. 6.310.120.000. Kemudian jika dilihat data mengenai pertumbuhan jumlah anggota pada tahun 2006 dan 2008 terjadi kenaikan 1.162 anggota. Kenaikan realisasi pinjaman berbanding lurus dengan kenaikan jumlah anggota. Hal tersebut menandakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW jumlah masyarakat yang diberdayakan oleh KSU SBW juga bertambah dalam kurun waktu 2 tahun. Akan tetapi diketahui bahwa terjadi penurunan untuk realisasi pinjaman KPPK pada tahun 2008 yaitu sejumlah Rp. 490.150,-.

b. Biaya pelatihan

Berdasarkan data tabel. 22 diketahui bahwa KSU SBW menitikberatkan kegiatan pemberdayaannya pada strategi pemberdayaan ekonomi yaitu simpan pinjam dengan Sistem Tanggung Renteng. Alokasi dana untuk pelatihan Tanggung Renteng Anggota hingga mencapai Rp. 18.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut KSU SBW berupaya untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng secara maksimal kepada seluruh anggota. Selain itu jika dibandingkan alokasi dana untuk pelatihan PJ dan Kader PPL lebih tinggi daripada pelatihan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan. Hal tersebut menandakan bahwa KSU SBW lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendampingan kepada anggota. Hal tersebut juga terkait dengan salah satu tahap pemberdayaan yaitu penyadaran. Kemudian jika

dilihat bahwa alokasi dana untuk pelatihan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan menempati posisi terendah. Alokasi dana untuk kedua pelatihan ini perlu ditingkatkan mengingat hal tersebut penting kegunaannya untuk membekali anggota dalam menciptakan lapangan usaha sendiri.

c. Biaya pemasaran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa biaya pemasaran tidak dianggarkan secara khusus. Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya luas pemasaran untuk produk anggota. Alokasi dana untuk pemasaran produk anggota perlu dianggarkan secara khusus agar pangsa pasar produk anggota bisa lebih luas. Hal ini penting sekali untuk memotivasi anggota yang belum memiliki usaha untuk berwirausaha. Selain itu bagi seorang pengusaha bahwa pemasaran adalah hal yang sangat penting karena meskipun kapasitas produksi besar akan tetapi jika wilayah pemasaran sempit maka akan sulit untuk mendapatkan laba secara maksimal.

d. Biaya Gaji

Nominal untuk gaji yang diberikan baik kepada pengurus, pengawas, PPL dan karyawan ada di atas Rp.1.000.000,- dan di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang pada tahun 2009 yaitu Rp. 945.373,-. Jumlah gaji di atas UMR dapat diasumsikan telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Malang.

2. Aturan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW dengan prosedur yang mudah. Masyarakat hanya perlu untuk masuk menjadi anggota dan membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka. Bagi masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota kelompok bulanan seseorang cukup membayar uang sebesar Rp. 120.000,-. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota KPPK cukup membayar uang sejumlah Rp. 200.000,- bisa diangsur. Hal tersebut memberikan kesempatan

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW.

E. Kelompok Sasaran (*Target Group*) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Berdasarkan Gender

Meskipun target pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW mencakup masyarakat wilayah Malang Raya dan Kota Batu secara keseluruhan akan tetapi mayoritas target pemberdayaan tersebut dari kaum perempuan. Hal tersebut memang tidak terlepas dari jenis KSU SBW sendiri yaitu tergolong koperasi wanita. Anggota KSU SBW mayoritas adalah dari kaum perempuan. Hal tersebut dan beberapa fakta lain dijelaskan oleh Ibu Herni dalam kutipan wawancara berikut ini :

....Sebenarnya tidak hanya wanita saja yang menjadi anggota koperasi akan tetapi laki-laki juga ada. Misal karyawan di KPPK ada laki2. Dari 5000 anggota ada 10 % bapak. Termasuk pedagang cilok, bakso, ojek. Tapi sifatnya mereka (anggota laki-laki) hanya dilayani dan tidak mempunyai hak suara untuk dia menjadi seorang pengurus. Prinsipnya kita memang kaum perempuan. Karena kita koperasi wanita. Laki-laki tidak bisa menjadi pengurus. Hak menerima pinjaman dan pendidikan ada....(wawancara dengan Ibu Herni, Sekretaris I KSU SBW pada pukul 09.30-10.30 WIB di Ruang Sekretariat)

2. Berdasarkan Cakupan Wilayah

Selain itu pada kenyataannya masyarakat yang menjadi target pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW tersebut mempunyai cakupan wilayah yang lebih luas. Hal ini terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh KSU SBW dengan pihak luar, dalam hal ini yaitu kerjasama KSU SBW dengan ILO. Kerjasama tersebut dilakukan melalui penyeleksian PPL yang akan diturunkan untuk membina sekelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan. Berikut adalah kutipan dari PPL yang bersangkutan :

...Saya kapan itu, Desember tahun kemarin (2008) disuruh untuk menghadiri TOT di Surabaya.selama seminggu. Disitu ada penilaian dan saya masuk 4 besar. Akhirnya saya disuruh melatih di Donomulyo dan Blitar. Pelatihan lebih fokus ke kewirausahaan. Ada modulnya mas, jadi

modul itu yang saya sampaikan. Isi dari modul itu pelatihan mulai dari membuat suatu usaha sampai pemasaran. Ada sharing juga dari pengalaman usaha mantan TKI tersebut.... (wawancara dengan Ibu Jujun, PPL pada tanggal 25 Agustus 2009, pukul 12.10-13.20 WIB di ruang Koordinator Usaha).

F. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

1. Internal

a. Faktor pendukung

- Adanya pendampingan yang intensif dari PPL

Pendampingan intensif dari PPL termasuk dalam salah satu tahapan dari pemberdayaan ekonomi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjoyo (2007 : hal 2) bahwa pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Hal-hal yang dapat digunakan dalam tahapan ini adalah memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun *demand*) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dalam diri mereka. Tahap penyadaran anggota yang dilakukan oleh KSU SBW sebenarnya bukan hanya melalui pendampingan dari PPL. Akan tetapi awal masuk menjadi anggota, anggota diwajibkan untuk mengikuti Pelatihan Tanggung Renteng. Dalam pelatihan tersebut anggota tidak hanya diberi tahu bagaimana menerapkan Sistem tanggung Renteng dalam proses simpan pinjam. Akan tetapi anggota juga diberi kesadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu guna mengoptimalkan potensi dalam diri. Penyadaran tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat mengingat pelatihan tanggung renteng hanya dilakukan dua kali pertemuan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukanlah

pendampingan yang intensif dari PPL untuk melanjutkan misi dari Pelatihan Tanggung Renteng tersebut.

Tugas PPL seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka adalah kepanjangan Pengurus dalam melakukan sosialisasi program, kebijakan baru, informasi lain yang baru dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota. Sosialisai yang dilakukan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan penyadaran bahwa anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan memiliki peran dalam proses berjalannya KSU SBW. Selain itu informasi mengenai pelatihan, pemasaran dan akses pekerjaan sengaja disuguhkan kepada anggota agar anggota merasa bahwa beberapa hal tersebut memang dibutuhkan dan menjadi hak mereka dalam mengembangkan potensi diri.

- Adanya Buku Penghubung dan Pertemuan antara PJ Kelompok, PPL dan Pengurus

Menurut Prijono dan Pranarka dalam Asmarani (2001 : hal 45) mengungkapkan bahwa :

...paling tidak terdapat tiga tahapan dalam upaya pemberdayaan, yaitu tahap inisial, dimana proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. Kemudian tahap parsipatoris dimana proses pemberdayaan mulai bergeser yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat. Dan terakhir tahap emansipatif, diman pemberdayaan sudah dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung pemerintah bersama masyarakat.

Jika dicermati bahwa esensi dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh Prijono dan Pranarka dalam Asmarani yaitu adanya misi dalam pemberdayaan untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Berkaitan dengan adanya Buku Penghubung dan pertemuan PJ Kelompok, Pengurus dan PPL dalam kehidupan KSU SBW, bahwa kedua hal tersebut mencerminkan semangat koperasi untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan anggota terkait dengan program pemberdayaan ekonomi yang ada di koperasi. Adanya kedua hal tersebut akan meningkatkan peran anggota dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi yang ada di KSU SBW.

- Adanya sistem tanggung renteng

Faktor yang tidak kalah penting dalam sebuah pelaksanaan pemberdayaan yaitu adanya keberlanjutan. Pemberdayaan tidak akan berjalan optimal jika pemberdayaan berhenti di tengah jalan, artinya bahwa perlu ada sesuatu hal yang mendukung berlangsungnya pemberdayaan secara terus menerus. Hal tersebut jika dikaitkan dengan keberadaan salah satu bentuk strategi pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW yaitu simpan pinjam maka Sistem Tanggung Renteng menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program simpan pinjam tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem Tanggung Renteng telah meminimalisir terjadinya kredit macet. Kecilnya peluang untuk terjadi kredit macet memberikan dampak positif bagi anggota untuk bisa terus mendapatkan pinjaman modal. Berdasarkan hal tersebut maka KSU SBW memiliki peluang yang besar untuk terus melaksanakan pemberdayaan ekonomi terutama dalam hal pinjaman modal.

b. Faktor Penghambat

- Masih ada PPL yang kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota.

Berkaitan dengan tahap penyadaran sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendampingan dari PPL kepada anggota merupakan upaya melanjutkan misi dari Pelatihan Tanggung Renteng. Misi tersebut yaitu memberikan kesadaran bagi anggota bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu guna mengoptimalkan potensi dalam diri. Tidak proaktifnya PPL secara otomatis akan menghambat berjalannya tahap penyadaran bagi anggota. Berdasarkan hal tersebut maka KSU SBW atau pihak Pengurus Koperasi dapat mengambil tindakan yaitu melakukan pelatihan kembali atau mengenakan sanksi kepada PPL tersebut. Jika PPL kurang proaktif dikarenakan kualitas kemampuannya yang terbatas maka Pengurus dapat menyelenggarakan pelatihan lagi

khusus bagi PPL tersebut. Sedangkan jika PPL tersebut tidak proaktif karena kesengajaan yang dilakukan berulang-ulang maka Pengurus dapat mengenakan sanksi kepada mereka.

- Anggota yang kurang disiplin

Pada kenyataannya bagi anggota yang kurang disiplin membayar angsuran akan merepotkan kelompok. Hal tersebut bisa menghambat kelompok mendapatkan pinjaman modal. Permasalahan seperti itu dapat dibicarakan kepada PPL atau Pengurus pada saat pertemuan rutin PJ Kelompok, PPL dan Pengurus setiap bulan. Dari pertemuan tersebut jika permasalahan masih sekiranya bisa diatasi maka PPL ataupun pengurus dapat membantu PJ Kelompok untuk menyadarkan anggota tersebut. Akan tetapi jika anggota yang kurang disiplin tersebut sudah tidak bisa disadarkan karena melakukan hal yang sama berulang-ulang maka anggota tersebut bisa dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.

- Permasalahan pribadi anggota

Permasalahan pribadi yang menyebabkan anggota tidak optimal dalam mengikuti serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW memang tidak bisa dihindarkan. Misalnya karena sibuknya anggota untuk merawat anaknya. Akan tetapi berdasarkan hal tersebut Pengurus atau juga PPL harus tetap memberikan pengertian kepada anggota bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi mereka. Serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan koperasi bisa diikuti kapan saja ketika anggota mampu (segi waktu dan segi biaya) untuk mengikuti kegiatan tersebut.

- Konsultasi usaha yang tidak diprogramkan

Keberadaan konsultasi usaha sebenarnya penting sekali untuk anggota, mengingat bahwa tidak sedikit anggota KSU SBW yang mempunyai usaha. Anggota yang mempunyai usaha tersebut ada yang masih merintis dan ada yang sudah lama menggeluti usaha tersebut bahkan sebelum masuk menjadi anggota koperasi. Terdapat kutipan wawancara

dari Ibu Nur yang juga menggambarkan pentingnya keberadaan konsultasi usaha.

.....Saya itu sudah punya usaha jual ayam potong sebelum masuk SBW. Tetapi selama ini saya belum menemukan partner untuk melakukan konsultasi usaha di SBW. Tapi mungkin saja ada, mungkin saya saja yang belum menemukannya. Selama ini kalau saya mau konsultasi usaha mengenai ayam itu ada kantornya, Kantor Phokpan namanya.... (wawancara dengan Ibu Nur, PJ Kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009 pukul 15.15-15.45 di Rumahnya Ibu Nur)

Berdasarkan hal tersebut informasi berupa tips atau saran mengenai seputar usaha yang sedang digeluti oleh anggota perlu dipenuhi dalam bentuk konsultasi usaha. Konsultasi usaha yang tidak diprogramkan oleh KSU SBW menjadi faktor penghambat utama dalam mengoptimalkan fungsi konsultasi usaha tersebut. Terdapat hal yang juga menjadi alasan terkait tidak diprogramkannya rencana tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuni berikut ini :

...itu mas sebenarnya rencana untuk mengadakan program konsultasi usaha. Cuma masalahnya kita belum menemukan orang yang cocok untuk mengisi posisi konsultan usahanya itu....(wawancara dengan Ibu Yuni, Koordinator Usaha pada tanggal 26 Agustus 2009, pada pukul 13.00-14.10 di Ruang Koordinator Usaha)

Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan konsultasi usaha oleh KSU SBW. Jika KSU SBW tidak menemukan orang untuk mengisi posisi konsultan usaha, KSU SBW dapat bermitra dengan lembaga yang mempunyai kemampuan untuk memberikan konsultasi tentang suatu usaha tertentu tersebut. Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dapat menghubungkan anggota yang membutuhkan konsultasi usaha dengan instansi yang mempunyai kemampuan dalam usaha tersebut. Selain itu KSU SBW dapat menghubungkan anggota yang memerlukan konsultasi usaha dengan anggota yang telah lama bergelut di dunia usaha tersebut melalui jaringan usaha.

2. Eksternal

a. Faktor Pendukung

- Bantuan dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang

Dana merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi semakin besar maka tidak bisa dipungkiri hal tersebut akan menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Kota Malang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai tahun 2007 (sebelumnya tidak ada anggaran untuk Dekopinda) memberikan bantuan dana kepada Dekopinda Kota Malang demi perkembangan koperasi-koperasi dibawah naungannya. Hal tersebut pada kenyataannya membawa dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi koperasi khususnya KSU SBW. Sejak adanya bantuan dana dari DPRD Kota Malang untuk Dekopinda, Dekopinda memberikan kuota yang lebih banyak bagi peserta dari koperasi yang akan mengikuti kegiatan pelatihan misal untuk pelatihan keirausahaan.

- Banyaknya mitra kerja

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KSU SBW mempunyai banyak mitra dalam menjalin hubungan kerjasama dalam hal pemberdayaan ekonomi. Pada kenyataannya dengan banyaknya mitra di luar koperasi, KSU SBW dapat menyediakan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dengan beragam bentuk strategi, terjangkau oleh anggota dalam hal biaya dan dengan cakupan masyarakat yang lebih luas. Hubungan kerjasama yang telah dilakukan bertahun-tahun antara KSU SBW misal dengan Balatkop dan BLK membuktikan bahwa KSU SBW mempunyai peluang besar untuk tetap terus menyediakan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang beragam tidak hanya pinjaman modal saja.

b. Faktor Penghambat

- Biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota

Biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota pasti akan menghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut dapat menyebabkan sedikitnya anggota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut, KSU SBW sebenarnya mampu menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dengan pelatih dari anggota sendiri dan hal ini sudah dilakukan. Selain itu KSU SBW dapat bermitra dengan pihak luar yang hanya diminta untuk menyediakan pelatih saja dan untuk tempat dan alat bisa diatasi oleh KSU SBW sendiri.

G. Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi melalui Mikro Kredit

Untuk dapat mengetahui keberhasilan suatu proses pemberdayaan berikut diuraikan beberapa indikator, diantaranya oleh McVay (1997 : 17–29) yang mengemukakan beberapa ukuran keberhasilan sebuah lembaga jasa pelayanan usaha (*Business Development Service, BDS*), dalam hal ini lembaga dinilai sebagai lembaga pemberdayaan melalui mikro kredit. Ukuran-ukuran tersebut terdiri atas:

1. Skala (*scale*), yaitu jumlah orang yang dilayani. Makin banyak jumlah orang yang dilayani, maka makin baik pencapaian proses pemberdayaan, dan sebaliknya. Berdasarkan data (tabel. 14) mengenai pertumbuhan jumlah anggota mulai tahun 2005 sampai 2008 terjadi kenaikan jumlah anggota KSU SBW sebanyak 111 orang. Hal ini berarti bahwa semakin banyak anggota yang dilayani oleh KSU SBW. Selain itu banyak juga masyarakat yang mampu mengakses kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW
2. Luas layanan (*outreach*) yaitu: pasar yang belum terlayani, khususnya adalah masyarakat miskin. Makin luas jangkauan yang dicapai, maka makin baik proses pemberdayaan dan sebaliknya. Murah biaya untuk menjadi anggota KSU SBW memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi

semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjadi anggota dalam kelompok bulanan seseorang cukup membayar uang sejumlah Rp. 120.000,-. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota KPPK cukup membayar uang sejumlah Rp. 200.000,- itupun bisa diangsur.

3. Dampak (*impact*) yaitu: perbaikan yang dicapai berupa perbaikan kehidupan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan usaha. Makin baik tingkat kehidupan masyarakat dan semakin baik pertumbuhan usaha, maka makin baik pencapaian proses pemberdayaan masyarakat, dan sebaliknya. Sesuai dengan penjelasan tersebut pada kenyataannya KSU SBW telah memberikan kontribusi kepada anggota berupa pertumbuhan usaha. Berikut ini adalah kutipan dari 2 anggota KSU SBW yang mengakui bahwa sejak masuk menjadi anggota KSU SBW usaha yang mereka geluti mengalami perkembangan.

.....sebelum jadi anggota SBW mas, saya sudah punya usaha, catering dan menjahit. Tapi dulu omset saya masih kecil. Setelah masuk SBW saya mendapatkan pinjaman uang dan saya gunakan untuk usaha saya. Dan sekarang lumayan omsetnya lebih besar daripada yang dulu.... (wawancara dengan Ibu Satrio, anggota kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009, pukul 14.50-15.15 WIB di Rumah Ibu Nur PJ Kelompok 155)

.....pinjaman dari SBW untuk modal. Modal yang saya pinjam dari SBW saya gunakan untuk menambah bidak untuk jual ayam di pasar. Setiap kali pinjam untuk nambah modal. Alhamdulillah omsetnya tambah banyak....Dulu hanya jualan 10 ekor sebelum nambah bidak, setelah tambah bidak nambah 50-60 ekor. Seekor ayam dah dalam bentuk daging tanpa kepala dan cekeer beratnya 1,5-2 kilogram. Sebelum masuk jadi anggota SBW, Bu Nur mempunyai bidak hanya mampu menampung sekitar 5-10 ekor ayam....(wawancara dengan Ibu Nur, PJ kelompok 155 pada tanggal 8 September 2009, pukul 15.15-15.45 WIB di Rumah Ibu Nur)

4. Efektivitas biaya (*cost effectiveness*) yaitu: biaya terendah yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program. Makin rendah biaya yang dikeluarkan untuk proses yang dilaksanakan, maka makin baik proses berlangsung, dan sebaliknya. Jika diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa KSU SBW mampu memberikan pemberdayaan ekonomi dengan

bentuk strategi yang beragam dan dengan jumlah masyarakat yang diberdayakan yang tidak sedikit. Akan tetapi beberapa bentuk pemberdayaan tersebut dapat dilakukan oleh KSU SBW tanpa pungutan biaya kepada masyarakat. Hal yang seperti ini menjadi gambaran bahwa rendahnya biaya untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW.

5. Keberlanjutan (*sustainability*) yaitu jaminan dalam jangka panjang akan pelayanan dan keuntungan yang terus-menerus. Makin terjaminnya proses berlangsung dalam jangka panjang dan makin banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh masyarakat, maka makin baik proses pelaksanaan, dan sebaliknya. Berkaitan dengan penjelasan tersebut sebenarnya KSU SBW memberikan tawaran keuntungan bagi anggotanya sehubungan dengan besaran pinjaman yang diperoleh. Besaran pinjaman yang diperoleh anggota yaitu 4 kali besaran simpanan wajib. Semakin besar simpanan wajib seorang anggota maka makin banyak pinjaman yang akan didapatkan. Selain itu mulai tahun 2009 pelatihan dari kerjasama KSU SBW dengan Dekopinda Malang lebih disesuaikan dengan kebutuhan anggota koperasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dekopinda Kota Malang lebih disesuaikan dengan kemampuan Dekopinda Kota Malang sendiri. Kedua keuntungan tersebut yang ditawarkan oleh KSU SBW kepada anggota.

Berdasarkan beberapa hal yang dijelaskan di atas bahwa pemberdayaan ekonomi melalui mikro kredit oleh KSU SBW dapat dikatakan telah berhasil. Meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi tersebut dan terlepas dari besar skala keberhasilannya.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

a. Simpanan dan pinjaman

Salah satu strategi pemberdayaan ekonomi dalam Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) yaitu diadakannya usaha koperasi dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Dalam bentuk pemberdayaan ekonomi ini masyarakat diarahkan untuk dapat mengatur alokasi pendapatan untuk kebutuhan hidup termasuk modal usaha dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menyesuaikan kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Kategori usaha simpanan dan pinjaman ini sendiri juga bisa dikelompokkan dalam 3 bentuk yaitu Simpan Pinjam (SP), Pinjaman dan Simpanan.

b. Pelatihan-pelatihan

Program Simpanan dan Pinjaman merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi. Bentuk lain yang bisa dilakukan dalam hal pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur dan memanfaatkan pinjaman atau pendapatan untuk kegiatan produktif. Peningkatan kemampuan tersebut bisa dilakukan melalui cara diadakannya pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini bisa meliputi pelatihan khusus (bagi pengurus, pengawas, PPL dan PJ), pelatihan ketrampilan dan pelatihan wirausaha.

c. Pemasaran produk yang dihasilkan anggota

Pemasaran sebuah produk merupakan hal yang dianggap paling penting bagi semua pengusaha. Jika produk sudah dihasilkan akan tetapi wilayah pasar sempit maka akan berakibat sedikitnya laba yang didapatkan atau justru mengalami kerugian. Berdasarkan hal ini KSU SBW tidak hanya memberikan pinjaman modal ataupun pelatihan ketrampilan, KSU SBW juga menyediakan fasilitas bagi anggotanya yang berwirausaha untuk

memasarkan produknya. Fasilitas tersebut diwujudkan KSU SBW berupa Warung Serba Ada (Waserda), Bazaar dan Jaringan Kerja.

d. Konsultasi usaha

Sebenarnya penyediaan jasa konsultasi usaha tidak menjadi program kerja tersendiri dari KSU SBW. Jasa konsultasinya juga terbatas hanya menangani permasalahan perhitungan keuangan usaha. Akan tetapi pada kenyataannya, keberadaan jasa konsultasi ini bermanfaat bagi anggota. Dari beberapa anggota yang pernah menggunakan jasa ini diketahui bahwa anggota yang memiliki usaha belum mengerti sepenuhnya cara menghitung laba rugi dalam suatu usaha. Setelah melakukan konsultasi ternyata anggota menyadari bahwa ada beberapa variabel lagi yang perlu dicantumkan dalam menghitung laba rugi. Selama ini (hingga tahun 2009) anggota dapat menggunakan jasa konsultasi perhitungan keuangan usaha ini secara gratis.

e. Akses Pekerjaan dengan upah yang layak

Keberadaan KSU SBW merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja bagi penduduk Kota Malang. Pada tahun 2009 ini tercatat terdapat 43 tenaga kerja yang mengisi posisi jabatan dalam organisasi koperasi. Posisi jabatan tersebut meliputi pengurus sejumlah 5 orang, pengawas sejumlah 2 orang, karyawan sejumlah 24 orang dan Pembina Penyuluh Lapang (PPL) sejumlah 12 orang. Jumlah nominal penghasilan baik pengurus, pengawas, karyawan dan PPL di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang.

2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) yaitu dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Balai Latihan Koperasi (Balatkop) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sesangkan dari pihak masyarakat diwakili dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Damandiri. Dan untuk dari pihak swasta yaitu pihak dari Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW), Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), PT. Perusahaan

Nasional Mandiri (PT. PNM) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Malang

3. Instrumen yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Setia Budi Wanita (SBW)

Instrumen pemberdayaan ekonomi ini terdiri dari dua hal yaitu biaya dan aturan. Dari beberapa upaya yang diselenggarakan KSU SBW dalam pemberdayaan, hanya konsultasi usaha saja yang tidak dianggarkan biaya. Hal ini terjadi karena konsultasi usaha pada dasarnya tidak masuk dalam rencana kerja dari KSU SBW. Dari segi biaya terdiri dari jumlah pinjaman anggota yang disediakan KSU SBW, biaya pelatihan, biaya pemasaran dan biaya gaji. Dari segi aturan yaitu masyarakat bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi KSU SBW terlebih dahulu harus menjadi anggota KSU SBW

4. Kelompok sasaran (*target group*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

Meskipun target pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW mencakup masyarakat wilayah Malang Raya dan Kota Batu secara keseluruhan akan tetapi mayoritas target pemberdayaan tersebut dari kaum perempuan. Hal tersebut memang tidak terlepas dari jenis KSU SBW sendiri yaitu tergolong koperasi wanita. Selain itu pada kenyataannya masyarakat yang menjadi target pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW tersebut mempunyai cakupan wilayah yang lebih luas. Hal ini terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh KSU SBW dengan pihak luar, dalam hal ini yaitu kerjasama KSU SBW dengan ILO.

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penerapan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Kota Malang melalui Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW)

- a. Internal

- Faktor pendukung

- Adanya pendampingan yang intensif dari PPL

Pendampingan yang intensif dari PPL untuk melanjutkan misi dari Pelatihan Tanggung Renteng tersebut yaitu sebagai faktor pendukung dalam memberikan kesadaran bahwa anggota mempunyai

hak untuk mendapatkan sesuatu guna mengoptimalkan potensi dalam diri. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisai program, kebijakan baru, informasi lain yang baru dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota.

- Adanya Buku Penghubung dan Pertemuan antara PJ Kelompok, PPL dan Pengurus

Berkaitan dengan adanya Buku Penghubung dan pertemuan PJ Kelompok, Pengurus dan PPL dalam kehidupan KSU SBW, bahwa kedua hal tersebut mencerminkan semangat koperasi untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan anggota terkait dengan program pemberdayaan ekonomi yang ada di koperasi. Adanya kedua hal tersebut akan meningkatkan peran anggota dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi yang ada di KSU SBW.

- Adanya sistem tanggung renteng

Sistem Tanggung Renteng menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program simpan pinjam tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem Tanggung Renteng telah meminimalisir terjadinya kredit macet. Kecilnya peluang untuk terjadi kredit macet memberikan dampak positif bagi anggota untuk bisa terus mendapatkan pinjaman modal. Berdasarkan hal tersebut maka KSU SBW memiliki peluang yang besar untuk terus melaksanakan pemberdayaan ekonomi terutama dalam hal pinjaman modal.

Faktor Penghambat

- Masih ada PPL yang kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota. Tidak proaktifnya PPL secara otomatis akan menghambat berjalannya tahap penyadaran bagi anggota.
- Anggota yang kurang disiplin

Pada kenyataannya bagi anggota yang kurang disiplin membayar angsuran akan merepotkan kelompok. Hal tersebut bisa menghambat kelompok mendapatkan pinjaman modal.

- Permasalahan pribadi anggota

Permasalahan pribadi yang menyebabkan anggota tidak optimal dalam mengikuti serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW memang tidak bisa dihindarkan. Misalnya karena sibuknya anggota untuk merawat anaknya.

- Konsultasi usaha yang tidak diprogramkan

Keberadaan konsultasi usaha sebenarnya penting untuk anggota, mengingat bahwa tidak sedikit anggota KSU SBW yang mempunyai usaha. Akan tetapi tidak diprogramkannya konsultasi usaha telah menjadi faktor penghambat utama dalam berjalannya bentuk pemberdayaan tersebut.

b. Eksternal

Faktor Pendukung

- Bantuan dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang

Dana merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi semakin besar maka tidak bisa dipungkiri hal tersebut akan menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan pemberdayaan. Sejak adanya bantuan dana dari DPRD Kota Malang untuk Dekopinda, Dekopinda memberikan kuota yang lebih banyak bagi peserta dari koperasi yang akan mengikuti kegiatan pelatihan misal untuk pelatihan keirausahaan.

- Banyaknya mitra kerja

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KSU SBW mempunyai banyak mitra dalam menjalin hubungan kerjasama dalam hal pemberdayaan ekonomi. Pada kenyataannya dengan banyaknya mitra di luar koperasi, KSU SBW dapat menyediakan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dengan beragam bentuk strategi, terjangkau oleh anggota dalam hal biaya dan dengan cakupan masyarakat yang lebih luas.

Faktor Penghambat

- Biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota

Biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal bagi anggota pasti akan menghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut dapat menyebabkan sedikitnya anggota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

6. Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU) sebagai lembaga pemberdayaan melalui mikro kredit

Terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh McVay (1997 : 17–29) yang mengemukakan beberapa ukuran keberhasilan sebuah lembaga jasa pelayanan usaha (*Business Development Service, BDS*), dalam hal ini lembaga dinilai sebagai lembaga pemberdayaan melalui mikro kredit. Ukuran-ukuran tersebut terdiri atas: skala (*scale*), luas layanan (*outreach*), dampak (*impact*), efektivitas biaya (*cost effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*). Berdasarkan beberapa indikator tersebut bahwa pemberdayaan ekonomi melalui KSU SBW dapat dikatakan telah berhasil. Meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi tersebut dan terlepas dari besar skala keberhasilannya.

B. Saran

1. Terkait dengan permasalahan mengenai tidak proaktifnya PPL, pihak Pengurus Koperasi dapat mengambil tindakan yaitu melakukan pelatihan kembali atau mengenakan sanksi kepada PPL tersebut. Jika PPL kurang proaktif dikarenakan kualitas kemampuannya yang terbatas maka Pengurus dapat menyelenggarakan pelatihan lagi khusus bagi PPL tersebut. Sedangkan jika PPL tersebut tidak proaktif karena kesengajaan yang dilakukan berulang-ulang maka Pengurus dapat mengenakan sanksi kepada mereka.
2. Berkaitan dengan permasalahan anggota yang kurang disiplin, permasalahan tersebut dapat dibicarakan kepada PPL atau Pengurus pada saat pertemuan rutin PJ Kelompok, PPL dan Pengurus setiap bulan. Dari

pertemuan tersebut jika permasalahan masih sekiranya bisa diatasi maka PPL ataupun pengurus dapat membantu PJ Kelompok untuk menyadarkan anggota tersebut. Akan tetapi jika anggota yang kurang disiplin tersebut sudah tidak bisa disadarkan karena melakukan hal yang sama berulang-ulang maka anggota tersebut bisa dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.

3. Terkait dengan permasalahan pribadi anggota, Pengurus atau juga PPL harus selalu memberikan pengertian kepada anggota bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi mereka. Serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan koperasi bisa diikuti kapan saja ketika anggota mampu (segi waktu dan segi biaya) untuk mengikuti kegiatan tersebut.
4. Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dapat bermitra dengan lembaga yang mempunyai kemampuan untuk memberikan konsultasi tentang suatu usaha tertentu tersebut. Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita (KSU SBW) dapat menghubungkan anggota yang membutuhkan konsultasi usaha dengan instansi yang mempunyai kemampuan dalam usaha tersebut. Selain itu KSU SBW dapat menghubungkan anggota yang memerlukan konsultasi usaha dengan anggota yang telah lama bergelut di dunia usaha tersebut melalui jaringan usaha.
5. Terkait dengan permasalahan biaya pelatihan ketrampilan dari mitra kerja yang terlalu mahal, KSU SBW sebenarnya mampu menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dengan pelatih dari anggota sendiri dan hal ini sudah dilakukan. Selain itu KSU SBW dapat bermitra dengan pihak luar yang hanya diminta untuk menyediakan pelatih saja dan untuk tempat dan alat bisa diatasi oleh KSU SBW sendiri.